



**PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 19 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN NGADA
TAHUN 2018**



***“ZALA SIRO
SARO, DARA
RILO RALO,
WAE GIBHO
GABHO”***



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

RKPD Tahun 2018 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, *bottom up-top down* dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Ngada pada tahun 2017 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistik yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngada yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2018 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ngada serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**, dapat terwujud.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tahapan Penyusunan RKPD.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.4 Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.5 Sistemetika Dokumen RKPD	12
1.6 Maksud dan Tujuan.....	12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	15
2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ngada	15
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	15
2.1.1.1 Karakteristik Lokalisasi dan Wilayah.....	15
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	21
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Alam	25
2.1.1.4 Demografi Wilayah	26
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemertaan Ekonomi	28
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	38
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	44
2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	44
2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	55
2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan	64
2.1.4 Aspek Daya Saing	68
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	68
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	70
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	72
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	73
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi	74
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	74
2.2.2 Realisasi RPJMD	74
2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan	105
2.3.1 Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran	

Pembangunan.....	105
2.3.2 Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	106
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	116
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	116
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016.....	116
3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2017 serta Perkiraan Tahun 2018.....	117
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	118
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	118
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	126
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	127
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	127
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	129
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	129
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018.....	131
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	175
5.1 Pendekatan Teknokratik	175
5.2 Pendekatan Partisipatif dan botttom up – top down	175
5.3 Pendekatan Politik	176
BAB VI PENUTUP.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD 2018.....	2
Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD 2018	4
Gambar 1.3 Hubungan Keterkaitan RKPD Dengan Dokuemn Perencanaan Lain	8
Gambar 1.4 Rancangan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Ngada.....	12
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ngada	15
Gambar 4.1 Program Prioritas Nasional 2018.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya.....	22
Tabel 2.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Ngada 1980 -2015.....	27
Tabel 2.3 Distribusi dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ngada.....	28
Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013-2015	29
Tabel 2.5 Pertumbuhan Lapangan Usaha 2013-2015 Atas Dasar harga Konstan	30
Tabel 2.6 Prosentase Kontribusi Ekonomi Kab.Ngada 2011-2015 menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga konstan.....	32
Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Kota Bajawa 2011-2015.....	34
Tabel 2.8 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ngada.....	36
Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 s/d 2016	39
Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 s/d 2016	40
Tabel 2.11 Indikator Umum Kesehatan Kabupaten Ngada 2013-2016.....	41
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk >15 tahun menurut Kegiatan Utama.....	42
Tabel 2.13 Rasio Guru Murid, Rata – rata Murid Guru, Rata – rata Murid Sekolah Tahun 2015.....	44
Tabel 2.14 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2016.....	44
Tabel 2.15 Angka Kelulusan di Kabupaten Ngada tahun 2014 – 2016	45
Tabel 2.15 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2015.....	46
Tabel 2.16 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ngada 2014 – 2015.....	46

Tabel 2.18 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Air bersih, dan irigasi	
Tahun 2016	52
Tabel 2.19 Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ngada Pada	
Tahun 2016	54
Tabel 2.20 Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah	
Kabupaten Ngada periode 2014– 2016.....	55
Tabel 2.21 Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2016.....	56
Tabel 2.22 Hasil Kinerja Urusan Pangan Pemerintah Kabupaten	
Ngada periode 2013 – 2015.....	57
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan hidup.....	58
Tabel 2.24. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi	
dan UMKM 2016	62
Tabel. 2.25 Data Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Ngada	
2013 – 2016.....	66
Tabel. 2.26 Data Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Ngada	
Tahun 2013-2016.....	66
Tabel. 2.27 Data Produksi Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2011-2015	67
Tabel 2.28 Pengeluaran perkapita untuk makan dan non makan	
2013 – 2015.....	69
Tabel 2.29 Produktivitas Per Sektor Tahun 2010 s.d 2014 (dalam jutaan).....	70
Tabel 2.30 Target Makro RPJMD 2016-2021	75
Tabel 2. 31 Target Makro RPJMD 2016 -2021 dan Capaian pada tahun 2016.....	75
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2016-2021.....	77
Tabel 2.33 Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2016-2021	

menurut SKPD	81
Tabel 2.34 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2016-2021	83
Tabel 2.35 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	106
Tabel 2.36. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	108
Tabel 3.1. Perbandingan Pendapatan 2017 terhadap target RPJMD 2016-2021	119
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2017.....	121
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/target pendapatan Kab. Ngada Tahun 2015-2018.....	123
Tabel 3.4 Pengeluaran Periodik wajib dan Terikat	124
Tabel 3.5 Rencana Penggunaan kapasitas Riil Keuangan Daerah Kab. Ngada Tahun 2018	125
Tabel.3.6 Skema Alokasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2018.....	126
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada.....	129
Tabel 4. 2 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahun 2016, Kategori dan SKPD Penanggungjawab.....	138
Tabel 5.1 Hasil Reses Bidang Ekonomi.....	176
Tabel 5.2 Hasil Reses Bidang Fisik dan Prasarana.....	178
Tabel 5.3 Hasil Reses Bidang Sosial Budaya	187
Tabel 5.4 Program dan Kegiatan Prioritas SKPD Kabupaten Ngada tahun 2018.....	190
Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Rutin SKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018	191

Tabel 5.6 Rekap Belanja Prioritas dan Rutin Daerah Kabupaten Ngada

Tahun 2018 192

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kab Ngada.....	20
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Ngada dan Perbandingannya dengan NTT dan Nasional 2012-2015 (%).....	29
Grafik 2.3 Kecenderung Sektor Kontribusi terbesar Ekonomi Kabupaten Ngada 2011-2015 (Harga Konstan)	32
Grafik 2.4 PDRB Perkapita (Harga Berlaku) dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Tahun 2011-2015.....	35
Grafik 2.5 Prosentase Pola Pengeluaran Perkapita Perbulan untuk makanan dan Non Makanan 2012-2015.....	36
Grafik 2.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan NTT dan Ngada 2010-2015.....	38



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disingkat Kepala BP-Litbang adalah Kepala BP-Litbang Kabupaten Ngada.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngada Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2018 mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan Rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - d. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- (2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala BP-Litbang untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

Kepala BP-Litbang wajib menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

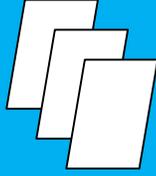
Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 16 Mei 2017



Diundang di Bajawa
pada tanggal 16 Mei 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 19



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGADA TAHUN 2018



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (UU. No. 25 tahun 2004). Lebih lanjut, penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD 2018

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga periodisasi dari RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021. Namun demikian penyusunan RKPD Tahun 2018 ini berjalan secara simultan dan mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Dengan spirit “**Membangun Ngada dari Desa**” penyusunan RKPD Tahun 2018 ini bertekad untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Ngada : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** serta mencapai tujuan dari ketujuh Misi Pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2016 - 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top-down* dan *bottom-up*, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan pencapaian visi dan misi RPJMD 2016 - 2021. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

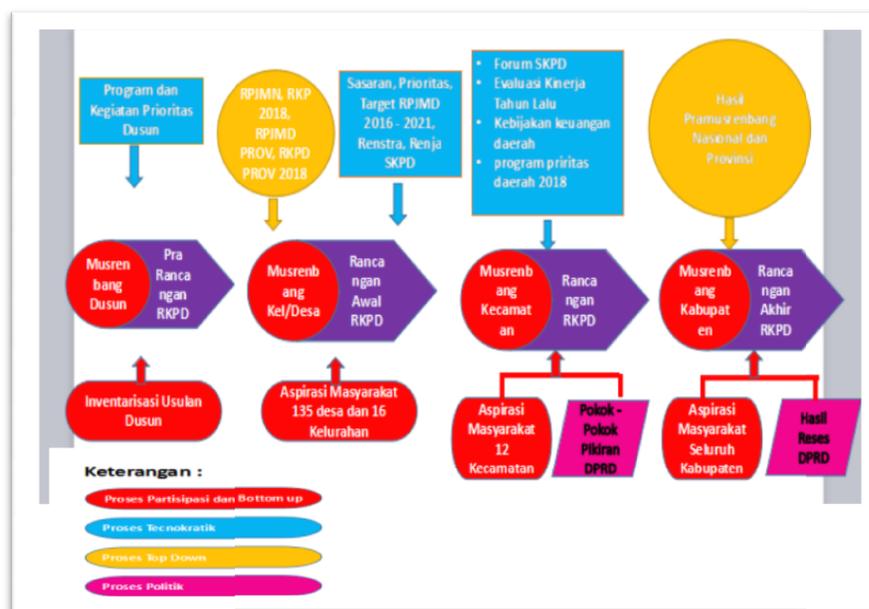
Pendekatan *top-down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang tercantum dalam arah kebijakan RPJMN 2015 - 2019 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014-2018. Pendekatan *bottom-up* dan partisipatif dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Kelurahan dan Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Hasil usulan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang tercantum dalam RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

1.2. Tahapan Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 ini dilakukan melalui tahapan: pelaksanaan Musrenbang Dusun, Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten; dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat dusun dan kelurahan/desa yang memuat hasil Musrenbang Dusun, arah kebijakan pembangunan dusun, dan program prioritas dusun serta kelurahan/desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Desa untuk menyusun prioritas usulan prioritas kegiatan dari 135 desa dan 16 kelurahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
- Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rancangan RKPD, masukan bagi pelaksanaan musrenbang kecamatan dan dasar penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) PD;
- Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RKPD, dan perbaikan rancangan awal Renja SKPD melalui pembahasan dalam forum PD. Perbaikan Rancangan RKPD ini selanjutnya menjadi masukan dalam Musrenbang Kabupaten.
- Penyusunan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten yang selanjutnya menjadi dasar perbaikan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sebagai pedoman penyusunan Kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2018, penyusunan RAPBD 2018 dan masukan bagi Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang RKP Nasional.

Alur dan tahapan Proses Penyusunan RKPD 2018 Kabupaten Ngada tergambar dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD 2018

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

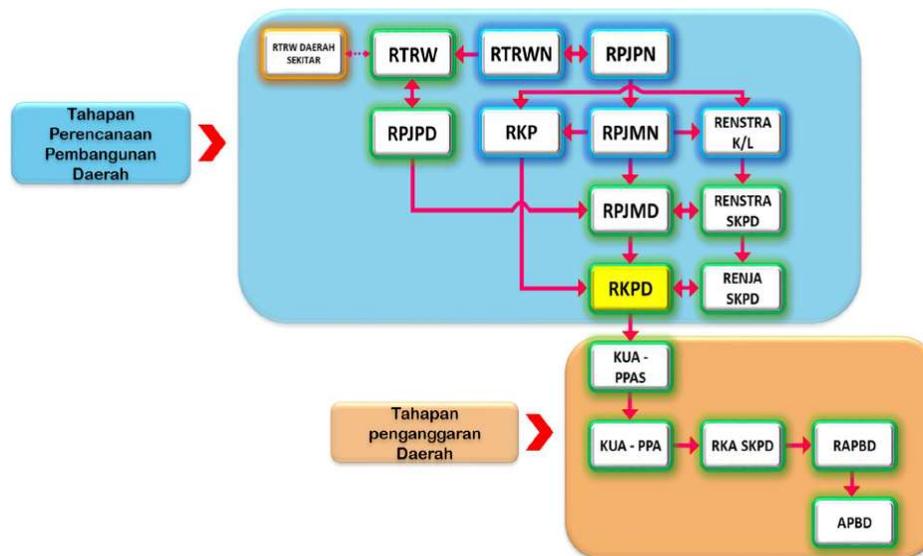
- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0011);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0016);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032;
 29. Peraturan Daerah KABUPATEN Ngada Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2021.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten wajib mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Oleh Karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018, wajib mengacu pada arah kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 maupun dalam RPJMN 2015 - 2019. Keterkaitan dimaksud bertujuan untuk menjamin keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Selain itu juga, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Ngada tahun 2018, harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya sehingga memiliki keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Dokumen –dokumen perencanaan lainnya terutama yang ada di Kabupaten Ngada sendiri. Dalam konteks Kabupaten Ngada, maka Dokumen RKPD merupakan Penjabaran operasional dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada tidak bisa berdiri sendiri tetapi merupakan penjabaran dari Dokumen RPJPD Kabupaten Ngada. Kedua Dokumen ini dari sisi waktu pelaksanaan merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah. Kedua Dokumen Jangka Panjang dan Jangka Menengah ini selanjutnya merupakan payung bagi seluruh dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Ngada seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Secara ringkas hubungan keterkaitan dokumen RKPD dengan Dokumen lainnya seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3 Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4.1 RKPD dan RKP 2018

Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 terutama menyangkut perwujudan:

- Cita 1* : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2* : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3* : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015 - 2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Ngada tahun 2018 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.4.2 RKPD dengan RKPD Provinsi NTT 2018

Pembangunan Kabupaten Nagda pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi Tahun 2018 yang merupakan upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan Kabupaten Ngada diarahkan untuk mendukung 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 strategi pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

1.4.3 RKPd dengan RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2021

Dokumen RKPd Kabupaten Ngada Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021 untuk mewujudkan visi: **TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**” RKPd Tahun 2018 juga menjabarkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

Misi 1 : Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, agrobisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan serta menjunjung tinggi penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi

Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Misi 6 : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, dan olahraga di masyarakat

Misi 7 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

Seluruh Program dan kegiatan dalam RKPd 2018 berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati terpilih.

1.4.4 RKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan KUA PPAS

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 memuat Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018 dan representasi juga dari Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2016 - 2021. Renja PD tahun 2018 memuat kebijakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD yang dipadukan dengan hasil Musrenbang dan Pokok – pokok pikiran DPRD. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Penyusunan KUA-PPAS Tahun digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

1.4.5 Pelaksanaan *E Planning, E Budgeting, dan E procurement*

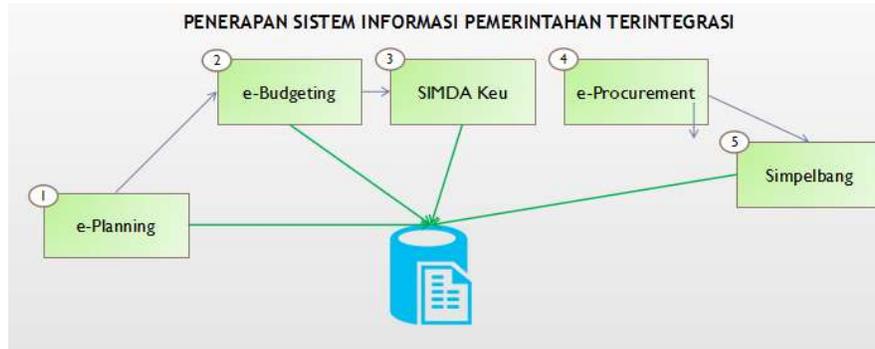
Pada tahun 2018 sistem perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa akan menggunakan system elektronik. Maksud dan tujuan penggunaan ini adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tercapainya *good governance*
2. Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan *e-Government* untuk pelayanan umum.
4. Mendukung sinergitas antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Melalui Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ngada berencana untuk mulai menggunakan aplikasi *e planning, e budgeting dan e procurement* pada tahun 2018. Untuk kepentingan tersebut Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Batang telah menandatangani *Mommandum of Understanding* (MOU) pada tanggal 04 Mei 2017 di Kabupaten Batang. Diharapkan melalui MOU ini kedua kabupaten dapat berbagi informasi tentang penggunaan aplikasi *e planning, e budgeting dan e procurement* dan Simplebang. Para Staf dari Kabupaten Batang akan menjadi instruktur bagi staf Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi tersebut. Diharapkan dengan kerjasama ini Kabupaten Ngada dapat memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan dapat disusun tepat waktu.
2. Terciptanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Efisiensi pengalokasian anggaran dalam belanja daerah.
4. Mengupayakan perencanaan, pelaksanaan program & kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Memastikan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa
6. Mendukung proses monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program & kegiatan / pembangunan.
7. Terciptanya akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan pembangunan.

Gambar 1. 4 Rancangan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Ngada



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ngada, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2014 dan 2015, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2018. Secara khusus disajikan pula prioritas terkait program unggulan daerah.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD.

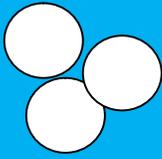
BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2018.

1.6 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada. RKPD memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur, terpadu,

berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kabupaten Ngada 2016 - 2021. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Ngada, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan seluruh Kepala Desa, Lurah dan Camat di Kabupaten Ngada dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ngada Tahun 2018;
- 3) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
- 4) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- 5) Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Ngada;
- 6) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

- 1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten**
- 2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Kegiatan RKPD**
- 3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ngada

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Ngada merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Wilayah Kabupaten Ngada tergambar sebagai berikut : luas daratan 1.777 Km² dan luas perairan 708,64 Km² dan panjang pantai 102,318 Km. Luas daratan terbesar ada di Kecamatan Riung yang mencapai 327,94 Km² atau 20,23% dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Ngada; dan luas daratan terkecil ada di wilayah Kecamatan Golewa Barat yakni seluas 74. 56 km² atau hanya 4.6 %. Sedangkan untuk perairan terbagi atas perairan sebelah Utara dan Selatan dengan rincian : luas perairan pantai Utara 381,58 Km² dengan panjang pantai 58,17 Km, sedangkan luas perairan pantai Selatan 327,06 Km² dengan panjang pantai 44,15 Km.

Secara administratif Kabupaten Ngada berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ngada

2) Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Ngada terletak pada $8^{\circ}20'24.28''$ LS - $8^{\circ}57'28.39''$ LS dan $120^{\circ}48'29.26''$ BT - $121^{\circ}11'8.57''$ BT.

b. Posisi Geosentric

Secara Geostrategic posisi Ngada yang berada di tengah – tengah Pulau Flores, serta terletak di antara dua lautan yakni Laut Sawu dan Laut Flores ini memungkinkan Ngada dilimpahi dengan potensi laut yang banyak yang memungkinkan untuk menjadi potensi pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi sedangkan dalam bidang transportasi Ngada menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan wilayah di Flores bagian Barat dengan Flores Bagian Timur, Pulau Timor, Pulau Sumba serta Wilayah lain di Indonesia.

c. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ngada pada umumnya berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi, dengan komposisi kemiringan didominasi oleh luas wilayah daratan dengan kemiringan diatas 40% seluas 97.628,01 ha(60,23 %) dari luas daratan Kabupaten Ngada. Kondisi perbukitan dan pegunungan ini berdampak pada wilayah rawan bencana alam seperti longsor terutama di wilayah Kabupaten Ngada bagian selatan. Sementara itu jika dilihat pada aspek ketinggian, wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 250 mdpl yaitu seluas 441,87 km² dan ketinggian 751-1000 mdpl seluas 408,76 km².

Keadaan topografi dengan wilayah ketinggian tersebut merupakan lahan untuk pengembangan dan pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Lebih lanjut kawasan pesisir Kabupaten Ngada terbagi atas dua yakni pesisir laut Utara dan pesisir laut Selatan. Kawasan pesisir bagian Utara yang dipengaruhi Laut Flores pada dasarnya mempunyai kemiringan pantai yang cukup landai. Bahkan sepanjang kawasan pesisir Utara ini banyak terdapat cekungan daratan yang menjorok kedalam membentuk teluk seperti di Riung (Tanjung 15 yang biasanya cukup efektif untuk pengembangan pelabuhan atau dermaga). Di kawasan pesisir Utara ini, ombak Laut Flores juga relative tidak begitu besar sepanjang musim. Sementara itu kawasan pesisir bagian Selatan, bentangan daratannya umumnya terbuka lebar menghadap Laut Sawu. Di daerah pegunungan atau yang berlereng terjal, umumnya ditutupi hutan tropis yang tidak begitu lebat dengan vegetasi yang bervariasi, sebagian termasuk dalam klasifikasi hutan suaka alam atau hutan produksi yang dapat dikonversikan. Masyarakat mempunyai kebiasaan membakar padang dalam mengolah lahan sebagai lahan perkebunan baru dan sebagai lahan untuk

peternakan mereka. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan.

d. **Geologi**

Sebagian besar wilayah Ngada ditempati oleh batuan vulkanik yang berumur Miosen Bawah hingga Miosen Atas yang berasosiasi dengan terbentuknya busur dalam Banda, sebagian besar terdiri dari lava andesit dan breksi dari Formasi Kiro dan sedikit batuan vulkanik muda. Satuan batuan di atas ditutupi oleh suatu paket batuan sedimen berumur Miosen Tengah yang terbentuk pada cekungan busur belakang, terdiri dari batupasir, batugamping, batuan vulkanik dan breksi atau tufa dari Formasi-Formasi Nangapanda dan Bari. Tanda-tanda adanya mineralisasi juga dijumpai pada satuan ini, yaitu pada batuan induk vulkanik klastik (contoh mineralisasi pada daerah Rawangkalo dan Wangka).

Pada Miosen Atas hingga Pliosen, batugamping tufaan, batugamping pasiran dari Formasi Waihekan terbentuk dan terakumulasi pada cekungan dimana batuan dasarnya (*basement*) yang telah mengalami perlipatan dan patahan. Batuan intrusi terbentuk secara lokal berupa diorit kuarsa menerobos batuan ini. Pada Kala Plio-Pleistosen diendapkan batuan-batuan vulkanik yang terdiri dari breksi, lava dan tufa, sedangkan hasil produk gunung api, seperti lahar, bom vulkanik dan lapilli diendapkan pada Holosen yang secara lokal menutupi lapisan yang lebih tua. Pengangkatan dan kegiatan gunung-api terus berlangsung hingga kini, yang ditandai dengan terbentuknya teras-teras pantai, aluvial dan endapan pantai.

e. **Hidrologi**

Kondisi hidrologi di Kabupaten Ngada dapat dijelaskan berupa air sungai dengan sungai-sungai yang bermuara baik di pantai Utara maupun pantai Selatan. Kabupaten Ngada juga merupakan hulu dari DAS Aesesa yang meliputi Sub Das Wulabhara dan Wae Woki. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Wae Woki, Wulabhara, Waemokel, Waewaru, Waesoa, Waebela, Waekoe dan Alomemak ini banyak yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang pengelolaannya berupa leding, pompa, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi dan air kemasan.

Selain itu, potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Ngada cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang keberadaannya terus diupayakan konservasi dan perlindungan antara lain dengan menetapkan daerah imbuhan air bawah tanah yang terletak pada ketinggian di atas

200 mdpl sebagai kawasan lindung air bawah tanah serta agar dipergunakan sehemat mungkin dan dilindungi dari dampak pencemaran lingkungan.

Kondisi hidrologis juga menggambarkan bahwa pada umumnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum memadai, sehingga proses pengikisan terus berlangsung. Akumulasi dari proses pengikisan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam lahan pertanian serta permukiman. Oleh karena itu pengelolaan dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu menjadi perhatian pemerintah.

f. **Klimatologi**

Kabupaten Ngada seperti halnya kabupaten-kabupaten di wilayah Indonesia pada umumnya hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Maret sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Oktober - Maret arus angin yang datang dari benua Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan. Namun jika dihitung secara riil, ada 5 bulan basah dari bulan Oktober sampai Februari dan 7 bulan kering yaitu bulan Maret sampai dengan September. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Ngada pada tahun 2015 adalah 1.326 mm/thn dengan rata-rata hari hujan adalah 129 hari/tahun.

Kondisi iklim yang sejuk dan ketersediaan hujan yang relatif besar menjadi potensi karena sangat cocok bagi pengembangan lahan pertanian dan peternakan. Akan tetapi, dalam perkembangan akhir – akhir ini sebagai akibat dari peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak, telah terjadi anomali iklim yang tidak menentu dan berdampak khususnya pembangunan disektor pertanian dan perkebunan.

g. **Jenis dan Kemampuan Lahan**

Jenis dan kemampuan lahan merupakan hasil suatu proses alamiah yang terjadi akibat adanya perbedaan iklim, cuaca, geologi dan lain-lain. Unsur jenis dan kemampuan lahan terbagi atas 1). jenis tanah, 2). kemiringan tanah, 3). tekstur tanah, 4). drainase tanah dan 5). tingkat erosi tanah. Wilayah Kabupaten Ngada pada umumnya terdiri dari 3 jenis tanah yakni Grumosol, Latosol dan Mediteran. Jika dihitung, tanah mediteran mempunyai luasan terbesar sekitar 69.549 ha pada seluruh wilayah kabupaten. Tanah ini mempunyai lapisan solum yang tebal, kadar unsur basa yang dikandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang dan sifat-sifat fisik dan kimianya baik sehingga nilai

produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

Selain jenis tanah, factor yang mempengaruhi kemampuan tanah adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah halusnya tanah yang ditentukan/dinilai berdasarkan perbandingan fraksi-fraksi pasir, debu dan liat. Berdasarkan kandungan masing-masing fraksi tersebut dapat dibuat klasifikasi tekstur tanah yang akan berpengaruh terhadap pengolahan dan pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya lapisan tanah tersebut meloloskan air.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kemampuan tanah adalah kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif tanah merupakan suatu ukuran media tanah yang dapat ditanami/ditembus oleh suatu tanaman. Klasifikasi kedalaman efektif tanah tersebut dangkal (< 30 cm), sedang (30 – 60 cm), agak dalam (60-90 cm) dan dalam (> 90 cm).

Kondisi yang digambarkan dari masing-masing jenis dan kemampuan lahan tersebut yang terdapat di wilayah Kabupaten Ngada akan menjadi bahan (masukan) bagi kepentingan analisis potensi suatu lahan yang bisa atau tidak bisa dikembangkan yaitu analisis kesesuaian lahan terutama untuk lahan budidaya. Unsur-unsur tadi sangat berpengaruh terhadap jenis kesesuaian lahan yang dihasilkan seperti untuk tanaman pertanian lahan basah, tanaman pertanian lahan kering, tanaman perkebunan/tanaman tahunan, kehutanan (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas/konversi, hutan lindung) dan kesesuaian untuk jenis lahan budidaya lainnya.

h. Penggunaan Lahan

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Adapun kawasan lindung yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada meliputi :

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam;

- kawasan lindung geologi; dan
- kawasan lindung lainnya.

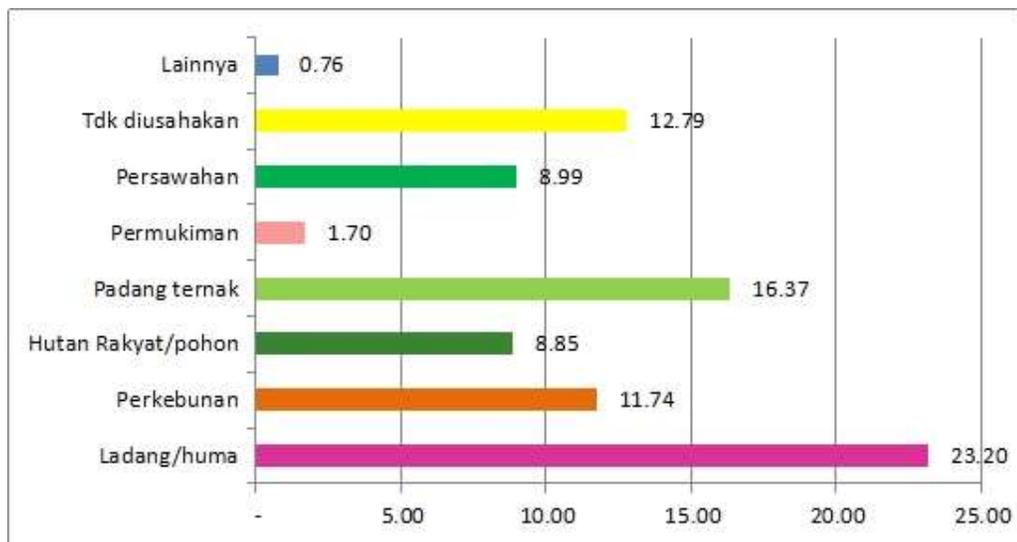
a) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir. Kawasan budidaya di Kabupaten Ngada terdiri dari:

- kawasan peruntukkan hutan produksi;
- kawasan peruntukkan pertanian;
- kawasan peruntukkan perikanan;
- kawasan peruntukkan pertambangan;
- kawasan peruntukkan industri;
- kawasan peruntukkan pariwisata;
- kawasan peruntukkan permukiman;
- kawasan peruntukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- kawasan peruntukkan lainnya

Secara lebih rinci persentase pemanfaatan kawasan budidaya tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.1 Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kabupaten Ngada



Sumber : RTRW Kabupaten Ngada 2012 – 2032

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ngada didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ngada, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada 2012 – 2032, dengan kebijakan utama pembentukan Rencana struktur ruang wilayah meliputi :

- a. sistem pusat-pusat kegiatan daerah;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pusat kegiatan daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- (1) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP); meliputi kawasan Perkotaan Bajawa yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni perdagangan dan jasa, perkantoran, administrasi pemerintahan, dengan fungsi pendukung pariwisata, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, agrowisata, agroindustri, dan wisata budaya.
- (2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); PPK dibagi dalam beberapa wilayah sebagai berikut:
 - a. PPK Soa dengan kawasan pendukung Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni transportasi udara, pertanian, dengan fungsi pendukung perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, agrowisata, agroindustri dan wisata budaya;
 - b. PPK Golewa dengan kawasan pendukung Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kota Bajawa yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni agropolitan, transportasi laut dengan fungsi pendukung industri, perdagangan dan jasa, agrowisata, wisata budaya, agrindustri, perikanan dan pendidikan;
 - c. PPK Aimere dengan kawasan pendukung Kecamatan Inerie yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni transportasi laut, perikanan, pertanian, kegiatan pendukung agrowisata, agroindustri, pusat produksi pertanian, peternakan dan wisata budaya; PPK Riung dengan kawasan pendukung Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze yang berfungsi sebagai kegiatan utama pariwisata, perikanan, kegiatan pendukung perhotelan, perdagangan dan jasa pemasaran industri kerajinan, agrowisata dan peternakan.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), berfungsi sebagai kegiatan pengembangan pertanian, terdiri atas :

- 1) Kecamatan Aimere : Aimere Timur, Foa, dan Keligejo;
- 2) Kecamatan Golewa : Mataloko, Malanua, dan Were I;
- 3) Kecamatan Soa : Mengeruda, Seso, dan Tarawaja;
- 4) Kecamatan Riung : Wangka, Lengkosambi, dan Nangamese;
- 5) Kecamatan Riung Barat : Wolomeze dan Ria;
- 6) Kecamatan Jerebuu : Naruwolo, Tiworiwu dan Nenowea;
- 7) Kecamatan Wolomeze : Nginamanu, dan Nginamanu Barat;
- 8) Kecamatan Bajawa Utara : Inelika, Waewea, dan Inegenaa;
- 9) Kecamatan Bajawa: Jawameze, Susu, Wawowae, dan Bajawa;
- 10) Kecamatan Golewa Selatan: Kezewea, Takatunga, dan Were II;
- 11) Kecamatan Golewa Barat: Rakalaba, Mangulewa, dan Sobo I;
- 12) Kecamatan Inerie: Waebela, Sebowuli, dan Legeriwu.

Sistem prasarana utama dan system prasarana lainnya dimaksudkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rencana pusat kegiatan daerah. Rencana Pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Ngada dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi terbatas memiliki luasan kurang lebih 7.114 Ha terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Riung Barat. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 23.672 Ha terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa, Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Riung.
Kawasan Pertanian	<p>Kawasan budidaya untuk lahan basah terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Riung, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Soa.</p> <p>Kawasan budidaya lahan kering terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Inerie, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Soa</p> <p>Kawasan budidaya perkebunan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kawasan perkebunan kopi terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Bajawa;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kawasan perkebunan vanili terdapat Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Soa, Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Bajawa; ✓ kawasan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Wolomeze; ✓ kawasan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa utara, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, dan Kecamatan Wolomeze; ✓ kawasan perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Wolomeze; ✓ kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Wolomeze; ✓ kawasan perkebunan pala terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Wolomeze; ✓ kawasan perkebunan kemiri sunan terdapat di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Aimere.
Kawasan Pernakan	<p>Pernakan besar dengan luas kurang lebih 6.327,77 Ha terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Riung Barat.</p> <hr/> <p>Pernakan kecil terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Soa, dan Wolomeze, dengan sistem ternak dipelihara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di kebun</p>
Kawasan Perikanan	<p>Kawasan peruntukkan perikanan darat terdapat di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Jerebuu.</p> <hr/> <p>Kawasan peruntukkan perikanan laut terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Riung.</p> <hr/> <p>Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Golewa Selatan.</p>
Kawasan Pertambangan	<p>Kawasan peruntukkan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Soa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze.</p> <hr/> <p>Kawasan peruntukkan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Golewa.</p> <hr/> <p>Kawasan peruntukkan air tanah di kawasan pertambangan terdapat di Kecamatan Riung dan Kecamatan Bajawa.</p>

Kawasan Industri	<p>Kawasan peruntukkan industri kecil/rumah tangga meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ industri pengolahan tanaman Padi di Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa; ○ industri pengolahan Pisang di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa; ○ industri pengolahan Jagung di Kecamatan Bajawa utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Golewa Barat; ○ industri pengolahan Kelapa di Kecamatan Riung, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie; ○ industri pengolahan Kopi di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat; ○ industri pengolahan Jambu mete di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bajawa Utara; ○ industri pengolahan Kemiri di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Golewa; ○ industri tenun ikat di Langa Kecamatan Bajawa, Bena di Kecamatan Jerebuu, Waebela, Warupele I, Warupele II di Kecamatan Inerie, Tadho, Benteng Tengah, Sambinasi, Taenterong di Kecamatan Riung, dan Lanamai Ria I di Kecamatan Riung Barat.
Kawasan Permukiman Pedesaan	<p>Kawasan peruntukkan permukiman pedesaan terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Inerie.</p>
Kawasan Pariwisata	<p>Kawasan peruntukkan pariwisata alam meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan pariwisata Riung di Kecamatan Riung; ▪ kawasan pemandian air panas Mengeruda di Kecamatan Soa; ▪ kawasan air terjun Ogi di Kecamatan Bajawa; ▪ kawasan Gunung Inerie di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Jerebuu, kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie; ▪ kawasan air terjun Wae Pua di Kecamatan Golewa Selatan; ▪ kawasan air terjun Wae Roa di Kecamatan Jerebuu; ▪ kawasan pantai pasir putih/Ena Bhara dan goa/Lialoga Waebela di Kecamatan Inerie; ▪ kawasan danau vulkanik Wawomuda di Kecamatan Bajawa; ▪ kawasan wisata Lekolodo di Kecamatan Bajawa; ▪ kawasan air terjun Betho Padhi di Kecamatan Golewa Barat; ▪ kawasan air panas Gou di Kecamatan Bajawa Utara; ▪ kawasan pasir putih/Ena Bhara di Kecamatan Golewa Selatan; ▪ kawasan air panas Nage di Kecamatan Jerebuu; ▪ kawasan pantai Ena Lewa di Kecamatan Aimere; ▪ kawasan pariwisata Benteng Tawa di Kecamatan Riung Barat; ▪ kawasan pariwisata Wolobobo di Kecamatan Bajawa; ▪ kawasan pariwisata Sambinasi di Kecamatan Riung; dan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan air panas Ae putih boba di Kecamatan Golewa Selatan <p>Kawasan peruntukkan pariwisata budaya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan Kampung adat Bena di Kecamatan Jerebuu; ▪ kawasan Kampung adat Bela di di Kecamatan Bajawa; ▪ kawasan Kampung adat Nage di Kecamatan Jerebuu; ▪ kawasan Kampung adat Gurusina di Kecamatan Jerebuu; ▪ kawasan Kampung adat Watu di Kecamatan Inerie; ▪ kawasan Kampung adat Wogo di Kecamatan Golewa; ▪ kawasan Kampung adat Tobe desa Foa di Kecamatan Aimere; ▪ kawasan kampung adat Tololela di Kecamatan Inerie; ▪ kawasan kampung adat Maghilewa di Kecamatan Inerie; ▪ kawasan kampung Leke di Kecamatan Inerie; ▪ kawasan Matamenge di Kecamatan Soa; ▪ kawasan kampung Mangulewa di Kecamatan Golewa Barat; ▪ kawasan kampung Libunio di Kecamatan Soa; ▪ kawasan kampung Luba di Kecamatan Jerebuu; dan ▪ kawasan kampung Be'a di Kecamatan Golewa Barat; ▪ kawasan Kampung adat Belaraghi di Kecamatan Aimere. <p>Kawasan peruntukkan pariwisata buatan yaitu kawasan Sauna Alam Bethopadhi di Kecamatan Golewa Barat</p>
Kawasan Peruntukan lainnya	<p>Kawasan peruntukkan lainnya adalah kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan negara. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kompleks markas Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Bajawa; 2. kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Ngada di Kecamatan Bajawa; dan 3. kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan di wilayah Daerah.

Sumber : RTRW Kabupaten Ngada 2012 - 2032

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Alam

Kawasan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir, gelombang tsunami, angin puting beliung dan kebakaran sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Bencana yang terdapat di Kabupaten Ngada terbagi atas dua yakni bencana alam dan bencana akibat kesalahan manusia. Bencana alam longsor, banjir dan angin kencang merupakan

bencana yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2012 sampai 2016. Bencana longsor yang terjadi pada umumnya diakibatkan oleh hujan yang berlangsung secara terus menerus sehingga mengakibatkan tanah labil, selain itu faktor yang paling mempengaruhi adalah tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Ngada yang relatif curam sehingga berpotensi longsor. Seperti halnya longsor, banjir terjadi karena hujan yang terus menerus dan sangat lama. Angin kencang juga menyebabkan kerusakan yang cukup significant dan berpotensi terjadi pada seluruh wilayah Kabupaten Ngada. Sementara itu bencana lain yang timbul akibat kesalahan manusia terdiri atas dua yakni kecelakaan lalu lintas dan kebakaran baik kebakaran rumah penduduk maupun kebakaran kampung dan pondok masyarakat.

2.1.1.4 Demografi Wilayah

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan sehingga tidak dapat dilepaskan peranannya dalam pembangunan daerah. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk dapat juga bertindak sebagai objek, dimana akan menjadi target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu analisis kependudukan sangat dibutuhkan agar efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan dapat berhasil sebagaimana diharapkan.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada keadaan Desember 2016 berjumlah 169,070 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 104 jiwa/km. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Bajawa dengan proporsi sebesar 24,5%, menyusul Golewa 11,5%. Sedangkan kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Wolomeze sebesar 3,9% dari total penduduk Ngada. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki; dengan prosentase 51% perempuan dan 49% laki-laki.

Tabel 2. memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Ngada selama kurun waktu 1980 - 2015. Informasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah absolut penduduk Kabupaten Ngada pada periode tersebut. Pada tahun 1980 - 2010, jumlah penduduk Kabupaten Ngada bertambah dari 84.728 orang menjadi 142.393 orang, kemudian pada periode 2010 - 2015 jumlah penduduk bertambah menjadi 154.693

orang. Sementara itu, jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya, pada periode 2010 - 2015 terjadi penurunan setiap tahunnya. Dalam dua tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,43 menjadi 0,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk tersebut, pada akhirnya juga berkorelasi dengan persoalan penyediaan pangan, energi, fasilitas permukiman yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan bahkan subsidi BBM. Selain itu, kemampuan bumi yang terbatas juga tidak mampu secara cepat menyuplai kebutuhan manusia yang bertambah dengan cepat. Faktor alam yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah tanah, air, dan ruang. Akibatnya, selain terjadi penurunan daya dukung lingkungan, kesejahteraan penduduk pun mengalami penurunan. Ketidakmampuan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Ngada 1980 -2015

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
1980 ¹⁾	84 728	...
1990 ¹⁾	99 281	1,60
2000 ¹⁾	115 390	1,57
2010 ¹⁾	142 393	2,14
2011 ²⁾	145 210	2,11
2012 ³⁾	148 410	2,12
2013 ³⁾	151 475	2,12
2014 ³⁾	152 776	1,43
2015 ³⁾	154 693	0,91

Sumber: Indikator Kesra Kabupaten Ngada, 2016

b. Distribusi dan Komposisi Penduduk

Seiring dengan terjadinya penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian, kondisi demografis penduduk Kabupaten Ngada juga mengalami perubahan. Dilihat dari komposisi umur, persentase penduduk berumur kurang dari 15 tahun (0 - 14 tahun) Kabupaten Ngada turun dari 36,32 persen pada tahun 2014 menjadi 35,62 persen pada tahun. Pada penduduk usia 65 tahun ke atas juga mengalami penurunan yaitu dari 5,94 persen menjadi 5,63 persen dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan

penduduk yang tergolong usia produktif (15 - 64 tahun) mengalami peningkatan dari 57,74 persen pada tahun 2014 menjadi 58,75 persen pada tahun 2015. Peningkatan proporsi penduduk usia kerja tersebut akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia.

Tabel 2.3
Distribusi dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ngada

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0 - 14	15 - 64	65+
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	38,02	56,17	5,81
2014	36,32	57,74	5,94
2015	35,62	58,75	5,63

Sumber : Indikator Kesra Kabupaten Ngada, 2016

Namun tantangan yang dihadapi di era globalisasi saat ini adalah telah terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologi dan informasi, yang mampu berkomunikasi, serta mempunyai daya saing tinggi. Tentu semuanya itu berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi dengan keterampilan yang memadai. Sementara itu, bila dilihat dari umur median penduduk, Kabupaten Ngada tergolong dalam kelompok umur penduduk "intermediate", dimana umur median penduduknya adalah 24,31 tahun.

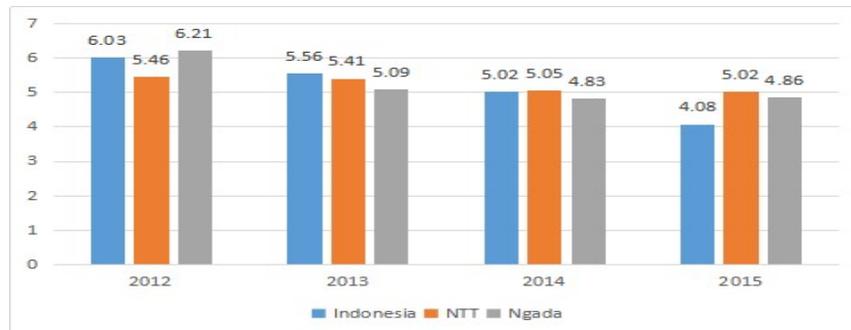
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Ngada dalam kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 4-5%. Pergerakan ekonomi Ngada cenderung melambat. Perlambatan tersebut terjadi juga pada level Provinsi dan Nasional. Pada tingkat regional NTT, Kabupaten Ngada menyumbang 3,5% bagi ekonomi NTT, diatas sumbangan Nagekeo dan Manggarai Timur, namun masih dibawah Kabupaten Ende yang berkontribusi sebesar 6%. Dari aspek rata-rata pertumbuhan, Ngada masih unggul atas Kabupaten Ende, Manggarai Timur maupun Nagekeo. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara regional kewilayahan, Ngada memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif, di Kawasan Flores bagian Tengah.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Ngada dan Perbandingannya
dengan NTT dan Nasional 2012-2015 (%)



Sumber: BPS, 2016

Secara absolut, PDRB Ngada mengalami peningkatan dari 1,72 triliun tahun 2013, menjadi 1,89 triliun ditahun 2015. Perekonomian Kabupaten Ngada masih didominasi sektor primer dengan kecenderungan terjadi pergeseran dari sektor primer kesektor tersier. Sektor sekunder belum cukup berkembang, sehingga belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja formal yang beralih dari sektor primer. Padahal dari data pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektoral, serta elastisitas terhadap kesempatan kerja, terlihat bahwa sub-unsur sektor sekunder sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan kesempatan kerja secara konstan kedepan.

Tabel 2.4
PDRB Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013-2015

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	628,730	652,997	677,360
B	Pertambangan dan Penggalian	27,515	28,720	30,109
C	Industri Pengolahan	23,954	24,994	26,003
D	Pengadaan Listrik & Gas	513	569	618
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,223	2,269	2,325
F	Konstruksi	225,698	235,615	245,854
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	142,317	150,182	159,540
H	Transportasi dan Pergudangan	78,403	82,611	86,280
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,479	7,938	8,493
J	Informasi dan Komunikasi	91,201	97,281	104,407

K	Jasa Keuangan	93,963	101,875	108,923
L	Real Estate	34,184	35,506	37,065
M,N	Jasa Perusahaan	908	935	964
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	305,106	321,510	340,973
P	Jasa Pendidikan	25,701	27,363	28,246
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,465	25,137	25,726
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,937	13,288	13,621
Total		1,725,296	1,808,791	1,896,507

Sumber: Ngada Dalam Angka, 2016

Peningkatan nilai absolut dan relatif sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan mulai adanya geliat ekonomi pada sektor ini, namun perlu tetap didorong agar sektor ini yang merupakan sektor penerima tenaga kerja pergeseran sektor primer tetap memiliki keberlanjutan dan ketahanan sehingga semakin berkembang dari usaha-usaha non formal ke sektor formal dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah. Gambaran pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Ngada dapat dilihat pada tabel 2.5

Secara absolut PDRB mengalami peningkatan, namun secara relatif hampir semua sektor mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya. Sektor yang cenderung mengalami pertumbuhan dalam kurun 3 tahun terakhir adalah Pengadaan Listrik dan Gas (E), serta Transportasi dan pergudangan (H), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Lapangan Usaha 2013-2015 Atas Dasar harga konstan

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.73	3.86	3.73
B	Pertambangan dan Penggalian	4.81	4.38	4.84
C	Industri Pengolahan	3.87	4.34	4.04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.78	10.81	8.84
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.93	2.09	2.46
F	Konstruksi	3.42	4.39	4.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.02	5.53	6.28
H	Transportasi dan Pergudangan	4.43	5.11	4.68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.18	6.15	7.00
J	Informasi dan Komunikasi	9.69	6.67	7.33
K	Jasa Keuangan	10.49	8.42	6.93
L	Real Estate	4.80	3.87	4.39
M,N	Jasa Perusahaan	4.10	3.03	3.16

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.76	5.38	6.05
P	Jasa Pendidikan	8.52	6.47	3.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.17	2.75	2.34
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.65	2.71	2.51
	TOTAL	5.09	4.83	4.86

Sumber: Indikator Ekonomi BPS, 2016

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada secara umum tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Perekonomian Ngada pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,21 persen, kemudian perekonomian Kabupaten Ngada pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu masing - masing sebesar 5,14 persen dan 4,80 persen. Pada tahun 2014 kategori Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 10,79 persen dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan kategori lainnya. Diikuti kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang merupakan tertinggi kedua yaitu sebesar 8,42 persen. Pertumbuhan sektor ini mengalami penurunan bila dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 10,49 persen dan menempati posisi pertumbuhan tertinggi.

Selain kedua kategori tersebut, kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup besar pada tahun 2014 adalah kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,67 persen. Pertumbuhan kategori ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,49 persen pada tahun 2013. Kategori lain yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi pada tahun 2014 adalah Jasa Pendidikan. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh sebesar 3,30 persen, kemudian mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 8,52 persen pada tahun 2013, selanjutnya pertumbuhan sektor ini mencapai 6,47 persen pada tahun 2014 dan menempati posisi tertinggi keempat.

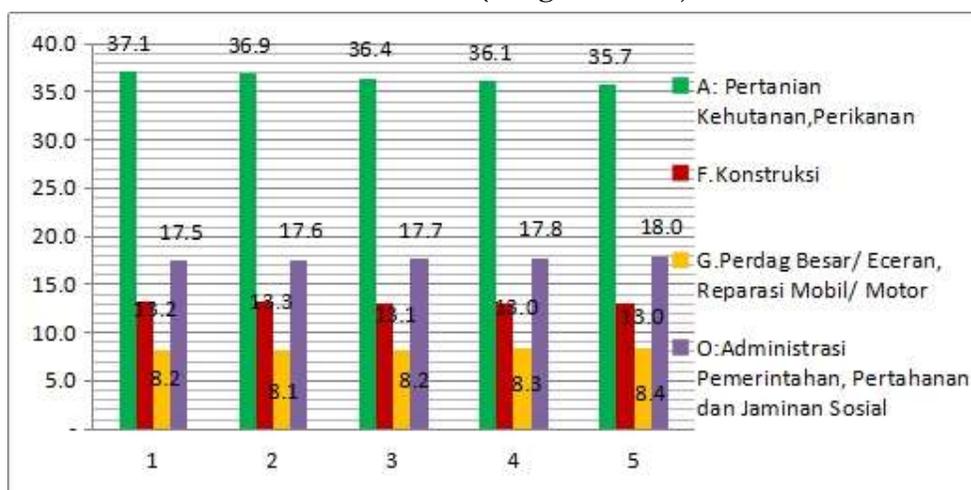
B. Struktur Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Ngada, masih disokong oleh 4 sektor yang berkontribusi dominan yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A); Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (O), sektor Konstruksi (F) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor (G). Sektor pertanian pergeserannya cenderung menurun, sedangkan ketiga sektor utama lainnya cenderung meningkat. Dari tampilan data sebagaimana grafik 2.4, terlihat bahwa peran sektor pertanian masih sangat menonjol dalam struktur ekonomi Ngada. Padahal dari aspek nilai tambah, sektor ini kurang terlalu memberi dorongan yang cukup bagi

pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena produksi sektor primer masih berupa bahan mentah atau gelondongan, dengan nilai produksi yang terbatas.

Grafik 2.3

**Kecenderung Sektor Kontribusi terbesar Ekonomi Kabupaten Ngada
2011-2015 (Harga Konstan)**



Sumber: Indikator Ekonomi BPS, 2015

Sektor sekunder, diwakili oleh sektor konstruksi yang kontribusinya paling dominan dengan menyumbang rata-rata 13% bagi perekonomian Ngada, dibanding empat sektor sekunder lainnya yakni Pertambangan, Industri Pengolahan, Listrik dan gas serta Pengadaan air dan Pengolahan limbah yang belum terlalu menonjol.

Tabel 2.6

**Prosentase Kontribusi Ekonomi Kab.Ngada 2011-2015 menurut lapangan usaha
Atas Dasar Harga konstan**

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	37.1	36.9	36.4	36.10	35.72
B	Pertambangan dan Penggalian	1.6	1.6	1.6	1.59	1.59
C	Industri Pengolahan	1.4	1.4	1.4	1.38	1.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.0	0.0	0.0	0.03	0.03
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.1	0.1	0.1	0.13	0.12
F	Konstruksi	13.2	13.3	13.1	13.03	12.96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.2	8.1	8.2	8.30	8.41
H	Transportasi dan Pergudangan	4.7	4.6	4.5	4.57	4.55

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.4	0.4	0.4	0.44	0.45
J	Informasi dan Komunikasi	5.0	5.1	5.3	5.38	5.51
K	Jasa Keuangan	5.0	5.2	5.4	5.63	5.74
L	Real Estat	2.0	2.0	2.0	1.96	1.95
M,N	Jasa Perusahaan	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	17.5	17.6	17.7	17.77	17.98
P	Jasa Pendidikan	1.5	1.4	1.5	1.51	1.49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.5	1.5	1.4	1.39	1.36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.8	0.8	0.7	0.73	0.72

Sumber: Ngada Dalam Angka BPS, 2016

Sementara itu pada sektor tersier, tetap didominasi jasa administrasi pemerintah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Ngada. Sektor swasta belum berperan secara maksimal. Oleh karena itu ke depan sangat diharapkan agar setiap belanja pemerintah, harus dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan sektor sekunder dan sektor-sektor swasta lainnya.

C. Inflasi

Inflasi umum kota Bajawa dalam kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat. Peningkatan tersebut terutama disumbangkan oleh kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta transportasi, komunikasi dan Jasa keuangan. Inflasi yang moderat, dibawah 10%, secara ekonomi sebenarnya bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi; karena bisa mendorong semangat pengusaha maupun petani untuk meningkatkan produksinya. Dengan kenaikan harga, para petani dan produsen mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu peningkatan produksi dapat membuka tambahan lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif bila melebihi 10%. Inflasi Ngada sebesar 9,7% cenderung lebih tinggi dari NTT dengan tingkat inflasi 8,31% dan Indonesia 8,32%.

Tabel 2.7

Perkembangan Inflasi Kota Bajawa 2011-2015

No	Kelompok	2011	2012	2013	2014	2015
	Umum	6.9	6.5	5.0	7.3	9.7
1	Bahan Makanan	10.9	10.3	7.9	11.7	13.0
2	Makanan jadi, Minuman, Rokok & tembakau	4.9	4.5	2.5	4.1	10.0
3	Perumahan, Air, listrik, Gas & Bahan Bakar	3.4	6.2	3.5	2.8	4.2
4	Sandang	12.5	6.2	-1.44	8.4	5.7
5	Kesehatan	4.5	0.3	1.0	1.8	0.7
6	Pendidikan, rekreasi & OR	6.7	0.6	15.4	1.2	2.4
7	Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	1.7	-0.95	2.2	7.9	16.6

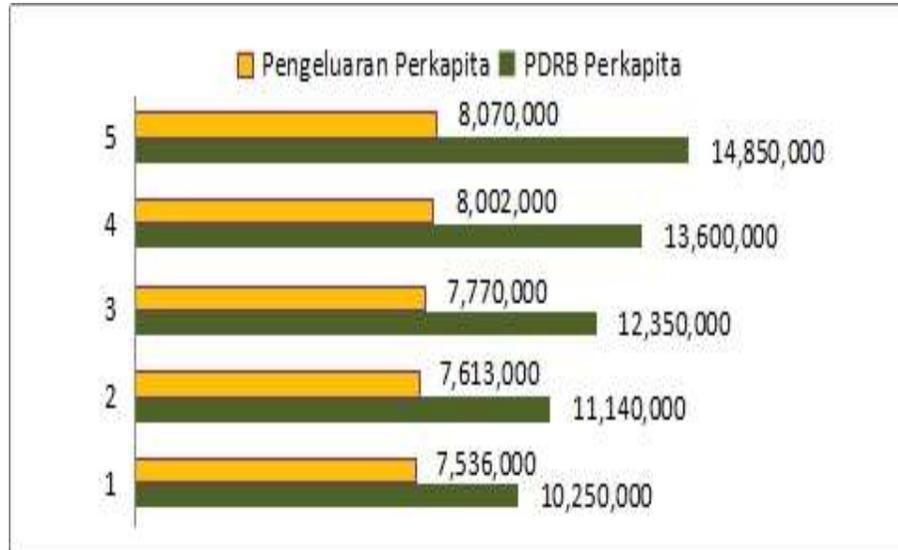
Sumber : Indikator Ekonomi BPS, 2016

Untuk kondisi Ngada, meskipun belum mencapai 10%, namun kecenderungan tersebut sudah mulai nampak pada 3 unsur yang tumbuh diatas 10%, sebagaimana tabel 2.13. Ketiga unsur tersebut merupakan kelompok utama dalam kehidupan masyarakat, sehingga bisa mendorong inflasi pada kelompok lainnya. Dampaknya akan mengurangi pendapatan riil masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga akan menambah jumlah penduduk miskin karena pendapatan rata-ratanya dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan produksi untuk menjamin ketersediaan komoditi tersebut, serta memperbaiki tata niaga dan akses untuk menjamin pasokan yang kontinyu.

D. PDRB Perkapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada berdasarkan harga berlaku cenderung meningkat dari 2010 sampai 2014. Jika dibandingkan dengan kondisi NTT pada tahun 2014 yang berjumlah Rp.13,6 juta, maka PDRB perkapita Ngada masih lebih tinggi. PDRB Perkapita memang tidak secara nyata menunjukkan kapasitas ekonomi suatu daerah; karena bila penduduknya banyak maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil. Bila dibandingkan dengan penduduk produktif yang bekerja, untuk menunjukkan tingkat produktivitas penduduk Ngada, maka terlihat bahwa 1 penduduk yang bekerja pada tahun 2014 menghasilkan Rp.24,4 juta, meningkat dibanding tahun 2010 dengan perbandingan 1 tenaga kerja menghasilkan Rp.22,1 juta. Terlihat pada grafik 2.4 berikut

Grafik 2.4
PDRB Perkapita (Harga Berlaku) dan Rata-Rata Pengeluaran
Perkapita Tahun 2011-2015



Sumber :PDRB Menurut lapangan Usaha BPS, 2016

E. Angka Kemiskinan

Terdapat beberapa tipe kemiskinan yakni: a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengukur besar kecilnya kemiskinan di Kabupaten Ngada digunakan indikator Garis Kemiskinan.

Tabel 2.8

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ngada

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Jmlh Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
2010	185.050	17.2	12,05
2011	206.842	16.6	11,36
2012	226.815	16.8	11,35
2013	248.760	16.9	11,19
2014	263.194	16.5	10,76
2015	271.299	19.9	12.81

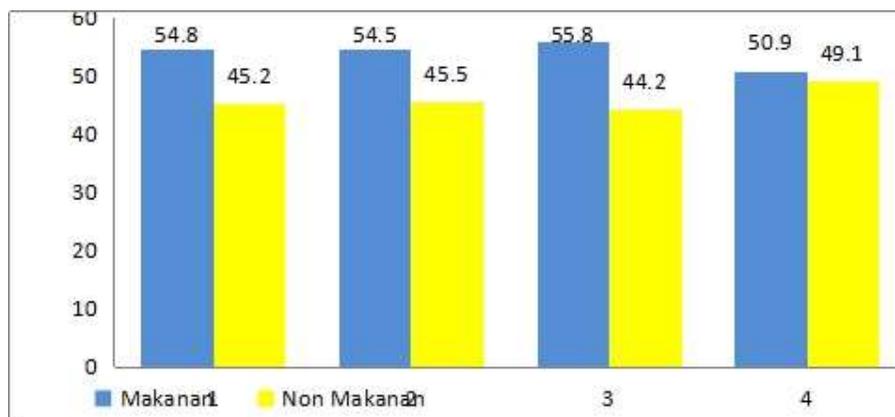
Sumber : Indikator Kesra BPS, 2016

Dari tampilan data kemiskinan Ngada, terlihat bahwa garis kemiskinan Ngada cenderung meningkat; salah satu faktornya karena adanya inflasi, sehingga mempengaruhi nilai uang untuk kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori. Jumlah absolut maupun relatif penduduk miskin terus menurun. Kondisi kemiskinan Ngada masih dibawah rata-rata NTT yang prosentase penduduk miskin tahun 2015 sebesar 22.58 % , namun lebih tinggi dari Indonesia yang berjumlah 11.13 %.

Penurunan angka kemiskinan ini bisa juga dilihat dari pola pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Sebaliknya bila pengeluaran untuk non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, semakin tinggi, maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Grafik 2. 5

Prosentase Pola Pengeluaran Perkapita Perbulan Kab. Ngada untuk makanan dan Non Makanan 2012-2015



Sumber: Indikator Kesra BPS, 2016

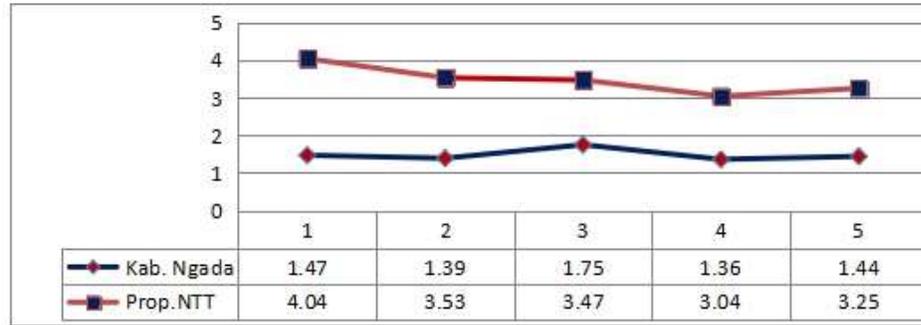
Dari tampilan data tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan prosentase pengeluaran untuk bahan makanan, sebaliknya untuk non makanan prosentasenya cenderung meningkat. Hal ini berarti standar kehidupan masyarakat Ngada semakin baik, walaupun masih belum mencapai standar yang diinginkan. Batasan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat ini adalah jika pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan berada di bawah 50 persen.

Selain garis kemiskinan, terdapat indikator yang perlu juga dilihat yakni kedalaman kemiskinan; yang menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan). Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan tersebut di suatu wilayah mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di wilayah tersebut

F. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Semakin besar nilai kedua indeks ini di sebuah wilayah mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di wilayah tersebut. Pada grafik 2.6 terlihat di Kabupaten Ngada, pada tahun 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,36. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar 1,44. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut di Kabupaten Ngada terjadi peningkatan besarnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Dengan kata lain, pengeluaran kaum miskin di Kabupaten Ngada, cenderung menjauh dari garis kemiskinan.

Grafik 2. 6
Indeks Kedalaman Kemiskinan NTT dan Ngada 2010-2015



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, Desember 2016

Indeks kedalaman kemiskinan Ngada cenderung melandai yakni dari 1,47 tahun 2010, melandai menjadi 1,44 di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan NTT, maka Indeks kedalaman NTT lebih tinggi. Artinya tingkat kesejahteraan Penduduk Ngada lebih baik dari rata-rata penduduk NTT.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dijadikan alat ukur dalam pemantauan pencapaian pembangunan manusia, terutama dalam mengukur kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. Karena itu, IPM dijadikan standar keberhasilan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan memadai serta dijadikan tolok ukur kemajuan pembangunan manusia.

Selama kurun waktu 2010 – 2016 perkembangan IPM Kabupaten Ngada cenderung meningkat, baik yang menggunakan metode lama maupun metode baru. Untuk metode baru, terlihat dari tahun 2010 – 2013 nilai IPM nya lebih kecil dari metode yang lama. Untuk metode yang baru nilai IPM dikelompokkan dalam beberapa kategori, sebagai berikut: < 60 : Rendah $60 \leq IPM < 70$: Sedang $70 \leq IPM < 80$: Tinggi $IPM \geq 80$: Sangat Tinggi. IPM Kabupaten Ngada tahun 2016 sebesar 65.1 meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 64, Melihat pengelompokan kategori IPM tersebut, Kabupaten Ngada termasuk kategori rendah.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ngada sesuai publikasi BPS dalam dua tahun terakhir, mengalami peningkatan dari 96,16 persen pada tahun 2014 menjadi 97,61 persen pada tahun 2015.

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2015 RLS mencapai 7,60 tahun. Mengalami peningkatan sebesar 0,68 tahun dari tahun 2010 dimana RLS baru mencapai 6,92 Tahun. Hal ini berarti rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ngada baru sampai 7,60 Tahun atau setara dengan kelas 1 SLTP mNgadakati kelas 2 SLTP yang juga berarti belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ngada lebih tinggi dari rata-rata NTT yang mencapai 6,85 tahun.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kemajuan pembangunan pendidikan bukanlah hal mudah untuk dicapai. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain rendahnya jangkauan (coverage) dan akses pada pelayanan pendidikan terutama bagi penduduk kurang mampu dan penduduk yang tinggal di perdesaan atau daerah terpencil. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah terutama jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Partisipasi sekolah ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Berikut data pencapaian APM dan APK KABUPATEN Ngada :

Tabel 2.9

**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 s/d 2016**

No	Tahun	SD/MI/Paket A	SLTP/MTs/Paket B	SLTA/SMK/MA
1	2010	94,60 %	63,06%	52,58%
2	2011	99,00%	79,82%	51,36%
3	2012	98,69%	81,69%	57,78%
4	2013	96,36%	67,15%	62,93%
5	2014	98,88%	96,97%	86,06%
6	2015	86,15%	57,66%	58,08%
7	2016	92,23 %	71,80%	53,78%

Sumber : Data SIPD Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, 2016

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ngada secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS mengalami fluktuatif dari tahun 2010 sebesar 94,60% terus berfluktuasi samapai pada tahun 2016 mencapai 92,23% walaupun masih di bawah 100%. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA kondisi APM tiap tahun lebih rendah dibandingkan SD/MI dan SMP/MTs. Pada Tahun 2016 baru mencapai 53,78% yang berarti bahwa masih ada 41,92% penduduk yang berusia 16-18 tahun yang belum bersekolah di SMA/SMK/MA. Keadaan ini membutuhkan perhatian melalui program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas. Jika dirinci per kecamatan pada Tahun 2015 APM Kecamatan Bajawa dan Aimere di atas 100%, yaitu mencapai 104,55% untuk Kecamatan Bajawa dan 104,14% untuk Kecamatan

Aimere. Hal ini disebabkan karena adanya murid usia sekolah SMA/SMK/MA yang masih tercatat sebagai penduduk di kecamatan lain tetapi bersekolah di Kecamatan Bajawa, begitu pula dengan Kecamatan Aimere yang merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 s/d 2016

No	Tahun	SD	SLTP	SLTA/SMK
1	2010	107,84	85,05	70,84
2	2011	107,61	82,38	63,87
3	2012	112,76	115,22	106,31
4	2013	97,7	105,4	92,78
5	2014	112,58	90,74	58,01
6	2015*	100,86	86,46	65,37
7	2016	103,20	79,74	64,01

Sumber : Ngada dalam Angka BPS, 2011-2016 dan Dinas Pendidikan, 2016

Nilai APK SD/MI di Kabupaten Ngada lebih dari 100%, disebabkan karena populasi murid yang bersekolah di SD/MI mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang SD/MI. Misalnya, ada anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah ditingkat SD atau juga yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda.

5. Angka Pendidikan Yang Di Tamatkan

Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Hal ini secara spesifik dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk berumur 10 tahun keatas. Komposisi penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Ngada masih membutuhkan perhatian serius, secara khusus untuk tingkatan pendidikan yang lebih tinggi.

Bila dibandingkan dengan konsisi 2014, maka jumlah penduduk tidak berijazah mengalami penurunan dari 25% menjadi 17,5%, penduduk berijazah SD meningkat dari 42,33 menjadi 45,2; begitupun yang berijazah SMA/ sederajat dari 10,74% menjadi 13,4%, D3 dari 0,86% menjadi 2,2% dan D4/S1/S2 meningkat dari 4,38% menjadi 6,2%.

Akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat rendah terlihat dari persentase ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya jangkauan (*coverage*) dan akses pada sarana pendidikan tinggi dan biaya sekolah yang tinggi turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah masyarakat. Keterbatasan pendapatan keluarga dan tingginya biaya sekolah menjadi salah satu sebab banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Upaya yang telah dilakukan dengan menghadirkan Kampus Undana di Kabupaten Ngada pada tahun 2013 merupakan salah satu solusinya sehingga dalam beberapa tahun kedepan bisa meningkatkan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.

6. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi demografi dari aspek kesehatan bisa dilihat dari indikator umum kesehatan pada tabel 2.11 Kasus Kematian Bayi mengalami fluktuasi; tahun 2013 dan 2014 sebanyak 58 kasus kematian bayi, menurun menjadi 51 kasus tahun 2015 dan 44 kasus di tahun 2016. Untuk kasus kematian ibu masih sulit di tekan karena masih adanya penyakit penyerta sebagai akibat kematian ibu.

Tabel 2.11
Indikator Umum Kesehatan Kabupaten Ngada 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016
A K B	20/1000 KH	20/1000 KH	18,6/1000KH	18,12/1000KH
	58 Kasus	58 Kasus	51 Kasus	44 kasus
A K I	139/ 100.000 KH	142/ 100.000 KH	109/100.000 KH	222/100.000 KH
	4 kasus	4 kasus	3 Kasus	6 Kasus
Gizi Buruk	0,05%	0,02%	0,08%	
	7 Kasus	4 Kasus	9 kasus	10 kasus
Desa UCI	64.24%	78.80%	86.09%	90,07%
PHBS	67%	67.50%	70.86%	73,85%
Desa Siaga Aktif	54.05%	51.35%	54.97%	54,39%
	56 desa	63 desa	83 Desa	82 Desa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada 2016

Tahun 2014 kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus dari 2815 kelahiran hidup (142,10/100.000 KH). Tahun 2015 terjadi penurunan kasus kematian ibu yaitu 3 kasus dari 2741 kelahiran hidup (109,45/100.000 KH). Tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 6 kasus dari 2693 kelahiran hidup (222,80/100.000 KH). Pencapaian ini jika dibandingkan dengan target MDG's (102/100.000 KH) maka AKI di Kabupaten Ngada belum mencapai target MDG's. Penyebab kematian ibu di tahun 2016

adalah perdarahan sebagai penyebab langsung sebanyak 2 kasus dan penyebab tidak langsung yakni lupus 1 kasus, hipertensi kronik 1 kasus dan mati batang otak 2 kasus.

7. Angka Harapan Hidup

Selain Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur derajat kehidupan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) Pada tahun 2010 sebesar 67,20 tahun dan pada tahun 2015 menjadi 67,32 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,12 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,99%. AHH Kabupaten Ngada lebih tinggi dibanding NTT yang mencapai 65,91 tahun.

8. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Ngada dari Tahun 2011-2015 berada pada kisaran 97% sampai 99,2%. Dari jumlah 70.388 angkatan kerja yang bekerja, masing-masing tersebar pada sektor primer berjumlah 43.940 orang, sektor sekunder 5.653 orang dan sektor tersier berjumlah 20.796 orang. Bila dibandingkan tahun 2014, TPAK dan pengangguran terbuka mengalami penurunan. Kondisi ketenagakerjaan tersebut jika dibandingkan dengan kondisi Propinsi NTT, dimana TPAK tahun 2014 sebesar 68,9% dan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,26%, maka Kabupaten Ngada berada dalam kondisi yang lebih baik.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk >15 tahun menurut Kegiatan Utama

Kegiatan seminggu lalu	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan kerja	66.328	67.609	69.993	74.908	71.331
Bekerja	65.840	67.097	69.056	74.287	70.388
Menganggur	488	512	937	621	943
Bukan Angkatan Kerja	24.475	26.427	26.997	24.013	29.422
Total	90.803	94.036	96.990	98.921	100.753

Sumber: BPS Ngada 2011-2015

Dari tampilan data tersebut, bila dikaitkan dengan beban ketergantungan yang dilihat dari perbandingan struktur usia produktif dan non produktif, terlihat bahwa meskipun penduduk usia produktif lebih banyak namun dalam realitanya tidak semua penduduk produktif tersebut merupakan angkatan kerja. Dengan demikian beban ketergantungan masih tetap berada pada kaum laki-laki. Karena lebih banyak penduduk laki-laki yang

bekerja dibandingkan perempuan. Dengan kondisi ini tentu akan terjadi pendobelan beban tanggungan/beban ganda, karena selain menanggung dirinya sendiri, satu penduduk produktif laki laki harus menanggung beban ekonomi penduduk non produktif serta penduduk produktif perempuan yang tidak bekerja.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Di kabupaten Ngada terdapat 14 situs budaya bersejarah di Kabupaten Ngada yakni: 1) Kampung Lama Langagedha, 2) Kampung Wogo Lama, 3) Kampung Gisi Lama 4) Kampung Belu Lama, 5) Kampung Tradisional Maghilewa, 6)Situs Masjid Tua Riung, 7) Situs Gereja Tua Riung, 8) Situs Gereja Tua Tado, 9) Situs Kampung Tradisional Gurusina, 10)Situs Kampung Tradisional Bena, 11)Kampung Tradisional Wogo Baru, 12) Kampung Tradisional Tololela, 13) Situs Sejarah Matamenge, 14) Kampung Tradisional Belaraghi.

Berkaitan dengan pelestarian budaya Ngada, terdapat potensi seni dan budaya yang sangat mendukung pembangunan yakni: 1) Tarian Ja'i yang merupakan tarian asli Masyarakat Ngada dari etnis Bajawa telah menjadi tarian yang mulai digemari seluruh lapisan masyarakat Ngada dan Provinsi NTT. 2).Alat Musik tiup tradisional Bombardom, berhasil memecahkan rekor MURI. 3)Adanya situs Matamenge Desa Mengeruda yang telah menarik minat para peneliti arkeologi dan antropologi dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan penelitaian. Tim Pusat Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bersama Tim Geologi Bandung serta peneliti dari Australia menemukan beberapa fosil gajah di situs Matamenge, Desa Menggeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Fosil-fosil purbakala itu, yakni Scapula (tulang belikat) fosil RIB (tulang rusuk) fosil gading, fosil Pelvis (tulang pinggul), fosil Vertebrae (tulang belakang), serta beberapa temuan penting lainnya yang mengarah kepada jejak adanya kehidupan manusia. Temuan-temuan ini menjadi penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan perihal jaman prasejarah di Flores.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Ratio Guru Berbanding Murid

Ratio Guru berbanding Murid atau Ratio Guru per Murid menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukkan semakin baiknya tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah dengan rasio ideal sebesar 1/20 dari 10.000 penduduk atau angka rasio ideal adalah 500. Data menunjukkan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 749, SMP/MTs sebesar 863 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 844 serta untuk rata-rata Guru di Kabupaten Ngada pada semua jenjang pendidikan menangani 9 -12 murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 131 - 363 murid.

Tabel 2.13

Rasio Guru Murid, Rata – rata Murid Guru,
Rata – rata Murid Sekolah Tahun 2015

NO	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Murid	Rata –rata Murid /Guru	Rata – rata Murid/Sekolah
1	SD/MI	173	1702	22718	749	13	131
2	SMP/MTs	58	934	10816	863	12	186
3	SMA/MA/SMK	19	583	6909	844	12	363

Sumber: BPS, 2016 dan Dinas Pendidikan , 2016

b. Ketersediaan Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Persentase guru berkeahlian/kompeten di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompeten disajikan berikut :

Tabel 2.14

Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2016

NO	Jenjang Pendidikan	Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompetensi Tahun 2016	
		Jumlah	Persentase
1	SD/MI	357	21
2	SMP/MTs	855	91.5
3	SMA/MA/SMK	564	96.74

Sumber: Dinas Pendidikan , 2016

c. Angka Kelulusan

Salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ngada Tahun 2014 - 2016 menunjukkan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2014 sampai 2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Angka Kelulusan di Kabupaten Ngada tahun 2014 - 2016

NO	Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan (%)		
		2014	2015	2016
1	SD/MI	100	100	100
2	SMP/MTs	99.89	100	100
3	SMA/MA/SMK	99.5	99.80	99.80

Sumber: Dinas Pendidikan , 2016

d. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk

Usia Sekolah Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 79 dimana jumlah penduduk usia SD/MI menjadi sebanyak 21.926 orang sementara jumlah sekolah sebanyak 173 buah. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka rasio sebesar 50 dimana jumlah sekolah yang ada sebanyak 58 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 11.629 orang dan angka rasio untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 16 dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 19 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebanyak 11.685 orang.

e. Kondisi Kelayakan Ruang Kelas

Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2016 menunjukkan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ngada layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing- masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2015

NO	Jenjang Pendidikan	Persentase Kelayakan Ruang Kelas		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	SD/MI	129	529	232
2	SMP/MTs	102	190	57
3	SMA/MA/SMK	80	262	47

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan , 2016 -2021

f. Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2016 sebesar 43.46%, dimana sebanyak 4.917 siswa dari 16.670 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan belum mencapai target 43.55 % di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka capaian ini semakin meningkat, akan tetapi pencapaiannya belum memuaskan karena masih sekitar 51 % anak usia dini yang belum mengikuti PAUD.

g. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ngada tahun 2015 menunjukkan: APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 86.15 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 71.95 persen dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 58.08 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2016. Sedangkan untuk penduduk usia 16-18 tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu.

Tabel 2.17
Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ngada 2014 - 2015

NO	Jenjang Umur	Angka Partisipasi Sekolah		
		2014	2015	2016
1	7 – 12 Tahun	99.88	86.15	
2	13 – 15 Tahun	96.97	71.95	
3	16 – 18 Tahun	86.06	58.08	

h. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2016 sebesar 102.96 %, dimana dari 3.752 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa

yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 3.644 siswa, sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebesar 72.63 % dimana dari 2.404 siswa baru tingkat SMA/MA/SD/MI dari jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak 3.310 siswa .

2. Kesehatan

2.1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ngada secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2016 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 14 buah untuk melayani 159.707 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : 11.407 dari standar ratio 1 : 30.000 jiwa. Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun 2016 sebanyak 32 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 37 buah, sementara jumlah Desa sebanyak 151 Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah yang ada.

c. Rasio Dokter, Tenaga Bidan dan Perawat

Ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukkan bahwa rasio tenaga Dokter pada tahun 2016 sebesar 0.207 per 1000 penduduk, dimana jumlah dokter yang ada sebanyak 33 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani penduduk Kabupaten Ngada sebanyak 159.070 jiwa. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ngada. Rasio tenaga Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2016, jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 167 orang dengan rasio sebesar 1,05 per seribu penduduk, sementara itu rasio Perawat sebesar 0.94 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 150 orang, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak 159.070 jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga

disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain :

d. Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. BOR di RSUD Ngada pada tahun 2016 sebesar 57.15 persen. Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal.

e. Average Length of Stay (ALOS)

Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2016 sebesar 3,12 hari, sementara Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 – 9 hari. Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan.

f. Bed Turn Over (BTO)

Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2016 sebesar 67.26 kali dan masih cukup tinggi, sementara standar ideal sebanyak 40-50 kali per tahun.

g. Turn Over Interval (TOI)

Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya yang juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. pada tahun 2016 TOI selama 2,3 hari dan masih berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya.

h. Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR)

Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45 %. Pada tahun 2016 GDR sebesar 28.29 %. Masih tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana pasien terlambat

dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25 ‰. Pada tahun 2016 NDR sebesar 15.69 ‰.

i. **Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD dan Angka Kematian Bayi di RSUD**

Pada tahun 2016 tidak ada ibu yang mati di RSUD. Untuk angka kematian bayi di RSUD, indikator ini menggambarkan tingkat kematian bayi (<1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup di rumah sakit (RS), yang gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<1 tahun) mati di rumah sakit. Pada tahun 2016 sebesar 13.34 ‰ yang diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 36 kasus dari total bayi yang mati dan hidup, sebanyak 2.699 orang. Ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 bayi yang lahir terdapat 13 bayi yang mati.

2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. **Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang berkompeten**

Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani dimana pada tahun 2016 terdapat 698 kasus kompilasi kebidanan yang ditangani 100 persen.

b. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah pelayanan lengkap bagi ibu hamil sampai dengan trimester keempat masa kehamilannya untuk mendeteksi awal terhadap kemungkinan adanya kelainan janin dan pencegahan terhadap risiko ibu hamil serta jaminan terhadap kesehatan janin. Pada tahun 2016 cakupan K4 sebesar 58.32 persen dan masih jauh dibawah target sebesar 95 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa; Sementara untuk Cakupan pelayanan ibu nifas yang merupakan pelayanan bagi ibu pasca melahirkan sebesar 85.91 persen dan belum memenuhi target sebesar 90 persen.

c. **Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) dan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani**

Angka Kematian Neonatal sebesar 1.3 per seribu kelahiran hidup dimana terdapat 36 bayi yang meninggal dari 2.699 kelahiran hidup; Untuk Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 212 neonatus yang mengalami komplikasi dan

semuanya ditangani. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal ini didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal.

d. Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan kunjungan bayi yang ideal adalah untuk menjamin anak balita dapat memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Cakupan kunjungan bayi tahun 2016 sebesar 92.24 persen, dimana terdapat 2.447 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari 2.645 jumlah seluruh bayi yang lahir. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal dan masih diperlukan pengawasan dan intervensi program dan kegiatan terkait. Sedangkan, untuk cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2016 sebesar 80.33 persen, dimana terdapat 8.279 yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 10.306 jumlah seluruh anak Balita. Data Capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat khususnya ibu – ibu terhadap kesehatan bayi dan balita cukup tinggi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

e. Cakupan Desa/ Kelurahan Imunisasi Universal Child Immunization/ UCI

Desa/Kelurahan yang mencapai UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Persentase Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2016 sebanyak 136 Desa/Kelurahan dari total 151 Desa/Kelurahan.

f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2016 sebesar 75.97 persen. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua masyarakat miskin memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat miskin untuk menggunakan haknya yang dijamin pemerintah melalui BPJS masih minim, disamping sosialisasi secara kontinyu dari petugas yang belum optimal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat miskin, disamping itu adanya keengganan dari masyarakat miskin yang mau berobat kalau penyakit yang diderita sudah dianggap parah dan persepsi masyarakat miskin bahwa pengurusan administrasi sebagai persyaratan mendapatkan haknya dipandang sulit; Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 0.81 persen. Hal ini disebabkan membaiknya sistem rujukan yang ada, sehingga seluruh pasien masyarakat miskin yang membutuhkan rujukan ke RSUD dapat terlayani.

g. Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Pada tahun 2016 menunjukkan capaian sebesar 87.43 % dan cakupan spal baru mencapai 86 %. Upaya untuk menguji kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat

perlu terus-menerus dilakukan untuk menjamin kelayakan air minum yang dikonsumsi, demikian juga upaya penyadaran masyarakat untuk menjamin kebersihan dan kelayakan air minumnya.

h. Meningkatkan Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sampai dengan tahun 2016 baru sebanyak 38 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM dari 151 Desa/Kelurahan yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih serius pada program tahun berikutnya, karena dampak dari lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan.

2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

1) Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ngada juga berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Swasta.

3) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2016 sebesar 82 persen atau terdapat 82 Desa Siaga Aktif dari 100 desa siaga yang terbentuk dan dilaporkan. Diharapkan jumlah desa siaga yang dibentuk bertambah dan aktif melaksanakan kegiatan Desa Siaga dan pembentukannya tidak hanya berorientasi pada desa-desa diluar kota tapi juga kelurahan dalam kota atau disebut Kelurahan Siaga. Evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dari BPMPD dan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dengan dana bantuan AIP-MNH sangat diperlukan untuk memastikan keaktifan dari Desa Siaga yang ada.

2) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pekerjaan Umum

Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Sampai keadaan tahun 2016 kondisi jalan kabupaten yang sudah menghubungkan pusat – pusat kegiatan seperti ibu kota kecamatan, kantong – kantong produksi dan daerah strategis dalam wilayah Kabupaten Ngada sudah mencapai 90.98 persen atau sepanjang 948 km dari 1.042 km jalan kabupaten yang ada. Sedangkan dari total 1.042 km jalan Kabupaten tersebut yang dapat ditempuh minimal 20 km/jam adalah sepanjang 544.65 km atau sekitar 52.3 %. Sementara itu untuk air bersih, pada tahun 2016 terdapat 25.780 kk dari 35.320 kk atau sekitar 72.98 % masyarakat Ngada yang sudah terlayani air bersih. Untuk kondisi irigasi sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah sampai pada tahun 2016 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya 64.56 persen atau 44.237 meter dari total saluran irigasi sepanjang 68.513meter, sementara itu ratio irigasi

terhadap luas lahan budidaya pertanian sebesar 13 dimana luas lahan budidaya pertanian yang ada seluas 5.608 ha.

Tabel 2.18
Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Air bersih, dan irigasi Tahun 2016

NO	Uraian	Capaian	
		2015	2016
1	Panjang jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (%)	89.73	90.98
2	Panjang Jalan Kabupaten yang dapat ditempuh dalam waktu 20 km/jam (km)	466.74	544.65
3	Penduduk Terlayani air bersih (KK)	66.22	72.98
4	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (m)	33.513	44.237
5	Rasio Irigasi terhadap luas lahan budidayapertanian	17	13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2016

b) Penataan Ruang

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2016 belum dapat terealisasi dengan baik. Dalam perencanaan, terdapat 20 dokumen perencanaan yang harus dibuat yakni 1 Dokumen RTRW, 12 Dokumen RDTR Kota dan 7 Dokumen RDTR Kawasan Strategis yang harus dilengkapi oleh Kabupaten Ngada. Namun dalam pelaksanaan baru 1 Dokumen perencanaan yakni dokumen RTRW yang sudah ada peraturan daerahnya.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aspek kualitas rumah, kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Secara umum kualitas rumah ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas rumah yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan penghuninya. Terkait dengan hal tersebut diketahui bahwa perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten

Ngada sangat fluktuatif. Pada tahun 2015 baru mencapai 75.69 % rumah yang masuk dalam kategori layak huni. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama MBR.

Pemanfaatan listrik belum optimal dikalangan rumah tangga dan hanya mencapai 25.050 RT dari 34.778 RT atau 72.03 %. Daya beli masyarakat yang relatif terbatas, menjadikan listrik belum sebagai kebutuhan utama dalam preferensi konsumsinya. Dengan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap PLN, akan tetapi PLN sendiri memiliki keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya. Pada sisi lain, pengembangan atau perluasan jaringan listrik untuk menjangkau rumah tangga pada wilayah terpencil membutuhkan investasi yang relatif besar sementara itu kemampuan fiskal daerah yang terbatas menjadikan pemerintah daerah kesulitan melakukan investasi untuk meningkatkan produksi dan perluasan jaringan. Sedangkan rumah Tangga yang terlayani melalui PLTMH sebanyak 573 RT dan PLTS sebanyak 1.238 RT. Meskipun demikian dalam jangka panjang sangat diharapkan PLTP Daratei Mataloko dengan cadangan terbukti 2.5 MW, pembangkit listrik tenaga micro hydro, dan pembangkit listrik tenaga surya di beberapa kecamatan diharapkan dapat membantu pasokan energi listrik ditahun mendatang. Mengingat peranannya yang sangat strategis, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat dengan melakukan perluasan jaringan listrik untuk dapat menjangkau seluruh rumah tangga dan juga merupakan pilihan strategi untuk mendorong percepatan pertumbuhan di bidang ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain berkaitan dengan luasan permukiman kumuh di Kabupaten Ngada berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, dari 1.396 ha luas daerah permukiman di Kota Bajawa, seluas 27 ha (1,93%) termasuk kedalam daerah permukiman kumuh. Dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karena penetapannya baru dilakukan maka luasan kawasan kumuh untuk kabupaten Ngada masih tetap pada luasan 27 ha. Diharapkan kedepan kawasan ini menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat tercapai indicator SPM daerah kumuh 0 % pada lima tahun mendatang.

4) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (POLPP). POLPP juga sangat penting karena keberadaan mereka dalam menegakkan kewibawaan pemerintah dengan berperan sebagai suatu kekuatan penegakan regulasi di daerah seperti

Peraturan Daerah juga Peraturan Bupati. Perkembangan capaian kinerja aspek penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ngada. Tahun 2016 Jumlah Pegawai PolPP mencapai 121 orang yang kemudian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas linmas sebanyak 334 orang. Selain itu, aspek ini tergambar dalam persentase penanganan bencana dalam daerah. Pada tahun 2016 terjadi bencana pada 67 lokasi di 12 kecamatan dengan jumlah perkiraan kerugian Rp.750.000.000,-. Semua lokasi bencana diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.308.000.000,- makanan, material bangunan dan obat – obatan.

5) Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga saat ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ngada dengan berbagai cara, salah satunya melakukan pendampingan agar para penyandang masalah social untuk lebih produktif di tengah-tengah kehidupan social kemasyarakatan. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.19
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ngada
Pada Tahun 2016

No	Jenis Masalah	Satuan	Jumlah
1	Bekas Narapidana	Orang	150 orang
2	Penyandang Cacat	Orang	354 orang
3	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1950 orang
4	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	787 KK
5	Anak terlantar	Orang	1036 orang
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Orang	2 orang
7	Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis	Orang	110 orang
8	Korban akibat bencana alam dan musibah	Orang	78 KK
9	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	Orang	115 KK
10	Komunitas Adat Terpencil	Orang	95 KK

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2016

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Ngada pada tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja yang semula berjumlah 71.331 orang menjadi berkurang sebanyak 3.577 orang dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 74.908 orang. Sementara jumlah pengangguran pada tahun 2015 sebanyak 943 orang, mengalami peningkatan yaitu sebanyak 322 orang dibanding tahun 2014 yang berjumlah 630 orang. Penurunan jumlah angkatan kerja dalam setahun terakhir berbanding lurus dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun sebesar 4,93 persen. Pada tahun 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 75,73% dan pada tahun 2015 menjadi 70,80%

Tabel 2.20
Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Pemerintah Kabupaten Ngada periode 2014– 2016

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		2014	2015	2016
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	75,73%	70,80%	71%
2	Pencari Kerja yang ditempatkan	30,96%	-	4%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,83%	1,32%	1%
4	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industry (PHI)	3%	13%	-
5.	Tingkat perselisihan antara buruh dan pemerintah	-	-	92%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2014-2016

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Ngada selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2010, tahun 2011 dan 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 hanya sebesar 5,07% dan kembali membaik keangka 30,96%. Kondisi ini disebabkan karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum secara optimal menggunakan sistem informasi ketenagakerjaan agar bisa diakses oleh para pencari kerja. Dari data dalam tabel di atas, penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Ngada pada tahun 2015 telah mencapai dua digit dalam pengelolaan kasus perselisihan. Pada tahun 2010 hanya 4 penyelesaian perselisihan, 7 penyelesaian perselisihan pada tahun 2013 dan meningkat ditahun 2015 penyelesaian PHI oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kondisi ini

tidak saja karena rendahnya dinamika kasus perselisihan antara pekerja/karyawan dengan perusahaan namun juga disebabkan para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial belum memahami peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai fasilitator penyelesaian PHI.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan menjadi sangat strategis dalam pembangunan terutama dimulai dari unit terkecil yakni keluarga. Partisipasi perempuan dalam berbagai sector akan menjadi pemicu yang cukup besar dalam proses pembangunan. Dalam konteks partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta di Kabupaten Ngada dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 2.21

Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2016

No	Uraian	Capaian Kinerja 2016
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	7.26 %
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	92.74 %
3	Rasio KDRT	0.29
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	98 %
5	Persentase Jumlah tenaga kerja dibawah umur	3.72 %
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100 %
8	Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK	100 %
9	Jumlah LSM	0
10	LPM berprestasi	100 %

Sumber : BPMPD-PP dan BK – Diklat, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui terjadi kesenjangan yang cukup tinggi partisipasi perempuan di lembaga swasta dibandingkan di lembaga pemerintah. Kaum perempuan lebih memilih berpartisipasi pada lembaga swasta dibandingkan pada lembaga pemerintah. Dalam konteks

tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjadi salah satu persoalan pemberdayaan perempuan yang terus menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2016 terdapat 13 kasus KDRT sehingga peran pemerintah terus dioptimalkan dengan advokasi dan tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3) Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mengembangkan model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Lumbung Tanah telah mendorong ketersediaan pangan Kabupaten Ngada yang membaik dari tahun ke tahun. Perkembangan kondisi pangan Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Hasil Kinerja Urusan Pangan
Pemerintah Kabupaten Ngada periode 2013 – 2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja		
		2013	2014	2015
1	% Ketersediaan pangan utama	100	100	100

Sumber : BP3KP Kab. Ngada

Upaya pemerintah Kabupaten Ngada saat ini adalah mempertahankan kondisi pangan yang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dengan melaksanakan program-program yang ada untuk memperkuat pangan lokal agar memiliki nilai tambah dan sederajat dengan pangan utama.

4) Pertanian

Pembangunan dan penataan pertanian menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Total lahan bersertifikat di Kabupaten Ngada tahun 2015 sebanyak 17.047 bidang. Adapun aset pemerintah Kabupaten Ngada berupa tanah keseluruhannya sebanyak 483 bidang, yang bersertifikat 423 bidang, dalam proses sertifikat 10 bidang, belum diukur 52 bidang. Kewenangan lain yang dimiliki pemerintah daerah adalah pemberian ijin lokasi. Data tahun 2011 ijin lokasi yang sudah

diberikan telah mencapai 100% dari total pengajuan sebanyak 465 atau dapat dikatakan bahwa seluruh pengajuan ijin lokasi telah diselesaikan dengan baik. Sedangkan tahun 2015 total pengajuan sebanyak 468 yang telah diselesaikan sebanyak 196 atau 41,9%.

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang cukup sensitif dan tidak jarang menimbulkan konflik. Hal tersebut tidak terkecuali juga terjadi pada tanah yang dimiliki oleh Pemda Ngada, salah satunya adalah permasalahan tanah Rumah Potong Hewan di Kelurahan Trikora sebanyak 1 bidang yang belum ada penyelesaiannya.

5) Lingkungan Hidup

Pembangunan Infrastruktur perkotaan dan perdesaan harus selalu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah sedangkan perlindungan kawasan konservasi dengan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan hidup

No	Uraian	Capaian Kinerja (%) 2016
1	Persentase penanganan sampah	21.82
2	Tempat Pembuangan sampah per satuan penduduk	0.07
3	Penegakan hukum lingkungan	100
4	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	18.29

Sumber : BLHD Ngada

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Ngada, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 3.10 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 9.87 % pada tahun 2014, yang berarti ada sekitar 90.13% sampah yang belum terangkut, diperkirakan 90.13 % sampah yang tidak terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke kali, lahan kosong atau di pinggir jalan. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Ngada selama periode 2010 - 2016 relatif rendah, terakhir tahun 2016 sekitar 0.27% TPS/satuan penduduk. Artinya masih banyak sampah yang belum dibuang sesuai tempatnya. Persoalan tersebut muncul sebagai

akibat dari : Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur persampahan dan pengelolaan persampahan karena ketidakterediaan TPST di tiap kecamatan dan TPA untuk proses pengolahannya sehingga sampah yang ada masih dibuang di Lekolodo; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan sampah bertambah sedangkan pengelolaan akhir sampah belum mengembangkan sistem partisipatif untuk prinsip 3R; Pada tahun 2015 telah dikembangkan bank sampah sebanyak 24 titik di 12 kecamatan hasil kerjasama antara BLH Kabupaten Ngada dan Yayasan Karitas Keuskupan Agung Ngada.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2016 sebesar 82.88 %. Sementara itu, untuk rasiobayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Ngada masih sebesar 54.96 persen. Masih belum banyak bayi yang ber-Akte Kelahiran ini membutuhkan kerjasama yang efektif antara Dispenduk dan Capil dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte Kelahirannya. Selain itu untuk Rasio Pasangan ber-Akte Nikah menunjukkan capaian sebesar 65.74 % dan untuk Kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan capaian sebesar 54.96 %. Capaian yang masih dari kedua indikator ini membutuhkan suatu kegiatan inovatif agar seluruh pasangan nikah dapat memiliki aktenya dan seluruh penduduk juga dapat memiliki Akte Kelahirannya.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa di bidang perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2016 telah dibentuk 12 buah BUMDes dengan capaian sebesar 8.9 persen.
- c. Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan dengan baik sebesar 100 persen, dimana terdapat sebanyak 151 Desa/Kelurahan telah melaksanakan administrasi dengan baik dari 151 Desa/Kelurahan yang ada.
- d. Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik sebesar 100 persen, atau sebanyak 151 Desa/Kelurahan.

- e. Persentase PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ngada sebanyak 151 kelompok yang terdiri dari PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2016 sebanyak 151 kelompok atau 100 persen.
- f. Persentase Posyandu Aktif Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 332 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100 persen.
- g. Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sebesar 16 % dimana dari total Rp 6.191.120.732,-, jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan hanya sebesar Rp. 999.709.800,-.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- a. Persentase Akseptor KB Pada tahun 2016 sebesar 51.68 persen atau sebanyak 10.257 akseptor dari 19.849 PUS yang ada. Masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertumbuhan penduduk dapat terkendali.
- b. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2016 sebesar 51.68 % yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar 100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB.
- c. Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Pada tahun 2016 sebesar 12.462 pasang. Angka ini masih cukup tinggi oleh karena itu peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmet need.
- d. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 Desa/ Kelurahan Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, dimana Jumlah PLKB yang ada sebanyak 79 orang untuk melayani 151 Desa/Kelurahan yang ada dengan angka rasio sebesar 0,52 dan sesuai standar ideal sebesar 0,50.
- e. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan Pada tahun 2016 angka rasio sebesar 1 atau telah mencapai standar ideal, dimana telah tersedia PPKBD di setiap Desa dan Kelurahan.

- f. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2016 menunjukkan persentase yang masih tinggi yaitu sebesar 68.43 persen. Target Pemerintah kedepan untuk dapat meningkatkan status keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga sejahtera, untuk itu integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikoordinasikan secara baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sejahtera.

9) Perhubungan

Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2016 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, telah disediakan fasilitas perlengkapan jalan, Rambu sebesar 155 buah, Marka sebesar 7587 buah dan Guard Drill sebesar 623 buah. Fasilitas perlengkapan jalan ini perlu secara terus-menerus dipenuhi sesuai kebutuhannya pada ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Ngada. Selain itu persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR untuk menjamin kelayakan penggunaannya sebesar 96.63 persen atau sebanyak 717 kendaraan yang telah melakukan uji KIR dari 742 kendaraan yang ada. Selain itu pada bidang perhubungan masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang.

10) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi menjadi sangat strategis dalam memberikan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang optimal di bidang informasi pembangunan kepada masyarakat maka kerjasama penyebarluasan informasi pembangunan antara pemerintah dan media cetak local menjadi pilihan yang strategis. Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://www.Ngadakab.go.id>. Ragam informasi terkait Kabupaten Ngada dapat secara mudah diakses oleh siapapun.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ngada menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Diharapkan dalam waktu lima tahun kedepan akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTR, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya sudah dapat terwujud. Adanya kemudahan akses yang diimbangi

dengan integritas jajaran pengelola diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Ketersediaan sarana untuk mengakses internet bagi masyarakat luas di Kabupaten Ngada sudah dirasa cukup memadai dengan ketersediaan jaringan telkomsel di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Layanan Urusan Koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ngada dapat dilihat dari Koperasi Aktif pada tahun 2016 hanya sebesar 31.13 persen atau sebanyak 99 koperasi aktif dari 318 koperasi yang ada, untuk UKM non BPR/LKM UKM Aktif pada tahun 2015 sebanyak 2.146 dan pada tahun 2016 menjadi 2507 UMKM mengalami peningkatan sebesar 14.4 %. Demikian juga persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina mengalami peningkatan menjadi sebesar 76 UMKM 2015 menjadi 108 UMKM pada tahun 2016 atau meningkat 17.37 %. Sedangkan untuk UMKM Mandiri sebesar tidak mengalami peningkatan. Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2014 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.24.

Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2016.

No	Uraian	Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016
1	Persentase koperasi aktif	2146	2507
2	Persentase UMKM aktif	2146	2507
3	Persentase UMKM yang dibina	76	108
4	Persentase UMKM mandiri	0	0

12) Statistik

Perencanaan pembangunan yang terkait dengan statistik dapat diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu Buku Ngada Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2010-2014. Selain Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik , pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah/SIPD

berbasis website, sehingga bisa diakses melalui browser dan dukungan jaringan internet dengan alamat Website <http://sipd.bangda.kemendagri.go.id>.

Data SIPD sebagaimana dimaksud bersumber dari seluruh SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam menyediakan suatu dokumen perencanaan sudah membaik. Akan tetapi kelemahan dokumen yang diterbitkan BPS yaitu terlambatnya penerbitan yang berimplikasi pada perencanaan pembangunan berikutnya. Sedangkan kelemahan SIPD tidak semua elemen data yang tersedia dalam sistem dapat dipenuhi.

13). Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Ngada mulai dirasakan dengan masuknya investor yang bergerak di Pembangunan Perkebunan Kemiri Sunan yaitu PT Bumiampo Investama Sejahtera, dengan nilai investasi sebesar 40 Milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 Orang. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ngada menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peluang usaha bagi investor diantaranya dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai, iklim usaha yang nyaman dan kajian yang terpadu.

14). Kepemudaan dan Olahraga

Dalam penyediaan sarana olah raga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Ngada selama periode 2011 – 2015 sangat stagnan pada angka 0.004 %. Meskipun demikian fasilitas olah raga di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan terutama pada fasilitas dibidang olahraga pendidikan. Rata – rata di tiap sekolah pada tiap kecamatan memiliki lapangan sendiri sehingga kebutuhan akan fasilitas olahraga cukup memadai.

15). Persandian

Persandian digunakan, untuk mengamankan berita-berita yang bersifat taktik, operasional secara cepat, tepat dan aman ke tujuan, terutama berita-berita yang tidak bisa disampaikan melalui surat atau fax yang disampaikan berupa kode atau sandi. Pada tahun 2015 telah dikirim 1 orang peserta untuk mengikuti pelatihan persandian di Pusdiklat Lembaga Sandi di Bogor, serta mendapat bantuan satu set peralatan persandian.

16). Kebudayaan

Keberadaan festival sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat belum memadai. Festival yang ada setiap tahunnya masih merupakan festival gabungan sederatan Flores Lembata yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berpindah – pindah masih dirasakan belum cukup untuk menarik perhatian warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs dan cagar budaya.

17). Perpustakaan

Sementara untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2016 terdapat 419 perpustakaan di seluruh wilayah kabupaten Ngada dengan jumlah kunjungan masih sangat rendah dimana dari 159.070 penduduk yang rutin melakukan kunjungan baru mencapai 6.180 penduduk saja. Hingga saat ini, peran perpustakaan di Kabupaten Ngada dirasa masih sangat minim dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan, dikarenakan ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai. Di sisi lain, banyaknya perpustakaan di Sekolah-sekolah dan Kecamatan serta makin mudahnya mengakses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

18). Kearsipan Daerah

Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2016 menunjukkan capaian sebesar 65 persen, dimana terdapat 22 SKPD dari 34 PD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ngada yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2016 -2021 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayaan dan pemasaran hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap PAD, dengan capaian indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Produksi Ikan pada Tahun 2016 sebanyak 982.7 Ton dari potensi lestari daerah yang diperkirakan sebanyak 5.333 Ton atau sebesar 18.42 persen. Dengan demikian terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2015 sebanyak 520 Ton.
- 2) Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan atau masih seluas 12 ha (0.05%) dari 20.080 luas potensi lahan budidaya laut yang ada.
- 3) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ngada yang dapat terpenuhi kondisi pada tahun 2015 sebanyak 28,83 kg/kapita, yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ngada melalui hasil tangkapan, budidaya dan pengolahan dari kebutuhan sebanyak 35 kg / kapita atau sebesar 82.37 persen.

4) Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2013 hanya sebesar 0.3 % masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Ngada. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan pengembangan perikanan tidak hanya dari perikanan laut tetapi juga dengan perikanan darat.

b. Pariwisata

Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kaya akan obyek wisata alam maupun budaya. Perkembangan pariwisata Kabupaten Ngada ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata alam dan budaya yang menarik seperti pemandian air panas Soa, TWAL 17 Pulau Riung, wisata gunung Inerie, Wolobobo dan Danau Wawomudha, wisata budaya berupa kampung-kampung tradisional yang sangat terkenal dengan kebudayaan megalitikumnya seperti kampung Bena, Gurusina, Tololela, Wogo, dll. Perkembangan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara selama periode 2014 sampai 2016 memperlihatkan kenaikan yang cukup baik. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan mencapai 91.182 jiwa atau meningkat sebesar 54.7 % dibandingkan tahun 2015. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah perlu melakukan promosi secara terus-menerus melalui brosur pariwisata, membuat paket perjalanan wisata, website, dll. Perbaiki sarana prasarana menuju lokasi pariwisata, menarik wisatawan dengan meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan agar wisatawan merasa aman dan tidak khawatir ketika berkunjung.

c. Pertanian

Potensi unggulan Kabupaten Ngada secara umum berada pada sektor Pertanian karena hampir 36,1% kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Ngada disumbangkan oleh Sektor Pertanian. Luas lahan untuk pertanian seluruhnya 94.142 Ha yang terdiri dari Lahan Sawah 6.413 Ha dan Lahan Bukan Sawah 87.729 Ha. Sektor ini disumbang oleh 3 sub sektor yakni :

Sub Sektor Tanaman Pangan:

Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan terhadap perekonomian daerah tahun 2013 sebesar 20,28% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 22,27%.

Dalam kurun waktu 2013-2016 produksi dan produktifitas tanaman pangan cenderung berfluktuasi. Potensi tanaman pangan di Kabupaten Ngada terdiri dari Padi Sawah, Padi Gogo, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kacang hijau, Ubi kayu dan Ubi Jalar, namun yang difokuskan disini adalah komoditi pangan nasional yaitu : Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE).

Tabel. 2.25

Data Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Ngada 2013 - 2016

NO	Uraian	Produksi (Ton)			
		2013	2014	2015	2016
a	Padi Sawah	43.648	46.109,46	45.893	62.038
b	Padi Gogo/Ladang	1.667	2.100	10.509	4.479
c	Jagung	14.749,7	27.577	44.857	26.595
d	Kedele	912	1.996,86	1.857	6.688

Sumber: BPS dan Dinas P3 , 2016

Sub Sektor Perkebunan

Peran sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ngada masih kecil, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 9,1% menjadi 9,4% di tahun 2013. Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Ngada, terdiri dari : Kopi, Kelapa, Cengkeh, Kakao, Kemiri, Jambu mete, Vanili, Lada dan Pala, namun yang lebih difokuskan disini adalah komoditi nasional, yaitu Kopi, Kelapa dan Kakao. Produksi dan produktifitas ke-3 komoditi tersebut, sebagai berikut:

Tabel. 2.26

Data Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2013-2016

No	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2013	2014	2015	2016
1	Kopi	3.305,00	3.687,34	3.748,80	3.459
2	Kelapa	4.599,00	3.984,00	2.365,20	2.212
3	Kakao	228,92	227,90	214,00	211

Sumber: BPS, 2013 – 2016

Sub Sektor Peternakan

Kontribusi Sub sektor peternakan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ngada cenderung meningkat dari tahun ketahun, dimana tahun 2010 sebesar 11,66% dan tahun 2013 sebesar 12,66%. Hal ini sebagai akibat bertambahnya populasi serta meningkatnya harga ternak. Potensi ternak di Kabupaten Ngada terdiri dari: Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Unggas, namun yang difokuskan disini 3 komoditi ternak yang menjadi komoditi unggulan nasional yaitu: Sapi, Kambing dan Babi. Ketiga komoditi ternak ini juga yang diintervensi melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) tahun 2011-2015. Produksi ketiga komoditi ternak tersebut, sebagai berikut:

Tabel. 2.27

Data Produksi Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2011-2015

No	Uraian	Produksi Ternak /Jumlah (Ekor)			
		2013	2014	2015	2016
1	Sapi	28.703	28.703	28.186	19.835
2	Kambing	22.038	20.717	21.581	23.850
3	Babi	94.401	104.643	116.266	48.014

Sumber Data : BPS , 2016

Walaupun Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberi kontribusi yang relatif besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ngada, namun rata-rata hasilnya belum optimal terutama pada komoditas tanaman pangan antara lain padi sawah, padi gogo, jagung, kedelei dan tanaman perkebunan kopi, kelapa dan kakao. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1).Keterbatasan pengetahuan petani, 2)Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah, 3).Kemampuan petani membeli saprodi masih rendah 4).Kurangnya pendampingan di lapangan, dan 5). Lemahnya kemampuan petani untuk mengakses Dana dari kelembagaan keuangan yang ada.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Listrik sebagai sumberdaya mempunyai peranan yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan akan listrik semakin bertambah dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk, namun demikian belum semua rumah tangga sudah terjangkau layanan listrik. Sampai dengan tahun 2016, dari total rumah tangga sebanyak 34.778 RT, terdapat 9.728 RT atau sebesar 27.97% RT yang tersebar di 12 kecamatan belum terlayani listrik. Pada tahun 2016 rasio elektrifikasi masih tetap di angka 72 %. Hal ini disebabkan penambahan pemasangan listrik pada 840 kk baru mencapai 500 kk yang terpasang dan sampai saat ini listrik yang terpasang belum menyala sehingga rasio elektrifikasinya masih sama. Sementara itu, kemampuan PLN untuk memperluas jaringan pada tahun 2016 masih terkendala karena kekurangan daya. Diharapkan pada Tahun 2019 PLN mampu mencukupi kebutuhan listrik masyarakat Ngada karena terjadi penambahan daya dari PLTP Daratei Mataloko.

e. Perdagangan

Sektor Perdagangan dalam struktur perekonomian Kabupaten Ngada menempati urutan ketiga dalam kontribusi terhadap PDRB dan Ngada cenderung meningkat, dimana tahun 2013 baru sebesar 11,99 % dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 7.8 %. Pelayanan Urusan Perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat. Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat

di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 35.13 persen, dimana sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan pembinaan kepada 3.547 dari 10.096 pedagang yang terdata oleh Disperindag.

f. Perindustrian

Kontribusi sector industry pada PDRB hanya 1.4 %, kontribusi ini diperoleh dari industri rumah tangga saja dengan pertumbuhan industri hanya mencapai 1.01 % saja. Sektor perindustrian yang ada hanya diarahkan untuk pembinaan kelompok usaha IKM yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang Industri Kecil melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 43 persen, dimana sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan pembinaan kepada 1.090 kelompok dari 2.559 kelompok yang terdata oleh Disperindag.

g. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah-daerah permukiman baru di daerah yang relatif jarang penduduknya; menyebarkan penduduk supaya merata dan seimbang di setiap wilayah; mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. Terdapat 3 lokasi transmigrasi di Kabupaten Ngada yakni: a) Satuan Pemukiman (SP) Maronggela dengan luasan 4.673 ha dan jumlah penduduk 220 KK, b) SP I Uluwae dengan luas wilayah 3200 ha dan jumlah penduduk 250 KK, c) SP II Uluwae dengan luas lahan 600 ha dan jumlah penduduk 50 KK. Sedangkan calon lokasi yang akan dikembangkan adalah: 1) Jeregheno dengan luasan potensial 246 ha dan daya tampung 100 KK; serta 2) Ngara dengan luasan 1000 ha dan daya tampung 500 KK.

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Terdapat beberapa tolok ukur kemampuan ekonomi daerah, yakni indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah, yang akan diuraikan berikut ini.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Tingkat Konsumsi Rumah Tangga ditunjukkan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain, diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan. Data rata-rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ngada selama periode tahun 2013 - 2015 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 54.5 persen pada tahun 2013 menjadi 50.9 persen pada tahun 2015. Sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan juga cenderung meningkat dari 45.5 persen menjadi 49 persen dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ngada semakin meningkat.

Tabel 2.28

Pengeluaran perkapita untuk makan dan non makan 2013 - 2015

No	Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah Pengeluaran
1	2013	265 186	221 335	486 521
2	2014	299 886	237 156	537 042
3	2015	364 341	350 912	715 253

Sumber : BPS, 2015

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga diluar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat diketahui dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

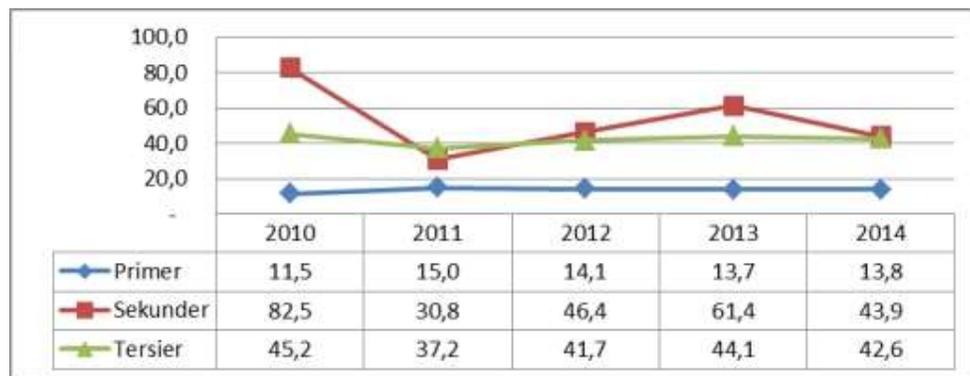
c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor perangkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor (9 sektor). Ke-9 sektor dimaksud, dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) sektor, yakni: (1) **sektor primer** yang meliputi: pertanian; (2) **sektor**

sekunder yang meliputi: pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan/konstruksi; (3) **sektor tersier** yang meliputi: perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 3 (tiga) sektor tersebut.

Berdasarkan data, di Kabupaten Ngada sektor sekunder lebih produktif dibanding dengan sektor lainnya, namun perkembangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sangat fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada grafik/tabel berikut:

Tabel 2.29
Produktivitas Per Sektor Tahun 2010 s.d 2014 (dalam jutaan)



Sumber : BPS , 2015

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Sarana Transportasi

Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ngada telah membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 544.65 km dari panjang jalan Kabupaten 1.042 km, sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui Roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 948.01 km dari panjang jalan 1.042 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan Kabupaten Ngada yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2021 seluruh jalan kabupaten akan diperbaiki.

Untuk sarana transportasi laut yang dimiliki cukup memadai. Kabupaten Ngada memiliki 3 Pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Maumbawa, Pelabuhan Aimere dan Pelabuhan Nangameze Riung. Pada Tahun 2018 akan dibangun lagi satu Pelabuhan barang di Pelabuhan Waebela. Diharapkan dengan keberadaan 4 pelabuhan tersebut arus lalu lintas barang dan orang akan lebih lancar. Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara Soa, yang memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1.500 meter, dengan 1 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi, antara lain : Trans Nusa, Wings Air, dan Susi Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan.

b) Sarana Telekomunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Tabel 6.7. menyajikan banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ngada menurut kepemilikan sarana komunikasi (telepon dan komputer), hasil Susenas 2013-2015. Dari Tabel 6.7. terlihat bahwa selama kurun tahun 2014-2015, rumah tangga di Kabupaten Ngada yang memiliki telepon rumah menurun dari 1,86 persen pada tahun 2014 menjadi 0,42 persen pada tahun 2015. Sedangkan rumah tangga yang memiliki komputer (PC dan laptop) mengalami peningkatan dari 11,49 persen pada tahun 2014 menjadi 13,77 persen pada tahun 2015. Sementara itu, untuk penggunaan/kepemilikan telepon selular (handphone/HP) bukan lagi dilihat per rumah tangga tetapi dari semua anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, akses masyarakat terhadap teknologi tersebut semakin luas dan mudah. Saat ini, HP tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, anak-anak pun sudah banyak yang menggunakan atau memiliki HP. Selain itu, HP juga sudah menjadi salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan karena kemudahan mobilitasnya dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun hiburan.

c) Perbankan

Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana terdapat 5 kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ngada saat ini, antara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank NTT. Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ngada selama periode 2010 - 2015 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

d) Fasilitas Penginapan dan Restaurant / Rumah Makan

Fasilitas penginapan dan restaurant merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ngada sebanyak 26 buah meningkat dari tahun 2015 sebanyak 24 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 287 kamar dan tempat tidur sebanyak 492 buah, sementara itu jumlah restoran kondisi tahun 2016 sebanyak 7 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 40 buah.

e) Air Bersih dan Listrik

Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 11.931 KK dari total jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 35.320 atau sebesar 66.22 persen, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penambahan jumlah rumah tangga pengguna air bersih menjadi sebanyak 25.780 KK atau sebesar 73 persen. Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2014, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 72.03 persen dimana terdapat sebanyak 25.050 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 34.778 rumah tangga yang ada dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 77 persen, dimana sebanyak 26.779 rumah tangga telah menggunakan listrik dari 34.778 rumah tangga yang ada.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a) Angka Kriminalitas

Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukkan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ngada secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukkan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ngada relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Sedangkan untuk data Demonstrasi / Unjuk Rasa Jumlah demonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2016 dan terdata oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Ngada, sebanyak 3 (tiga) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan pemindahan pasar.

b) Kemudahan Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Ngada cukup menjanjikan. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi investor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh KPTSP, berupa 7 layanan perijinan dengan kisaran waktu layanan antara 2 - 5 hari. Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukkan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 10 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 30 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan bea perolehan Hak Atas Tanah dan

bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Kabupaten Ngada penduduk yang berumur 10 tahun keatas menurut ijazah/pendidikan terakhir yang ditempuh dalam kurun waktu 2013-2016 masih didominasi oleh penduduk yang berijazah SD/Sederajat. Untuk penduduk yang berijazah S2 (pasca sarjana) cenderung mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan pihak swasta/donatur dibidang pendidikan untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa dan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan mayoritas penduduk bekerja sebagai tenaga usaha dibidang pertanian dan perikanan, atau dengan kata lain sektor pertanian dan perikanan memberikan kontribusi yang paling tinggi, sedangkan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, pekerjaan kasar, transportasi pada urutan kedua. Jenis pekerjaan utama yang paling sedikit dilakukan adalah tenaga usaha lainnya. Jika dilihat dari aspek gender, maka proporsi laki-laki masih dominan yang bekerja pada semua jenis pekerjaan utama.

2) Beban Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (*dependancy ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin

rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data, di Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, ratio ketergantungan penduduk relatif tinggi. Hal ini disebabkan masih tingginya jumlah penduduk yang belum produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dengan kalimat lain, masih tingginya persentase *dependency ratio* ini, maka masih tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2.2.2 Realisasi RPJMD

1. Capaian Indikator Makro RPJMD 2016 – 2021

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ngada 2016 - 2021 bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngada periode 2016 - 2021. Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ngada, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada periode 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dimaksud, juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 2.30
Target Makro RPJMD 2016-2021

1	Indeks Pembangunan Manusia	Mencapai Angka 65.10
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Belum mencapai target RPJMD karena ada kenaikan angka penduduk miskin dikarena perubahan indicator kemiskinan BPS
3	PDRB Per Kapita	Melampaui target RPJMD mencap angka Rp 18, 965,072
4	Kasus Kematian Ibu (kasus)	Belum mencapai target RPJMD 6 kasus
	Kasus Kematian Bayi (kasus)	Melampaui i target RPJMD 36 kasus
	Usia Harapan Hidup	Melampaui target RPJMD yakni 67,42
	Angka Gizi Buruk (kasus)	Belum mencapai target RPJMD ada 10 kasus
5	Pertumbuhan Ekonomi	Belum mencapai target RPJMD hanya mencapai 4,86
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Dilihat dari pencapaian pada misi ke 7 RPJMD yang dilaksanakan oleh BK Diklat, Bagian Organisasi, BP Litbang, Bagian Keuangan, Administrasi Pemerintahan Umum dan Administrai Pembangunan
7	Pembangunan Responsif Gender	Dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 31
Target Makro RPJMD 2016 -2021 dan Capaian pada tahun 2016

No	Uraian	Target 2021	Capaian 2016	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.56	65.1	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	9%	11.36%	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
3	PDRB Per Kapita	19,450,000	18,965,072	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
4	Kasus Kematian Ibu (kasus)	1	6	(-) Terjadi peningkatan kasus kematian diharapkan tahun 2021 terjadi penurunan
	Kasus Kematian Bayi (kasus)	20	36	(+)Trend terus mengalami penurunan pada jumlah kasus kematian
	Usia Harapan	68	67,42	(+)Trend terus mengalami

	Hidup			peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
	Angka Gizi Buruk (kasus)	0	10	(-) Terjadi peningkatan kasus gizi buruk diharapkan tahun 2021 terjadi penurunan
5	Pertumbuhan Ekonomi	5.73	4.86	(-) Terjadi penurunan
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ngada telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ngada mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2014. Selain itu pada saat ini sedang dikembangkan <i>e_planning</i> , <i>e_budgeting</i> dan <i>e_procrutment</i> bekerja sama dengan Pemda Batang Provinsi Jawa Tengah		
7	Pembangunan Responsif Gender	Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan mengembirakan. Pada tahun 2016 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 56,98% atau sebanyak 2,410 orang perempuan dari 4,229 orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten Ngada. Selain itu saat melakukan asistensi selalu disertakan dengan Analysis Gender untuk setiap SKPD. Tambahan lagi penyusunan RKA masing – masing PD yang selalu dilengkapi dengan analisis gendernya.		

2. Capaian masing – masing Indikator

Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : interval $91\% \leq 100\%$ sangat tinggi (ST), $76\% \leq 90\%$ tinggi (T), $66\% \leq 75\%$ sedang (S), $51\% \leq 65\%$ rendah (R) dan $\leq 50\%$ sangat rendah (SR).

a) Capaian Visi dan Misi RPJMD 2016 – 2021

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dan masa transisi untuk melaksanakan kinerja target pencapaian visi dan misi Kabupaten Ngada tahun 2016-2021.

Tabel 2.32

Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2016-2021

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Visi	Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	83.34	Tinggi	776 Indikator Kinerja yang ditetapkan, sebesar 83.34%
Misi 1	Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan	81.11	Tinggi	MISI 1 : 108 Indikator Kinerja 5 Indikator Melampaui Target 7 Indikator Mencapai Target 13 Indikator Meningkatkan, 17 Indikator Menurun dan 61 Indikator Tetap
Misi 2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.	87.62	Tinggi	MISI 2 : 105 Indikator Kinerja 3 Indikator Melampaui Target 7 Indikator Mencapai Target 5 Indikator Meningkatkan, 11 Indikator Menurun dan 77 Indikator Tetap

Misi 3	Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.	84.76		MISI 3 : 82 Indikator Kinerja 1 Indikator Melampaui Target 9 Indikator Mencapai Target 0 Indikator Meningkat, 11 Indikator Menurun dan 79 Indikator Tetap
Misi 4	Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.	68.57	Sedang	MISI 4 : 70 Indikator Kinerja 0 Indikator Melampaui Target 5 Indikator Mencapai Target 1 Indikator Meningkat, 14 Indikator Menurun dan 42 Indikator Tetap
Misi 5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.	87.59	Tinggi	MISI 5 : 145 Indikator Kinerja 2 Indikator Melampaui Target 11 Indikator Mencapai Target 12 Indikator Meningkat, 32 Indikator Menurun dan 102 Indikator Tetap
Misi 6	Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarkaat	88.51	Tinggi	MISI 6 : 87 Indikator Kinerja 2 Indikator Melampaui Target 5 Indikator Mencapai Target 9 Indikator Meningkat, 13 Indikator Menurun dan 61 Indikator Tetap

Misi 7	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	85.26	Tinggi	MISI 7 : 156 Indikator Kinerja 1 Indikator Melampaui Target 9 Indikator Mencapai Target 3 Indikator Meningkat, 11 Indikator Menurun dan 120 Indikator Tetap
-----------	---	-------	--------	---

c) Capaian Sasaran RPJMD

Capaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masing - masing sasaran setiap misi.

Capain Kinerja Visi Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** dengan mengusung 7 (Tujuh) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja 95 Indikator Kinerja Pembangunan (outcomes), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, kondisi sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Terdapat 27 sasaran, 65 program dan 95 indikator kinerja dalam RPJMD 2016 - 2021, untuk Misi 1 terdapat 5 sasaran dan 8 indikator, untuk Misi 2 terdapat 5 sasaran dan 20 Indicator, untuk Misi 3 terdapat 3 sasaran dan 9 indikator, untuk Misi 4 terdapat 3 sasaran dan 11 indikator, untuk Misi 5 terdapat 3 sasaran dan 20 indicator, untuk Misi 6 terdapat 4 sasaran dan 8 indikator serta untuk Misi 7 terdapat 4 sasaran dan 19 indikator.
- Hasil evaluasi masing-masing PD terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016 – 2021 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2016, Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Tidak ada SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH;
 - b. 2 (dua) SKPD tingkat capaian kinerja RENDAH;
 - c. 2(dua) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG;
 - d. 15 (lima belas) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan

- e. 8 (delapan) SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT TINGGI.
- Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021, secara kuantitatif sebagai berikut :
 - Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ngada, sebesar 83.34 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 1, sebesar 81.11 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 2, sebesar 87.62 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 3, sebesar 84.76 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 4, sebesar 68.57 persen dengan Kategori SEDANG;
 - Capaian Misi 5, sebesar 87.59 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 6, sebesar 88.51 persen dengan Kategori TINGGI;
 - Capaian Misi 7, sebesar 85.26 persen dengan Kategori TINGGI

Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD 2016 -2021 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2016-2021 menurut SKPD

Visi / Misi / SKPD	Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2016 - 2021												
	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Indikator	Tetap	Menurun	Meningkat	Belum mencapai	Mencapai target	Melampaui Target	% Capaian	Kriteria
	Rutin	Urusan	Rutin	Urusan									
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	49	57	390	189	776	542	109	43	33	53	14	83.34	Tinggi
1 Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan	10	8	68	31	108	61	17	13	5	7	5	81.11	Tinggi
a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3	15	9	30	18	4	1	3	2	2	76.67	Tinggi
b Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	2	2	15	2	4	1	0	1	1	0	1	75.00	Sedang
c Dinas ESDM	2	1	12	14	31	6	12	11	0	0	2	61.29	Rendah
d Dinas Lingkungan Hidup	2	1	14	5	27	23	1	0	1	2	0	92.59	Sangat Tinggi
e Dinas PMD P3A	2	1	12	1	16	13	0	0	0	3	0	100.00	Sangat Tinggi
2 Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.	5	10	55	39	105	77	11	5	2	7	3	87.62	Tinggi
a Dinas Pertanian	1	5	13	19	35	29	2	1	1	1	1	91.43	Sangat Tinggi
b Dinas Peternakan	1	1	13	9	23	14	4	3	1	1	0	78.26	Tinggi
c Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1	15	1	19	13	2	1	0	1	2	89.47	Tinggi
d Dinas Pariwisata	1	3	14	10	28	21	3	0	0	4	0	89.29	Tinggi

Visi/Misi/SKPD	Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2016 - 2021												
	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Indikator	Tetap	Menurun	Meningkat	Belum mencapai	Mencapai target	Melampaui Target	% Capaian	Kriteria
	Rutin	Urusan	Rutin	Urusan									
3 Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.	9	8	70	13	105	79	11	0	5	9	1	84.76	Tinggi
a BPLitbang	2	1	14	1	18	12	3	0	1	2	0	77.78	Tinggi
b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1	15	1	19	14	2	0	2	1	0	78.95	Tinggi
c Dinas Perhubungan	1	2	14	5	22	15	4	0	1	2	0	77.27	Tinggi
d Badan Lingkungan Hidup	2	1	14	1	23	20	1	0	1	1	0	91.30	Sangat Tinggi
e Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	2	3	13	5	23	18	1	0	0	3	1	95.65	Sangat Tinggi
4 Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.	4	4	32	29	70	42	14	1	8	5	0	68.57	Tinggi
a Dinas Pendidikan	2	3	15	28	50	25	14	1	8	2	0	56.00	Rendah
b Bagian Keuangan	2	1	17	1	20	17	0	0	0	3	0	100.00	Sangat Tinggi
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.	4	11	25	33	145	102	32	12	1	11	2	87.59	Sedang
a Dinas Kesehatan	2	9	11	28	50	28	22	5	1	8	1	84.00	Sedang
b RSUD Bajawa	0	1	0	1	73	60	10	2	0	1	0	86.30	Tinggi
c Dinas KCS	2	1	14	4	22	14	0	5	0	2	1	100.00	Tinggi
6 Menanggulangi bencana alam, non alam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat; serta	6	4	44	12	87	61	13	9	5	5	2	88.51	Tinggi
a BPBD	2	1	14	5	22	15	2	5	1	1	1	100.00	Sangat Tinggi
b Dinas Sosial	2	2	14	6	24	20	1	1	1	1	1	95.83	Tinggi
c Kesbanginmas	2	2	14	6	24	14	8	2	2	2	0	75.00	Sedang
d Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1	16	1	17	12	2	1	1	1	0	82.35	Tinggi
7 Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.	11	12	96	32	156	120	11	3	7	9	1	85.26	Tinggi
a BK Diklat	1	3	14	9	27	20	2	1	2	2	0	85.19	Tinggi
b Bagian Organisasi	2	2	12	2	23	20	0	0	1	2	0	95.65	Sangat Tinggi
c Dinas PUPR	1	1	13	2	17	13	2	0	1	1	0	82.35	Tinggi
d BP Litbang	2	2	14	2	26	20	3	1	1	1	0	84.62	Tinggi
e Inspektorat	2	1	16	7	20	14	2	0	2	1	0	75.00	Sedang
f Bag.Administrasi Pembangunan	2	1	14	4	21	16	2	0	0	1	0	80.95	Tinggi
g Pemerintahan Umum	1	2	13	6	22	17	0	1	0	1	1	90.91	Sangat Tinggi

Tabel 2.34
Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian (Persen)	Status	SKPD
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan									
1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik									
1	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Km	466,74	506,74	544,65	107,48	Melampaui Target	Dinas PUPR
2	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89,73	89,73	90,98	101,39	Melampaui Target	Dinas PUPR
2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada									
1	Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	Persentase	72,03	77	72	93	Belum mencapai Target	Dinas ESDM
2	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66,22	72,98	73	101,39	Mencapai Target	Dinas PUPR

		Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	0	0	0.00	Tetap	Dinas PUPR
		Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah Sumber Mata Air , Lahan Kritis dan Rawan abrasi	Persentase	44.60%	55%	53	96,36	Belum mencapai Target	BLHD
		Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	151	10	6.6	Belum mencapai Target	BPMPDPP
3	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	0	0	0.00	Tetap	Dinas PUPR

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai. Tanaman Perkebunan : Kopi, Peternakan : Sapi, Kambing, Babi

1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100	100	100	100	Mecapai Target	BP3KP
---	---	---------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	----------------	-------

		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan							
		Tanaman Pangan :							
		<i>Padi</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.8</i>	<i>3.8</i>	9,84	258	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		<i>Jagung</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.6</i>	<i>2.5</i>	3,85	154	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		<i>Kedele</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>2.85</i>	<i>2.85</i>	4,68	164	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		<i>Kacang Merah</i>	<i>Ton</i>	<i>1751</i>	<i>480</i>	528.60	110	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:							
		<i>Kopi</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>0.82</i>	<i>0.86</i>	<i>0.86</i>	100	Mencapai Target	Dinas Pertanian
		Panjang Jaringan Irigasi yang dalam Kondisi Baik	Meter	33,513	40,513	44,237	109	Melampaui Target	Dinas PU
		Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan	Ha	0	100	100	100	Mecapai Target	Dinas Pertanian

		produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan							
		Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	UPH	0	6	5	83	Belum mencapai Target	Dinas Pertanian
		Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan	Ha						
		Tanaman Pangan:							
		<i>Padi sawah</i>	Ha	6,413	0	88	880	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		<i>Jagung</i>	Ha	12,469	0	0	100	Tetap	Dinas Pertanian
		<i>Kedele</i>	Ha	652	0	0	100	Tetap	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:							
		<i>kopi</i>	Ha	6356.6	6.456,6	6.462	100	Tetap	Dinas Pertanian
		Adanya peremajaan tanaman kopi	Ha	381.97	100	100	100	Mencapai Target	Dinas Pertanian
		Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	Ton/Tahun						
		Tanaman Pangan:							

		<i>Padi</i>	<i>Ton/Tabun</i>	45,893	57.288	66,517	116	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		<i>Jagung</i>	<i>Ton/Tabun</i>	44,857	47.319,3	26,595	56	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
		<i>Kedele</i>	<i>Ton/Tabun</i>	1,857	2.818,8	6.688,9	237	Melampaui Target	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:							
		<i>kopi</i>	<i>Ton/Tabun</i>	3748.8	3.929,34	3,459	88	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Areal Produksi Hortikultura	Hektar	35	16	30	187	Melampaui Target	BP3KP
		Adanya Peningkatan populasi Ternak :	<i>Ekor</i>						
		<i>sapi</i>	ekor	28.186	29.549	19.835	67	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
		<i>kambing</i>	ekor	21.581	23.581	22.897	97	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
		<i>babi</i>	ekor	116.266	117.266	48.014	40,9	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
		Tersedianya Modal	UPH	0	0	30	100	Melampaui	Dinas

		Usaha untuk 30 Kelompok						Target	Pertanian
		Tersedianya Tatakelola MPIG sabagai Institusi pemegang hak indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	0	0	0	Tetap	Dinas Pertanian
2	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Presentase produksi kelapa olahan (Jumlah Kelapa Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	0	0	Tetap	Dinas Pertanian
		Persentase produksi pisang olahan (Jumlah Pisang Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	0	0	Tetap	Dinas Pertanian
		Jumlah Gabungan kelompok tani pelaku agribisnis yang terlatih	Kelompok Tani	0	109	20	18.3	Belum Mencapai Target	Dinas Pertanian
3	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	Lokasi	1	2	3	150	Melampaui Target	Dinas P2KI
		Meningkatnya kemitraan Promosi Pariwisata	Lembaga	2	2	4	200	Melampaui Target	Dinas P2KI

		Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	Even	5	6	5	83	Belum Mencapai Target	Dinas P2KI
		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	6	5	83	Belum Mencapai Target	Dinas P2KI
4	Meningkatkan dan Mempertahankan Keberagaman Flora	Tersedianya Dokumen Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Dokumen	0	0	0	0	Tetap	Bappeda
2 :Menciptakan sistem tataniaga pasar									
1	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Meningkatnya Penataan Distribusi Barang dan Jasa	Paket	0	0	0	0	Tetap	Dinas Koperasi UMKM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.

1. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung									
1	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	Tersedianya dokumen Penataan Ruang Kota	Dokumen	1 dokumen dari 13 dokumen	0	0	0	Tetap	Dinas PUPR dan Bappeda
		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	0	0	0	Tetap	Dinas PUPR dan Bappeda
		Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1.93	0	0.93	0.15	Belum mencapai Target	Dinas PUPR
		Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	23	16	69,6	Belum mencapai Target	Dinas PUPR
		Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66.10%	84,9	100	117	Melampaui Target	BLHD
		Persentase sampah yang diolah pada TPST	Persentase	10	20	0	0	Belum mencapai Target	BLHD
2	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100	96.6	96.6	Belum mencapai Target	Dinas P2KI
		Tersedianya trayek angkutan dalam kota bajawa	jumlah trayek	2	2	2	100	Tetap	Dinas P2KI

2. Meningkatkan Kemampuan usaha ekonomi masyarakat Perkotaan									
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Persentase	7,46 % (dari 2.146 UMKM)	12,46 % (dari 2.316 UMKM)	12,46	100	Mencapai Target	Dinas KopUMPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	6	7	8	9	11	12	13	14
Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.									
1. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul									
a	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar	Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	na	43,55	43,46	99,79	Belum mencapai Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar TKK/PAUD	Prosentase	na	45,84	49,23	107,39	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya angka	Prosentase	na					

		partisipasi murni							
		SD		86.15	100	92,23	92,23	Belum mencapai Target	Dinas Pendidikan
		SMP		57.7	57.7	71,80	124	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase						
		SD		100.86	100	103,20	103,2	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		SMP		86.46	86.46	79,74	92,23	Belum mencapai Target	Dinas Pendidikan
b	Meningkatnya kualitas Siswa	Meningkatnya Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru		4	5,0	5,4	108	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	na	6,6	6.91	104,7	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	na	6,6	6,64	100,60	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
2. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi									
a	Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang	2000	100	5	0	Belum Mencapai Target	BKDiklat a

		Jumlah Hibah Pemda	Rupiah	0	0	0	1.7 M	Melampaui Target	Bagian Keuangan
		Jumlah Tenaga Dosen	Orang	123	123	53	43	Belum Mencapai Target	BKDiklat a
		Jumlah Aset Bidang Tanah	Bidang	1	0	0	0	Tetap	Bagian Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.									
1. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jumlah/jenis obat yang tersedia/jumlah obat yang dibutuhkan x 100)	Persen	95,43	96.34	96	99,64	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar (jumlah							

		sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)							
		Puskesmas	Buah	14	14	14	100	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Pustu	buah	24	24	32	133	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Pusling	Buah	11	16	14		Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Presentase ketersediaan Sarana Pendukung Pembangunan RSUD (jumlah ketersediaa sarana pendukung/Total Srana Pendukung)X100	Persen	0	0	0	0	Tetap	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:							
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	Persen	16.64	16,31	14	116.5	Melampaui Target	RSUD

		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0.42	0,87	1.50		Melampaui Target	RSUD
		-Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat	Persen	90,09	92,07	93,82	101.9	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	Persen	100	100	100	100	Mencapai Target	RSUD
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103.7	100	75,97	75.97	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		- Cakupan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	4.14	3,75	0.81	462	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	Persen	62,59	63,7	57,15	89.7	Belum Mencapai Target	RSUD
		• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien	Hari	3.48	6	3,12	192	Melampaui Target	RSUD

		dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari)							
		• TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari)	hari	2.07	1,97	2,33	118	Melampaui Target	RSUD
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	kali	65.83	62,36	67,26	92.7	Belum Mencapai Target	RSUD
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28,800/1000	28,300/1000	28,290/1000	99.9	Melampaui Target	RSUD
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan	Persen	17,48/1000	16,99/1000	15,69/1000	92.34	Melampaui Target	RSUD

		kurang dari 48 jam)							
		Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/Total jumlah sarana x 100)	Persen	0	0	0	0	Tetap	RSUD
		Menurunnya Kasus kematian Ibu	Kasus	3	4	6	66.7	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Menurunnya Kasus kematian Bayi	Kasus	51	40	36	111	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Menurunnya Kasus Kematian Anak	Kasus	54	47	7	671	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan rujukan masyarakat Ngada	Persen	109	100	75.97	75,97	Belum Mencapai Target	RSUD
		Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM sesuai standar minimal/Total SDM yang adax100)	Persen	5.1	24,08	79	328	Melampaui Target	Dinas Kesehatan dan RSUD

2	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)	Persen	70.86	73,86	75	101.5	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	38	38	100	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
3	Meningkatkan kualitas keluarga	Prosentase KB Aktif (Jumlah Peserta KB Aktif/Total PUSX100)	Persen	46.18	49,3	52,33	106	Melampaui Target	Dinas KCS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	6	7	8	9	11	12	13	14

Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat

1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam

	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana Non Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	100	Mencapai Target	BPBD
		Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	Bencana	100	100	0	0	Tetap	BPBD
2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosial									
	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	56,24	113	200	Melampaui Target	Dinas Sosnake-trans
		Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	persen	25	37	38	102	Melampaui Target	Dinas Sosnake-trans
3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan									

	Terjalannya Kemitraan yang Harmonis	Terciptanya Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase	100	100	100	100	Mencapai Target	Kesbangp olinmas
		Terjalannya Kerjasama Penelitian Bidang Kebudayaan	Unit	30	30	30	100	Tetap	Dinas PKPO
		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase	80	80	80	100	Tetap	Kesbangp olinmas
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)									
	Memasyarakatkan Olah raga dan Mengolahragakan masyarakat	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Dokumen	0	0	0	0	Tetap	Dinas PUPR

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Realisasi RPJMD Tahun 2016	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
	2	6	7	8	9	11	12	13	14

Misi Ketujuh: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Berkurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Daerah yang belum mengikuti Diklat Kepmimpinan	Jumlah Orang	341	308	271	87	Belum Mencapai Target	BK Diklat
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah melalui Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Orang	123	133	148	111	Melampaui Target	BK Diklat
		Berkurangnya sarana dan parasarana Pemerintahan yang tidak memadai	unit	5	4	2	50	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR

		Terselenggaranya pemerintahan daerah melalui penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah	34	34	34	100	Mencapai Target	Bagian Organisasi
	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Tertatanya sistem Perijinan yang terpadu	Persen	0	0	0	0	Tetap	Sintap
		Tersedianya Sistem Informasi perencanaan Pembangunan daerah	Sistem	0	0	0	0	Tetap	Bappeda
		Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	0	100	99,25	99.25	Belum Mencapai Target	Adm Pembangunan
		Tertatanya sistem Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persen	0	0	0	0	Tetap	Dinas PPKAD
		Tertatanya Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	0	0	0	Tetap	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Koodinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana Dalam	kali	2	2	2	100	Mencapai Target	Bappeda

		Pembangunan Daerah							
		Meningkatnya Keterisian data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumlah Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40,18	52,8	81,32	154	Melampaui Target	Bappeda
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatnya Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Skala	WDP	WDP	WDP	100	Mencapai Target	Inspektora
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	232	232	100	Melampaui Target	Inspektora
		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 3.2000	62,67	88,5	141	Melampaui Target	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Skala	C	CC	CC	100	Mencapai Target	Bagian Organisasi

	Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Desa/Kel	151	151	151	100	Mencapai Target	BPMPDPP
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi	Persentase	33.33	33,33	0	0	Belum Mencapai Target	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten	Persentase	0	0	0	0	Tetap	Adm Pemerintahan
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Persentase	0	0	0	0	Tetap	Adm Pemerintahan

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021 berdasarkan analisa-analisa diatas adalah sebagai berikut :

1. Peran sector Primer dalam Pembentukan PDRB masih sangat dominan walaupun dari tahun 2010 sampai Tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun belum mampu mendorong peningkatan kontribusi sector sekunder berupa industry-industri olahan secara signifikan.
2. Masih rendahnya tingkat Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Ngada walaupun masih lebih tinggi dari pendapatan per kapita Provinsi NTT, namun pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Ngada masih belum mampu mengakses kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
3. Masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Ngada. Berdasarkan data BPS Tahun 2016 terdapat 11,35 % Penduduk Kabupaten Ngada masih tergolong miskin. Walaupun secara absolute jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun Pemerintah Kabupaten Ngada berkewajiban memberikan sentuhan bagi penduduk miskin di Kabupaten Ngada.
4. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Kabupaten Ngada yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pekerja di Kabupaten Ngada yang berdampak pada rendahnya keterampilan tenaga kerja.
5. Masih banyaknya penduduk usia produktif terutama kaum perempuan yang bekerja pada sektor Informal dengan status pekerja yang tidak dibayar.
6. Masih terbatasnya akses masyarakat usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terutama di jenjang SMP, SMA dan SMK yang ditunjukan oleh rendahnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar pada jenjang tersebut.
7. Rata-rata Lama Sekolah yang masih sangat singkat, dimana rata-rata masyarakat Kabupaten Ngada hanya sampai pada bangku kelas satu SMP.
8. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ngada, dimana masih jauh dari target SDG's pada tahun 2016
9. Terbatasnya Jumlah dan kompetensi Tenaga Kesehatan terutama di sarana kesehatan dasar seperti Puskesmas, dan Pustu.
10. Terbatasnya ketersediaan Rumah layak Huni bagi masyarakat.

11. Terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, antara lain penggunaan air bersih oleh masyarakat pada umumnya, yang saat ini konsumen air leding sangat terbatas.

2.3.2 Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah, meliputi : 1) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 2 (dua) aspek yaitu pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan; sedangkan kemampuan penyelenggaraan otonomi terkait dengan permasalahan layanan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 7 urusan pilihan yang dilaksanakan.

Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.35
Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Kriteria/Aspek/Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN		
a	Keselarasn dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ngada dan pemerintah pusat dan provinsi NTT
b	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ngada dan pemerintah pusat dan provinsi NTT
c	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak	Komunikasi efektif dengan DPRD

d	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusa	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak	Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan
e	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan	Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak	Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum
f	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Belum dilakukan secara efektif	Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngada
g	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran	Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran
h	Pengelolaan potensi daerah	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah	Kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan potensi daerah
2 TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN			
a	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak ada permasalahan. Seluruh urusan pemerintah terutama urusan wajib dilaksanakan dengan baik	Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib.
b	Penataan kelembagaan daerah	Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan	Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan
c	Pengelolaan kepegawaian daerah	Sistem kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi	Penyempurnaan sistem pengelolaan kepegawaian

d	Perencanaan pembangunan daerah	Kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi
		Dokumen rencana belum menjadi acuan dalam penyusunan anggaran	Diklat teknis perencana daerah
		Belum meratanya kapasitas perencana pada PD	Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan BP Litbang
e	Pengelolaan keuangan daerah	Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik.	Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel
		Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD	Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah
		Tingginya SiLPA	
f	Pengelolaan barang milik daerah	Kapasitas SDM pengelola barang di PD kurang memadai	Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang
		Pengelolaan administrasi barang	
g	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang Integrasi	Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

Tabel 2.36.

Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
1	Kesejahteraan Masyarakat	
	Pertumbuhan Ekonomi	Masih rendah pada angka 5,86%, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum kuat struktur perekonomian

Pendapatan Per Kapita	Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang
Inflasi	Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa
Kemiskinan	Angka kemiskinan masih tinggi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin)
Pengangguran	Masih tingginya angka pengangguran (1.3%) Pengangguran terbuka
2 Pelayanan Umum	
A Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1 Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat anak usia sekolah yang belum tertampung baik di SD, SMP maupun SMA serta keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang tergambar dari Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Rata-Rata Harapan Sekolah. Belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan
2 Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Rasio tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan ini terlihat dari kondisi terakhir tahun 2016, rasio dokter di Kabupaten Ngada adalah 33/100.000 penduduk, atau satu orang dokter melayani 4.820 penduduk. Sedangkan jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 167 orang dengan rasio sebesar 1,05 per seribu penduduk, sementara itu rasio Perawat sebesar 0.94 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 150 orang, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak 159.070 jiwa. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi yang tinggi dalam belum mencapai target RPJMD Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat.

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai sampai di daerah kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditunjukkan dengan masih terdapatnya 9.02 % dari total panjang jalan Kabupaten Ngada yang belum terhubung. • Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan. Pada tahun 2015 ada sekitar 55.862 jiwa atau 33.78 % penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih. Masih 78,16 % penduduk yang belum terlayani sampai pada sambungan rumah.
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni yaitu terdapat 24,31% rumah tidak layak huni sesuai dengan standar kesehatan • Masih terdapat 27,97 % atau 9.728 RT yang belum terlayani listrik
5	Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat pelanggaran terhadap PERDA yang sudah ditetapkan • Masih Terbatasnya Jumlah dan kompetensi POL PP
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua PMKS memperoleh Bantuan karena keterbatasan Sumber Daya • Masih Banyak Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia yang belum menerima Jaminan Sosial
B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	Mayoritas bekerja pada sector pertanian, perlu pengembangan sector sekunder (Pengolahan berbasis pertanian) yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara signifikan.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keterbatasan SDM untuk menangani permasalahan perempuan dan anak

3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan petani masih rendah • Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan • Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan • Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik
4	Pertanahan	Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga • kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS
6	Administrasi kependudukan dan catatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. • Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum kompetennya aparaturnya dan kelembagaan desa/kelurahan.
8	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif • Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program
9	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk 3 pelabuhan laut (pariwisata, barang dan penumpang) • Terminal dalam kabupaten belum optimal difungsikan • Terbatasnya SDM Aparatur dalam melakukan uji KIR, Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji KIR
10	Komunikasi dan Informatika	Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan

		Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. • Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha • Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha
12	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur dasar wilayah) • Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi • Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai • Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan
13	Kepemudaaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua cabang olahraga dibina secara professional. • Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan
14	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh • Ketidaktepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait • Lemahnya koordinasi pengumpulan dan updating data tingkat kabupaten • Belum adanya peraturan local tentang management data dan database kabupaten
15	Persandian	Masih minimnya aparat dan sarana dan prasarana persandian
16	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya perawatan terhadap situs-situs yang ada, • Keterbatasan SDM Juru rawat Situs Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk

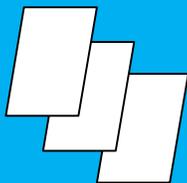
		<p>perawatan situs-situs yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyelenggaraan Festival Kebudayaan di Kabupaten Ngada
17	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Judul dan jumlah buku yang belum memadai • Mininmya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan • Penyediaan pustaka/buku yang menggunakan teknologi informasi
18	Kearsipan	<p>Belum optimalnya penataan arsip di PD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan</p>
C Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah tangkapan ikan, rendahnya daya beli masyarakat, sarana dan prasarana penangkapan ikan yang masih terbatas, • Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan Budi daya, terbatasnya kualitas SDM Masyarakat, terbatasnya SDM Aparatur penyuluh perikanan, Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi penyuluh perikanan • Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, terbatasnya kualitas SDM Nelayan, terbatasnya SDM Aparatur penyuluh perikanan, Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi penyuluh perikanan
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sangat terbatasnya destinasi pariwisata yang telah ditata secara baik yang memancing kunjungan wisatawan • Masih kurangnya promosi pariwisata yang terintegrasi dengan kabupaten sekitar
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pengetahuan petani • Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah • Kemampuan petani membeli saprodi masih rendah • Kurangnya pendampingan di lapangan • Lemahnya kemampuan petani untuk mengakses Dana dari kelembagaan keuangan yang ada. • Masih terbatasnya sumber air untuk irigasi sawah, belum tersedianya sarana irigasi yang

	<ul style="list-style-type: none"> • memadai untuk mengairi sawah. • Keterbatasan pupuk untuk petani • Masih sangat terbatasnya pengolahan Komoditi Jagung yang mampu memberikan nilai tambah dari komoditi ini. Rata-rata komoditi jagung masih dijual gelondongan yang menyebabkan harga jagung menjadi tidak berkembang dengan baik • Kontribusi Sektor Pertanian masih cukup tinggi yang menandakan bahwa sektor lainnya (Sekunder) masih belum berkembang baik sehingga perlu upaya untuk bisa menciptakan nilai tambah sektor pertanian • Masih Banyak Tanaman Kopi yang perlu peremajaan • Prosedur Pemetikan Kopi masih banyak yang belum sesuai standar • Perkebunan Kopi, kedelai, kakao dan kelapa yang ada saat ini masih dikelola secara konvensional
4	Energi dan Sumberdaya Mineral <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Sumber Daya Penghasil Listrik • Keterbatasan Kemampuan Masyarakat untuk Mengakses Listrik • Belum signifikannya perkembangan sektor sekunder (Pertambangan) di Kabupaten Ngada
5	Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. • Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku • Belum tertatanya sistem perdagangan di Kabupaten Ngada melalui tata niaga yang teratur
6	Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> • Sektor Industri di Kabupaten Ngada belum berkembang dengan baik, rata-rata industri olahan untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian masih rendah, kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai tambah dan keterbatasan sarana pendukung lainnya • Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. • Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.
7	Transmigrasi <p>Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada</p>

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN NGADA TAHUN 2018**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi
3.2. Kebijakan Keuangan
Daerah**

BAB III



**RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN**

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 harus mengacu kepada Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Nasional yang dikenal dengan sebutan NAWACITA Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 dan juga kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diprediksikan sebesar 5,3%. Prediksi ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi RI selama 2016 sebesar 5,02%. PDB Indonesia diperkirakan akan naik ke 5,3% di tahun 2017 yang didukung oleh beberapa katalis positif, yakni berlanjutnya tren belanja infrastruktur Pemerintah. Adanya kebijakan suku bunga rendah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Hingga saat ini, Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan 7 Day Reverse repo Rate sebesar 4,75%; serta adanya peningkatan investasi pasca serangkaian kebijakan paket stimulus yang memberikan iklim investasi yang lebih kondusif. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5%-5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI selama 2016 sebesar 5,02%. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi pada 2015 yang sebesar 4,88%. Untuk APBN 2018 Presiden menginstruksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Di tingkat Regional, pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,18% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,11 %.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar 4,86%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 4,83%. Pertumbuhan Ekonomi Ngada dalam kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 4-5%. Pergerakan ekonomi Ngada cenderung melambat. Kabupaten Ngada menyumbang 3,5% bagi ekonomi NTT, di atas sumbangan Nagekeo dan Manggarai Timur, namun masih dibawah Kabupaten Ende yang berkontribusi sebesar 6%. Dari aspek rata-rata pertumbuhan, Ngada masih unggul atas Kabupaten Ende, Manggarai Timur maupun Nagekeo. Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara regional kewilayahan, Ngada memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif, di Kawasan Flores bagian Tengah.

Perekonomian Kabupaten Ngada masih didominasi sektor primer dengan kecenderungan pergeseran dari sektor primer kesektor tersier. Sektor sekunder belum

cukup berkembang, sehingga belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja formal yang beralih dari sektor primer. Padahal dari data pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektoral, serta elastisitas terhadap kesempatan kerja, terlihat bahwa sub-unsur sektor sekunder sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan kesempatan kerja secara konstan kedepan.

Pola kebijakan alokasi anggaran Kabupaten Ngada tahun 2016 dan 2017 yang difokuskan pada infrastruktur (Misi I), serta meningkatnya pola alokasi dana desa yang juga secara umum masih difokuskan pada belanja infrastruktur dasar desa, diprediksikan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Ngada ke tingkat yang lebih baik. Alokasi belanja modal yang menggambarkan investasi pemerintah tahun 2017 meningkat sebesar 15% dibanding pada tahun 2016, meskipun secara total belanja pemerintah mengalami penurunan 8,7%. Dengan pola alokasi pada tahun 2017 yang masih fokus di infrastruktur maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diprediksikan sebesar 5,17%; sedangkan tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,36%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2017 serta Perkiraan Tahun 2018

Tantangan Perekonomian Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2017 dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi Internal dan dari sisi eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat peta kekuatan dan kelemahan kita sedangkan dari sisi eksternal dapat dilihat sejumlah peluang dan tantangan pada skala regional dan Nasional. Oleh karena itu dari sisi internal kita dapat melihat kelemahan-kelemahannya yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan aksesibilitas antar wilayah utara, selatan maupun menuju daerah-daerah potensial, yang mendorong adanya ekonomi biaya tinggi, sehingga berdampak pada terbatasnya konsumsi dan investasi masyarakat.
2. Investasi sektor swasta masih sangat terbatas, sehingga tidak cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor sekunder maupun tersier. Investasi di sektor ini masih didominasi oleh investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah melalui belanja modal.
3. Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi termasuk terbatasnya sarana prasarana ekonomi daerah dan keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber permodalan.

Kabupaten Ngada memiliki sejumlah potensi yang bisa diandalkan dan menjadi kekuatan yang bisa diandalkan. Kekuatan dan peluang yang dimiliki adalah:

- a. RPJMD 2016-2021 telah menetapkan pembangunan infrastruktur dasar (Jalan, Air, Listrik) menjadi prioritas pembangunan, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi pemerintah dan swasta di sektor tersebut.
- b. Peningkatan transfer pemerintah ke desa melalui Dana Desa, mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah desa secara merata di seluruh desa, sehingga berdampak pada peningkatan konsumsi maupun investasi di tingkat desa.
- c. Potensi sector pertanian yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas pertanian terutama pada komoditi-komoditi unggulan merupakan potensi yang bisa terus dikembangkan.
- d. Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngada, sebagai titik penghubung regional Flores untuk dua destinasi unggulan wisata dunia yakni Labuhan Bajo dan Kelimutu, telah memberi dampak pada peningkatan sektor pariwisata di Ngada.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Proyeksi keuangan daerah dilakukan untuk memperkirakan kemampuan penerimaan daerah (Pendapatan dan pembiayaan), sebagai pertimbangan untuk merencanakan pendanaan pembangunan. Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

a. Evaluasi Target Pendapatan RPJMD

Pada Tahun 2017 realisasi pendapatan RPJMD sebesar 88,9%, atau dibawah target sebesar hampir 12%. Gap antara target dan penetapan yang paling besar adalah komponen dana penyesuaian yakni Dana Desa yang diproyeksikan terlalu tinggi. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang diprediksikan terjadi peningkatan, ternyata dalam penetapan tidak mengalami peningkatan, sehingga terjadi fiscal gap dari komponen ini sebesar Rp.36,5 m. Dari gambaran ini terlihat bahwa deviasi antara target RPJMD dengan penetapan APBD 2017 masih berada dalam batasan yang wajar, sehingga proyeksi RPJMD masih relevan untuk digunakan, dengan asumsi pola alokasi APBN 2018 kembali normal.

Gambaran realisasi atau penetapan APBD induk TA 2017 terhadap target RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Perbandingan Pendapatan 2017 terhadap target RPJMD 2016-2021

URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI RPJMD	PENETAPAN APBD	SELISIH	(%) Capaian
	900,645,688,125	800,852,474,455	(99,793,213,670)	88.9
PENDAPATAN ASLI DAERAH	42,879,686,202	45,223,786,635	2,344,100,433	105.5
Pajak Daerah	6,345,351,911	6,011,969,467	(333,382,444)	94.7
Retribusi Daerah	4,544,210,005	2,852,523,350	(1,691,686,655)	62.8
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Kekayaan Daerah yang di pisahkan	3,641,361,621	3,302,822,332	(338,539,289)	90.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28,348,762,665	33,056,471,486	4,707,708,821	116.6
DANA PERIMBANGAN	87,484,756,277	41,423,453,844	(46,061,302,433)	93.3
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,946,272,617		(7,946,272,617)	-
Dana Alokasi Umum	525,543,053,420	488,989,309,844	(36,553,743,576)	93.0
Dana Alokasi Khusus	153,995,430,240	152,434,144,000	(1,561,286,240)	99.0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	170,281,245,646	114,205,233,976	(56,076,011,670)	67.1
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak DARI Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14,839,311,023	10,414,830,976	(4,424,480,047)	70.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa)	155,234,089,248	103,592,403,000	(51,641,686,248)	66.7
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	207,845,375	198,000,000	(9,845,375)	95.3

Sumber: RPJMD 2016-2021 dan APBD 2017

b. Analisa rata-rata pertumbuhan Pendapatan

Hasil analisa trend pendapatan dalam kurun waktu 2013-2017, secara keseluruhan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,3%; dengan rincian Pendapatan Asli Daerah 11,9%, Dana Perimbangan 10,92% dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah 41,36%.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)	Rata-rata Pert. (%)
PENDAPATAN	489,565,932,978	575,584,631,339	696,518,589,672	786,700,372,942	800,852,474,455	13.33
Pendapatan Asli Daerah	30,327,867,805	38,584,646,034	42,585,723,246	47,502,339,405	45,223,786,635	11.09
Pajak Daerah	3,457,100,752	4,484,762,131	5,712,151,222	6,518,218,827	6,011,969,467	15.86
Retribusi Daerah	12,636,542,567	15,838,338,105	3,759,728,520	2,799,316,753	2,852,523,350	(18.64)
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang di pisahkan	3,420,864,610	3,532,300,699	3,302,822,332	2,915,843,134	3,302,822,332	(0.42)
Lain-lain PAD yang sah	10,813,359,877	14,729,245,099	29,811,021,172	35,268,960,691	33,056,471,486	37.66
Dana Perimbangan	424,981,017,310	488,009,901,944	550,463,728,714	618,741,933,315	641,423,453,844	10.92
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	13,273,791,310	13,304,150,944	4,596,883,700	10,257,233,687	-	(10.52)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			4,592,473,014	1,501,598,938	-	(41.83)
Dana Alokasi Umum	350,219,646,000	410,643,171,000	434,333,102,000	473,589,249,000	488,989,309,844	8.83
Dana Alokasi Khusus	61,487,580,000	64,062,580,000	106,941,270,000	133,393,851,690	152,434,144,000	27.53
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	34,257,047,863	48,990,083,361	103,469,137,712	120,456,100,222	114,205,233,976	41.36
Hibah	-		6,103,415,000	570,445,500	-	(47.66)
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerahlainnya	3,738,663,863	10,318,060,361	10,709,483,712	11,917,045,269	10,414,830,976	44.61

Dana penyesuaian dan otonomi khusus	30,518,384,000	38,478,823,000	50,324,567,000	107,770,609,453	103,592,403,000 0	41.79
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah lainnya	-	193,200,000	36,331,672,000	198,000,000	198,000,000	

Sumber: LRA 2013-2015; *) LRA 2016 *Un-Audit*, **) Penetapan APBD 2017

c. Kebijakan Keuangan Negara (APBN)

Kebijakan APBN 2018 berdasarkan arahan presiden pada forum Musrenbang Nasional 2017, difokuskan pada program-program prioritas yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Presiden menghimbau Daerah-daerah untuk tidak terjebak pada program kegiatan yang sifatnya rutinitas. Pola alokasi anggaran juga akan bersifat dinamis atau disesuaikan dengan pendapatan Negara. Artinya tidak secara otomatis dana transfer daerah selalu meningkat tiap tahun, tetapi disesuaikan dengan Pendapatan Negara. Pada tahun 2017, diharapkan pola alokasi APBN kembali normal, sehingga Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Ngada diprediksikan sebesar Rp 1,226,788,343,960,- atau sama dengan prediksi RPJMD 2016-2021 dengan asumsi adanya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/target pendapatan Kab. Ngada Tahun 2015-2018

NO	Uraian	Realisasi		2017	PROYEKSI 2018
		2015	2016*)		
1	PENDAPATAN	696,518,589,672	786,700,372,942	800,852,474,455	1,226,788,343,960
1.1	Pendapatan Asli Daerah	42,585,723,246	47,502,339,405	45,223,786,635	45,922,266,146
1.1.1	Pajak Daerah	5,712,151,222	6,518,218,827	6,011,969,467	7,106,794,140
1.1.2.	Retribusi Daerah	3,759,728,520	2,799,316,753	2,852,523,350	5,225,841,506
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang di pisahkan	3,302,822,332	2,915,843,134	3,302,822,332	3,823,429,702
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	29,811,021,172	35,268,960,691	33,056,471,486	29,766,200,798
1.2.	Dana Perimbangan	550,463,728,714	618,741,933,315	641,423,453,844	856,997,184,093
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	4,596,883,700	10,257,233,687	-	8,899,825,331
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,592,473,014	1,501,598,938	-	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	434,333,102,000	473,589,249,000	488,989,309,844	578,097,358,762
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	106,941,270,000	133,393,851,690	152,434,144,000	270,000,000,000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	103,469,137,712	120,456,100,222	114,205,233,976	323,868,893,721
1.3.1	Hibah	6,103,415,000	570,445,500	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	15,878,062,795

1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerahlainnya	10,709,483,712	11,917,045,269	10,414,830,976	186,280,907,098
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	50,324,567,000	107,770,609,453	103,592,403,000	121,500,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah lainnya	36,331,672,000	198,000,000	198,000,000	209,923,828

*)LRA Un-audit

2. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Dari data terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2016 (*LRA Unaudit*) terdapat SiLPA sebesar Rp.42,6 miliar; berkurang secara signifikan dibanding tahun 2015 sebesar Rp.105,4 miliar. Di tahun 2018, penerimaan pembiayaan dipredikiskan sebesar Rp.19,5 miliar

3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat

Belanja Periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Komponen belanja ini antara lain; gaji,honorarium PNS khusus guru dan medis, Belanja Beasiswa dan belanja Jasa Kantor. Target pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD tahun 2018 adalah sebesar Rp.345,582 miliar.

Tabel 3.4
Pengeluaran Periodik wajib dan Terikat

Uraian	Proyeksi 2018	Ket
BELANJA TIDAK LANGSUNG	231,836,778,119	
Gaji dan tunjangan	223,732,012,444	
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH dan Wakil KDH	1,506,303,175	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6,598,462,500	
BELANJA LANGSUNG	16,063,108,157	
Belanja Honorarium PNS Khusus Guru dan Tenaga Medis	797,131,351	
Belanja Beasiswa PNS	7,454,636,284	

Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan seperti Listrik, Air, Telp dan sejenisnya)	7,811,340,522	
Pengeluaran Pembiayaan	19,508,246,070	
Total	345,582,999,205	

4. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan (Kerangka Pendanaan)

Kerangka pendanaan dimaksud untuk memperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan sesuai dengan arah prioritas pembangunan. Perkiraan kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat. Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Ngada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.901.047 miliar yang direncanakan untuk mendanai prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana Penggunaan kapasitas Riil Keuangan Daerah Kab. Ngada Tahun 2018

No	Uraian	Rencana 2018	Ket
A	Prioritas I	701,244,462,276	
	Program Prioritas Daerah untuk mendukung 7 Misi Daerah	626,746,115,856	
	Program Penyelenggaraan urusan lainnya	74,498,346,420	
B	Prioritas II	199,802,713,028	
	Belanja		
	Belanja Tambahan Penghasilan	18,500,000,000	
	Belanja Hibah	4,000,000,000	
	Belanja Bansos	6,183,433,417	
	Belanja Bantuan Keuangan	170,119,279,611	
	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	
	Total	901,047,175,304	

Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, maka dirumuskan skema alokasi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel.3.6
Skema Alokasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2018

No	Penerimaan Daerah	Pagu Indikatif	No	Pengeluaran Daerah	pagu Indikatif
1	Pendapatan Daerah	1,226,788,343,960	1	Belanja Wajib dan Terikat	345,582,999,205
2	Penerimaan Pembiayaan	25,309,577,218	2	Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah	
				Prioritas 1	701,244,462,276
				Prioritas 2	199,802,713,028
	Total Penerimaan Daerah	1,252,097,921,178		Total Pengeluaran Daerah	1,246,630,174,509

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1,226,788,343,960 ,- Proyeksi pendapatan ini didasarkan pada trend kenaikan pendapatan daerah selama periode beberapa tahun terakhir. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 45,92 Miliar lebih. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 856,99 Miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 323,868 Miliar. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah adalah terutama melalui komponen Pendapatan Asli Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Ngada akan melakukan langkah-langkah strategis seperti :

1. Penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah ulayat atau tanah suku dimana pungutan pajak bumi dan bangunan lebih difokuskan pada pajak bumi semata sedangkan pajak bangunan masih belum optimal.
2. Optimalisasi Penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah melalui pendataan yang akurat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah tersebut melalui peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
3. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
4. Meningkatkan Koordinasi antar PD lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi pemerintah.
5. Penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-perijinan.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2018 yang akan datang diprioritaskan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2020 yang tergambar melalui Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Memperhatikan kondisi penerimaan daerah, maka kebijakan belanja daerah tahun 2018 diarahkan sebagai berikut:

1. Memprioritaskan terlebih dahulu **alokasi belanja periodik wajib dan terikat** yang meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja tugas belajar/beasiswa yang sifatnya berlanjut, belanja listrik, air dan telepon.
2. Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan kapasitas riil keuangan daerah, dialokasikan dengan prioritas sebagai berikut:
 - 2.1. **Prioritas Pertama**, untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yakni untuk melaksanakan program-program unggulan di bidang infrastruktur pelayanan dasar yakni **Zala Siro Saro, Wae Gebho Gabho dan Dara Rilo Ralo**, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Penataan/Pengembangan Kota Bajawa, Sektor Pendidikan, Kesehatan, JKMN, Beasiswa Dokter Spesialis, Beasiswa Sekolah Kedokteran Umum, Beasiswa S2 dan S3 calon dosen, beasiswa S2 umum dan beasiswa S1, Urusan Sosial dan Penanggulangan Bencana serta dukungan pembentukan daerah otonomi baru mulai di tingkat desa dan kecamatan.
 - 2.2. **Prioritas kedua** adalah untuk mendanai program-program pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang sifatnya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah alokasi pada prioritas pertama baik melalui belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pembiayaan. Mengingat untuk komponen belanja langsung nilainya kecil, maka pemerintah Kabupaten Ngada perlu menerapkan prinsip Ekonomis, Efisien dan Efektif dalam pola alokasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah
 - 2.3. **Prioritas Ketiga**, diperuntukan bagi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Ngada Tahun 2018 adalah memanfaatkan pembiayaan netto untuk menutup proyeksi defisit anggaran, yang dalam konteks APBD merupakan kebijakan untuk menghindari dana menganggur atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA), dengan uraian:

- a. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA. Kebijakan penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Besaran SiLPA riil diperkirakan kurang lebih Rp.25.309.577.218,-
- b. Pengeluaran pembiayaan, tidak direncanakan pengalokasian anggarannya.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018**

**4.1. Tujuan dan Sasaran
Pembangunan**

**4.2. Prioritas Pembangunan
Tahun 2018**

BAB IV

**PRIORITAS DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
KABUPATEN NGADA**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Daerah Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, yang menekankan pada pemantapan pencapaian 95 indikator pembangunan, untuk mencapai Visi. **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** Untuk mempercepat pencapaian Visi tersebut diatas, ditetapkan 7 misi pembangunan yang memiliki tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2018 yang dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada

Misi	Tujuan	Sasaran
“Terwujudnya Masyarakat Ngada Dengan Taraf Hidup Yang Berkualitas, Mandiri, Berbudaya, Unggul, Dan Sejahtera Berlandaskan Etos Kerja Yang Tinggi Dan Pembangunan Berkelanjutan”.		
1. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan.	1.1 Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan.	1.1.1 Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.
		1.1.2 Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial
	1.2 Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada	1.2.1 Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
		1.2.2 Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
		1.2.3 Tersedianya kebutuhan rumah layak huni pada semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian	2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian dengan	2.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (tanaman pangan: padi, jagung, kedelai; perkebunan: kopi; dan peternakan :sapi, kambing, babi)
		2.1.2 Meningkatnya Keberagaman Produk Sektor Pertanian

dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.		2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Destinasi dan Diversifikasi Produk Wisata
	2.2 Menciptakan system tataniaga	2.2.1 Teraturnya kegiatan perniagaan
3. Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	3.1 Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung	3.1.1 Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota 3.1.2 Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman
	3.2 Meningkatkan Kemampuan Usaha Ekonomi Masyarakat Perkotaan	3.2.1 Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan
4. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.	4.1 Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul	4.1.1 Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar 4.1.2 Meningkatnya kualitas siswa dan tenaga pendidik
	4.2 Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	4.2.1 Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	5.1 Peningkatan Kulitas Hidup masyarakat	5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5.1.2 Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
		5.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga
6. Menanggulangi bencana alam, non alam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas	6.1 Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam	6.1.1 Terpenuhi hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana Non Alam
	6.2 Pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	6.2.1 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat;	6.3 Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan Keagamaan	6.3.1 Terjalannya Kemitraan yang harmonis
	6.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terintegrasi (inhal) Bagi Masyarakat	6.4.1 Tersedianya Sarana Olah Raga dan Rung Publik Bagi Masyarakat
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	7.1 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		7.1.2 Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis
		7.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi
		7.1.4 Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018.

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik dan prioritas PD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2018 dirumuskan berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan nasional (RKP 2018) dan provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun 2016 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2017 (referensi Bab II), dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan (referensi bab III). Selain itu memperhatikan usulan PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2017.

4.2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2018

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pembangunan

yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita) :

Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun prioritas Nasional Tahun 2018 untuk Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spatial yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistic. Secara lebih terinci pada tahun 2018 terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Program Prioritas Nasional 2018



4.2.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Tahun 2018

Tujuan dan sasaran pembangunan provinsi Tahun 2018 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 strategi pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Secara rinci prioritas pembangunan NTT 2018 difokuskan pada :

1. Pembangunan Infrastruktur yang diarahkan pada pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional.
2. Peningkatan Pelaksanaan 6 tekad pembangunan melalui :
 - a. Pengembangan Jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi,
 - b. Penyediaan ternak dan obat – obatan,
 - c. Penyediaan kapal dan alat tangkap,
 - d. Pelaksanaan event – event pariwisata,
 - e. Pengembangan cendana rakyat,
 - f. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Koperasi.
3. Mendukung 5 program strategis nasional melalui :
 - a. Pengembangan pariwisata dengan Pusat KSPN Labuan Bajo,
 - b. Pembangunan Bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores,
 - c. Pembangunan Segitiga pertumbuhan,
 - d. Pembangunan jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI dengan Belanda,
 - e. Pengembangan industri garam.
4. Mendukung program kemitraan lembaga internasional melalui :

- a. Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan cokelat di Flores,
- b. Peningkatan perluasan capaian target kerjasama pembangunan dengan UNDP,
- c. Peningkatan Sinergitas Program Dukungan USAAID, UNICEF, PLAN International, WVI serta mitra lainnya.

4.2.3 Review Capaian RKPD Tahun 2017

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan ditahun sebelumnya ditemukan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan ditahun selanjutnya. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- d. Isu pengembangan wilayah yang belum memadai yang mencakup permasalahan :
 - Masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Ngada.
 - Kualitas Infrastruktur (Jalan, listrik dan air) yang belum mencapai target karena keterbatasan anggaran.
 - Belum tertatanya secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukannya.
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai sampai di daerah kantong-kantong produksi dan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan.
 - Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni.
- e. Isu pengembangan ekonomi yang mencakup permasalahan :
 - Masih rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian.
 - Potensi pariwisata belum dikembangkan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan sarana prasarana serta rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.
 - Masih adanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- f. Isu rendahnya daya saing masyarakat yang ditandai dengan permasalahan :
 - keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 - Masih rendahnya tata kelola pendidikan yang tergambar dari belum meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah.
 - belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat.
- g. Isu kurang efektifnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan permasalahan :

- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
- Masih belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif.

4.2.4 Usulan SKPD dan Review Rancangan RKPD

Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD ditemukan terdapat beberapa usulan kegiatan baru, sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya usulan masyarakat melalui reses DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memperhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator RPJMD
2. Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru)
3. Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2017.
4. Adanya isu – isu pembangunan yang berkembang saat penyelenggaraan Musrenbang sebagai berikut :
 - a) Ruas Jalan Provinsi Poma-Riung diusulkan menjadi JALAN STRATEGIS PARIWISATA
 - b) Pembangunan Kelurahan :
 - Pemda mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
 - Alokasi anggaran tersebut dimasukan pada anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan.
 - Pemanfaatan anggaran kelurahan tersebut melalui Musrenbang Kelurahan
 - Ketentuan mengenai tatacara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah
 - c) Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terletak di wilayah irisan Perbatasan antar Kabupaten yang saat ini sedang dalam persoalan, agar DIHENTIKAN untuk sementara waktu sambil menunggu penyelesaian oleh Provinsi.
 - d) Perlu adanya alokasi anggaran untuk penanganan pembangunan Sarana dan Prasarana lintas desa dan lintas kecamatan.
 - e) Penggunaan Kamus Musrenbang sebagai prakondisi pelaksanaan *e-Planning* sesuai rekomendasi KPK.
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Ngada menggunakan pendekatan OUTCOME yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Setelah memerhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada kerangka pendanaan yang sesuai dengan spirit

“Membangun Ngada Dari Desa” dan Visi. **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”** maka rincian prioritas pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut :

Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur dasar wilayah untuk mengurangi disparitas wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan jalan, listrik dan air. Dengan slogan **“Zala siro saro, Wae gebho gabho dan Dara rilo ralo**, Pemerintah Kabupaten Ngada berkomitmen untuk menjadikan jalan, listrik dan air sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Misi 1 RPJMD 2016 – 2021.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
WAE GEBHO GABHO	66,22 %	86,5%	6,76 % /Th
	11.931 KK	30.551 KK	4.678 KK/Th
ZALA SIRO SARO	466,74 Km	806 Km	150 Km/Th
DARA RILO RALO	72,03 %	87%	5,59 % /Th
	25.050 RT	30.257 RT	1.946 RT/Th

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bertumpu pada sector pertanian, agrobisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan. Misi 2 lebih diprioritaskan pada **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK)** pada beberapa komoditi unggulan seperti Kopi, Padi, Holtikultura pilihan Anggur dan Ternak Sapi, Kuda dan Babi

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
PERAK PETERNAKAN	28.186 Ekor	32.275 Ekor/Th	1.363 Ekor/Th
PERAK HORTIKULTURA	n.a	71 Ha	10 Ha/Th
PERAK KOPI	6.356,6 Ha	200 Ha	100 Ha/Th
PRODUKTIVITAS PADI	3,8 Ton/Ha	7,12 Ton/Ha	1,44 Ton/Ha

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan serta menjunjung tinggi penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi 3 lebih difokuskan pada penataan perkotaan dengan focus utama penataan kota Bajawa dan pengembangan kota Bajawadi Moromoto.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
KEKUMUHAN	27 Ha/1396 Ha	0,93%	0,5%/Th
TITIK GENANGAN	115 Titik	69 Titik	23Titik
PERSAMPAHAN (TPST)	15.552 kubik	30%	10%
ANGKUTAN KOTA	1086 Plgrn	23%	11,5 %

Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi. Misi 4 diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan pembiayaan honor tenaga pendidik.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
APM (SD/SMP) %	86,15 / 57,7	100 / 68,86	2,77 / 4,47 / TH
APK (SD/SMP) THN %	100,86 / 86,46	100 / 93,26	0 / 2,71 / ThH
ANGKA HARAPAN SEKOLAH	11,99 TH	12,41 TH	0,07 TH
RATA LAMA SEKOLAH	7,51 TH	8 TH	0,30 TH
Uji Kompetensi Guru	5,0	6,0	0,5

Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Misi 5 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan dengan menggunakan strategi lintas sumber pendanaan.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
ANGKA HARAPAN HIDUP	67,32 TH	67,62TH	0,14 TH/TH
KEMATIAN BAYI	45 KASUS	30 KASUS	5 KASUS/TH
CAKUPAN PELAYANAN RUJUKAN MASY. MISKIN	4,2 %	2,98 %	0,4 %/TH
RASIO DOKTER	24%	15%	2,2 %/TH
DESA/KEL STBM	79 DS/KEL	96 DS/KEL	15 DS/KEL/TH
CAKUPAN KB AKTIF	52,18%/9.247	57,46%	4,6%/2.155

Misi 6 : Penanggulangan bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, dan olahraga di masyarakat. Misi ini difokuskan untuk menjamin ketentraman, keamanan dan perlindungan masyarakat dengan focus utama penanganan PMKS dan korban bencana.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
PMKS TERTANGANI	46%	61%	4%
PENANGANAN BENCANA	100%	100%	100%/TH

Misi 7 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Fokus misi ini adalah peningkatan kualitas SDM aparatur, perencanaan dan pengelolaan Anggaran yang berbasis Technology Infomasi (*e planning, e budgeting, dan e procurement*).

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
KONSISTENSI RKPD/RPJMD	92,18 %	100%	
KONSISTENSI APBD/RKPD	82,8 %	100%	
OPINI BPK (SKALA)	WDP	WTP	-
EVALUASI LKJIP	SKALA "C"	SKALA "B"	-
SCORE LPPD	20054 TGGI	28000 TGGI	
SISTEM ONLINE	6 SKPD	10 SKPD	1 SKPD/TH

Adapun Program prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD 2016 – 2021 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2
 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahun 2016, Kategori dan SKPD Penanggungjawab

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan										
1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik										
a	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan yang dapat mempercepat pembangunan aksesibilitas wilayah, terutama pada Ruas Jalan lingkaran luar wilayah kabupaten Ngada, sentra-sentra	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Km	466,74	506,74	806	Dinas PUPR

	jalan.		Produksi, Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dan Wilayah Potensial							
b	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Membuka jaringan jalan baru dari dan menuju wilayah potensial	Pembangunan jalan dan jembatan yang dapat mempercepat pembangunan aksesibilitas wilayah, terutama pada Ruas Jalan lingkaran luar wilayah kabupaten Ngada, sentra-sentra Produksi, Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dan Wilayah Potensial	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89,73	89,73	95,73	Dinas PUPR	

2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada

a	Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Meningkatkan dan memperluas Pembangkit & jaringan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	Membangun Pembangkit dan Jaringan listrik untuk seluruh wilayah Kabupaten Ngada melalui subsidi ke Perusahaan Pemasangan Instalasi Listrik Perumahan bagi masyarakat Kabupaten Ngada	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	Persentase	72.03	77	92	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
b	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Peningkatan dan perluasan jaringan air di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	Peningkatan dan perluasan saluran jaringan air minum bersih pada semua desa dan dusun baik dengan menggunakan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66.22	72.98	86.5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

			system gravitasi, pompa hydram dan sumur bor .							
			Peremajaan jaringan pipa distribusi dan transmisi di kota Bajawa.							
			Pembangunan waduk, embung dan jebakan air pada daerah-daerah mata air yang mengalami penurunan debit untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan pertanian.	Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	0	1	Dinas PUPR
				Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah Sumber Mata Air , Lahan Kritis dan Rawan	Persentase	44.6	55	76.6	Dinas Lingkungan Hidup

					abrasi					
		Revitalisasi pengelolaan jaringan air bersih pedesaan	Penguatan manajemen pengelolaan air bersih pedesaan	Program Peningkatan partisipasi masyarakat Dalam membangun Desa	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	151	?	Dinas PMD P3A
c	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pemberian bantuan perbaikan kualitas rumah	Program Lingkungan sehat Perumahan	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	0	10	Dinas PUPR

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai. Tanaman Perkebunan : Kopi, Peternakan : Sapi, Kambing, Babi

a.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian	Intensifikasi lahan sektor pertanian	Optimalisasi lahan pertanian	Peningkatan Ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100			Dinas Pertanian
			Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat;		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan					
			Pencegahan penanggulangan hama tanaman		Tanaman Pangan :					
			Penyuluhan Pertanian		<i>Padi</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.8</i>	<i>3.8</i>	<i>7.12</i>	
					<i>Jagung</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.6</i>	<i>2.5</i>	<i>3.9</i>	

					<i>Kedele</i>	<i>Ton/Ha</i>	2.85	2.85	2.95	
					<i>Kacang Merah</i>	<i>Ton</i>	1751	480	480	
					Tanaman Perkebunan:					
					<i>Kopi</i>	<i>Ton/Ha</i>	0.82	0.86		
			Pengairan Yang Teratur	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang Jaringan Irigasi yang dalam Kondisi Baik	Meter	33.513	40.513	54.513	Dinas PUPR
			Pemanfaatan teknologi pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan	Ha	0	100	100	Dinas Pertanian
			Fasilitasi akses permodalan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	UPH	0	0	6	Dinas Pertanian
		Ekstensifikasi lahan pertanian	Pencetakan dan perluasan lahan produksi baru	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan					Dinas Pertanian

			Pengembangan irigasi		Tanaman Pangan:					
			Pemberdayaan Ekonomi rakyat (Perak) Sektor Pertanian		<i>Padi sawah</i>	Ha	6,413	6,413	6.713	
				<i>Jagung</i>	Ha	12,469	12.789	13.429		
				<i>Kedele</i>	Ha	652	972	1612		
				Tanaman Perkebunan:						
				<i>kopi</i>	Ha	6356.6	6456.6	6656.6		
				Adanya peremajaan tanaman kopi	Ha	381.97	481.97	681.97		
				Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	Ton/Tahun					
				Tanaman Pangan:						
				<i>Padi</i>	Ton/Tabunan	45,893	57.288	83.198		
				<i>Jagung</i>	Ton/Tabunan	44,857	47.319,3	49.877,1		
				<i>Kedele</i>	Ton/Tabunan	1,857	2.818,8	2916		
				Tanaman Perkebunan:						
				<i>kopi</i>	Ton/Tabunan	3748.8	3.929,34	4294.86		
				Meningkatnya Areal Produksi Hortikultura	Hektar	35	51	71		

				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Adanya Peningkatan populasi Ternak :	<i>Ekor</i>				Dinas Peternakan
					<i>sapi</i>	ekor	28186	29.549	32.275	
					<i>kambing</i>	ekor	21581	23.081	26.081	
					<i>babi</i>	ekor	116266	117.266	119.266	
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersedianya Modal Usaha untuk 30 Kelompok	UPH	0	0	6	Dinas Pertanian
					Tersedianya Tatakelola MPIG sebagai Institusi pemegang hak indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	0	1	
b	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Pengolahan Hasil Pertanian	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Presentase produksi kelapa olahan (Jumlah Kelapa Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase produksi pisang olahan (Jumlah Pisang Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	2	
			Peningkatan kapasitas SDM sektor pengolahan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Gabungan kelompok tani pelaku agribisnis	Kelompok Tani	0	100	300	Dinas Ketahanan Pangan

			hasil pertanian		yang terlatih					
			Pengembangan sistem agribisnis sektor pertanian							
			Pengembangan pangan lokal							
c	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Menata destinasi wisata	Penataan sarana dan prasarana wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	lokasi	1	2	6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kemitraan Promosi Pariwisata	Lembaga	2	2	6	
		Mengembangkan promosi pariwisata	Membangun kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat							
			Penyelenggaraan event - event pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	even	5	6	8	

			Diversifikasi produk wisata		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	6	8	
d	Meningkatkan dan Mempertahankan Keberagaman Flora	Membangun Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat	Menyediakan Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Dokumen Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Dokumen	0	0	1	BP Litbang
2 :Menciptakan sistem tataniaga pasar										
a.	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Menyediakan regulasi yang mengatur tentang sistem tataniaga	Perwujudan kepastian hukum	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Penataan Distribusi Barang dan Jasa	Paket	0	0	0	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.

1. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung

a	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan	Penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan & pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Penataan Ruang Kota	Dokumen	1 dokumen dari 13 dokumen	3	4	Dinas PUPR dan BP Litbang
---	--	---	--	--------------------------------	---	---------	---------------------------	---	---	---------------------------

		dan konsisten								
		Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang,	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	1	1	Dinas PUPR dan BP Litbang
		Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman,	Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Program Lingkungan sehat perumahan	Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1.93	1.93	0.93	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong	Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	23	69	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66.10%	84,9	100	BLHD

				Persampahan	Persentase sampah yang diolah pada TPST	Persentase	10	20	30	BLHD
b	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Penataan Angkutan Umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100	100	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya trayek angkutan dalam kota bajawa	jumlah trayek	2	2	6	Dinas Perhubungan
2. Meningkatkan Kemampuan usaha ekonomi masyarakat Perkotaan										
a	Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Pemberdayaan UMKM	Penguatan Manajemen Usaha	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Persentase	7,46 % (dari 2.146 UMKM)	12,46 % (dari 2.316 UMKM)	30.46	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penguatan Modal Usaha							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.										
1. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul										
	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar	Meningkatkan Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	na	43,55	46.89	Dinas Pendidikan
			Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOSDIK) mulai dari Tingkat PAUD sampai SMA		Meningkatnya angka partisipasi Kasar TKK/PAUD	Prosentase	na	45,84	45.72	
				Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	Meningkatnya angka partisipasi murni	Prosentase	na			

					<i>SD</i>		86.15	100	100	
					<i>SMP</i>		57.7	57.7	68.86	
					Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase				
					<i>SD</i>		100.86	100	100	
					<i>SMP</i>		86.46	86.46	93.26	
	Meningkatnya kualitas Siswa	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi tenaga pendidik	Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar nasional	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru	Rata – rata Nilai	4	5,0	6	Dinas Pendidikan
		Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran;			Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	na	6,6	6,8	
					Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	na	6,6	6,8	

		Pelibatan Masyarakat dalam menunjang kualitas pendidikan	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan							
2. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi										
	Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi	Peningkatan kesempatan dan kemudahan mendapatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa	Belanja Tidak Langsung (PPKAD)	Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang	2000	0	0	Badan Keuangan
			Meningkatan Koordinasi dengan Undana dan Pemerintah Pusat untuk pendirian Universitas	Belanja Tidak Langsung (PPKAD)	Jumlah Hibah Pemda	Rupiah	0	1.700.000.000	0	
			Fasilitasi Penyediaan Tenaga Dosen melalui Beasiswa Tenaga Potensial	(Bansos)	Jumlah Tenaga Dosen	Orang	123	0	0	

		Fasilitasi penyediaan lahan	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Aset Bidang Tanah	Bidang	1	0	0
		Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi	Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA		Persentase	10.74	10.74	12.74
			Meningkatnya persentase Penduduk dengan ijazah tertinggi Perguruan tinggi		Persentase	7.54	7.54	9.54

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.										
1. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat										
a	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas	Peningkatan sarana, prasarana dan manajemen puskesmas serta Rumah Sakit	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jumlah/jenis obat yang tersedia/jumlah obat yang dibutuhkan x 100)	Persen	95,43	96.34	98.17	Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana					Dinas Kesehatan

				dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	sesuai standar (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)					
					Puskesmas	Buah	14	14	17	
					Pustu	buah	24	24	28	
					Pusling	Buah	11	16	20	
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)	Persen	0	0	0	Dinas Kesehatan
			Dukungan Pembangunan RS Baru sebagai	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan	Presentase ketersediaan Sarana Pendukung	Persen	0	0	75	Dinas Kesehatan

			Pusat Rujukan di Flores	Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Pembangunan RSUD (jumlah ketersediaan sarana pendukung/Total Srana Pendukung)X100						
			Meningkatkan pelayanan UPT Puskesmas dan RSUD	Program upaya Kesehatan masyarakat	Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:						
		Pemberian Biaya Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA)		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	Persen	16.31	16,31	15.65	Dinas KEsehatan	
						-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0.42	0,42	0.85	Dinas KEsehatan
						-Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat	Persen	90,09	92,07	96.04	Dinas Kesehata n

					-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
					-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103.7	100	100	Dinas Kesehatan
					- Cakupan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	4.14	3.75	2.98	Dinas Kesehatan
					• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	Persen	62,59	63,7	65.92	RSUD

					<ul style="list-style-type: none"> • LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari) 	Hari	3.48	6	6	RSUD
					<ul style="list-style-type: none"> • TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari) 	hari	2.07	1,97	1.67	RSUD
					<ul style="list-style-type: none"> • BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 	kali	65.83	62,36	55.42	RSUD

					kali dalam setahun)					
					-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28,800/1000	28,300/1000	27.120/1000	RSUD
					• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	Persen	17,48/1000	16,99/1000	16,55/1000	RSUD
					Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai)	Persen	89.2	89.2	94.64	Dinas Kesehatan

				standar/Total jumlah sarana x 100)					
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya Kasus kematian Ibu	Kasus	3	4	2	Dinas Kesehatan
				Menurunnya Kasus kematian Bayi	Kasus	51	40	30	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Kasus Kematian Anak	Kasus	54	47	34
		Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan rujukan masyarakat Ngada	Persen	4,20	3,80	3	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada							

			(JKMN)							
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM sesuai standar minimal/Total SDM yang ada x100)	Persen	5.1	24,08	62.04	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Pemberian Biaya Operasional Kesehatan Daerah							
b	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan	Meningkatkan promosi kesehatan Puskesmas	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah Tangga X100)	Persen	70.86	73,86	79.86	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	38	96	Dinas Kesehatan

c	Meningkatkan kualitas keluarga	Peningkatan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Peningkatan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Keluarga Berencana	Prosentase KB Aktif (Jumlah Peserta KB Aktif/Total PUSX100)	Persen	46.18	49,3	55,7	Dinas KCS
---	--------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--------	-------	------	------	-----------

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat										
1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam										
a	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana Non Alam	Melakukan Pemetaan terhadap daerah rawan bencana alam dan bencana non Alam	Peningkatan Kapasitas dan Komptensi aparatur dalam melakukan	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	BPBD

			survey dan identifikasi daerah rawan bencana							
		Membangun Pola Kemitraan bersama masyarakat dan swasta dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam	Penyediaan Prosedur Tetap Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam		Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	BPBD
			Sistem Peringatan Dini dan mitigasi Bencana Alam dan Bencana Non Alam							
			Rekonstruksi dan Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Bencana non Alam							

2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosial

a	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	1.Membangun Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	56,24	64.24	Dinas Sosnaketrans
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	persen	25	37	61	Dinas Sosnaketrans

3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan

a	Terjalinya Kemitraan yang Harmonis	Membangun Kerjasama Antar Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase	100	100	100	Kesbangpolinmas
				Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terjalinya Kerjasama Penelitian Bidang Kebudayaan	Unit	30	30	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase	80	80	80	Kesbangpolinmas
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)										
a	Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan masyarakat	Membangun Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Penyediaan Master Plan dan Perencanaan Teknis Sport Center	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Dokumen	0	2	0	Dinas PUPR

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2016	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Misi Ketujuh: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah	Program Pendidikan Kedinasan	Berkurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Daerah yang belum mengikuti Diklat Kepmimpinan	Jumlah Orang	341	308	242	BK Diklat
			Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah melalui Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Orang	123	133	153	BK Diklat

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Umum	Tersedianya Fasilitas Perkantoran yang memadai bagi peyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	berkurangnya sarana dan parasarana Pemerintahan yang tidak memadai	unit	5	4		Dinas PUPR
		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Pembentukan Regulasi terkait Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya pemerintahan daerah melalui penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah	34	56	56	Bagian Organisasi
	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	Penyediaan Sumber daya Manusia, Perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tertatanya sistem Perijinan yang terpadu	Persen	0	0	0	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu atap

			Penerapan <i>E-Planning</i> dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi Daerah	Tersedianya Sistem Informasi perencanaan Pembangunan daerah	Sistem	0	0	1	BP Litbang
			Pengembangan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Penerapan E-Payment dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	0	100	100	Adm Pembangunan
					Tertatanya sistem Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persen	0	0	100	Badan keuangan
			Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tertatanya Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	0	0	Dinas Kesehatan

		Meningkatnya Fungsi-Fungsi Koordinasi baik lintas sektor maupun lintas sumber dana	Membangun Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana dalam Pembangunan Daerah	Program Kerja Sama Pembangunan	Terlaksananya Koodinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana Dalam Pembangunan Daerah	kali	2	2	4	BP Litbang
		Mewujudkan Integrasi/Konektivitas Data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Pengelolaan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya Keterisian data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumlah Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40.18	52,8	78,2	BP Litbang
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset daerah	Penguatan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan sistim pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Skala	WDP	WDP	WTP	Inspektorat
		Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	232	696	Inspektorat

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 32000	62,67	87.5	Administrasi Pemerintahn Umum
					Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Skala	C	CC	B	Bagian Organisasi
	Mendekatka n Pelayanan Kepada Masyarakat	Pemekaran Wilayah	Pemekaran Kecamatan		Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Desa/Kel	151	151	151	Dinas PMD P3A
			Pemekaran Wilayah Kabupaten menjadi daerah Otonom Baru	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi	Persentase	33.33%	33,33%	33,33	Adm Pemerintahaha n
			0		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi	Persentase	0	0	75	Adm Pemerintahaha n

					Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten					
					Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Persentase	0%	0	75	Adm Pemerintah an

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGADA TAHUN 2018



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2016-2021. Bab ini menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2018 berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD. Seperti yang sudah lazim dilaksanakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selain dalam rangka pencapaian target RPJMD juga harus menampung aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Oleh karena itu dalam BAB ini selain kegiatan prioritas berdasarkan program dan target RPJMD, akan disampaikan pula data kegiatan yang menjadi prioritas karena merupakan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan hasil Musrenbang dan hasil Reses DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Secara keseluruhan proses penyusunan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dilakukan melalui lima pendekatan yaitu Teknokratik, partisipatif, politik, top down - bottom up sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Ngada.

5.1 Pendekatan Teknokratik

Yang dimaksud dengan Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah proses yang pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam hal ini proses teknokratik digunakan pada proses penyusunan perkiraan ekonomi makro daerah dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Selain itu pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

5.2 Pendekatan Partisipatif dan bottom up – top down

Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah proses yang dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Hal ini dijalankan melalui Musrenbang dengan pemangku kepentingan guna menyusun Rencana Kerja yang akuntabel. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Hasil usulan perencanaan dari bawah (bottom - up) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi NTT dan Pembangunan Nasional. Selanjutnya pendekatan top - down yang dilaksanakan untuk penyusunan RKPD tahun 2018 dijalankan

melalui penyusunan Rencana Kerja dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan Provinsi NTT yang tercantum dalam RKPD Provinsi NTT tahun 2018 dan Pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018 dan arah kebijakan dalam RPJMN 2015- 2019. Selain itu dengan mengakomodir arahan pimpinan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5.3 Pendekatan Politik

Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

5.3.1 Hasil Reses DPRD

Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok – pokok pikiran yang disampaikan pada saat Musrenbang Kabupaten Tahun 2017. Secara rinci hasil reses DPRD tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

A. Bidang Ekonomi

Tabel 5.1
Hasil Reses Bidang Ekonomi

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	USULAN	VOLUME	LOKASI	SKPD
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Perkebunan	- Pengadaan Hand Traktor	3 Paket	Desa Gizi Gedha - Kecamatan Golewa Barat	DINAS PERTANIAN
				Desa Denatana - kecamatan Wolomeze	DINAS PERTANIAN
				Desa Wolomeze I - Kecamatan Riung Barat	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Meningkatnya usaha-usaha pertanian meliputi upaya peningkatan	Promosi komoditi unggulan perkebunan	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	DINAS PERTANIAN

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan serta meningkatkan penyebaran informasi komoditi unggulan	(kopi, Cengkeh dan Vanili)			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersedianya Modal Usaha untuk 24 Kelompok	Dana Talangan (penguatan modal) pengelolaan kopi basah / gelondongan	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	DINAS PERTANIAN
		Penguatan kapasitas GAPOKTAN	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa yang efektif dan efisien	Kajian mengenai pasar tradisional di wilayah perbatasan	1 paket	Desa lengkosambi - Kecamatan Riung	Dinas Koperasi, UMMK dan Perdagangan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas perikanan budidaya	Pengembangan Tambak Ikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	1 paket	Desa lengkosambi - Kecamatan Riung	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang teknik perikanan	Pendampingan kelompok nelayan di Desa Wogowela dari Pihak Pemerintah	1 paket	Desa Wogowela - kecamatan Golewa Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan

B. Bidang Fisik dan Prasarana

Tabel 5.2
Hasil Reses Bidang Fisik dan Prasarana

NO	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/K EGIATAN	INDIKA TOR KINERJA	USULAN	VOLU ME	LOKASI	SKPD
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya panjang jaringan irigasi yang baik (M)				
	- Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi		Pembangunan Irigasi Roba – Jara – Nio Doa, (rusak berat sehingga kebutuhan air untuk pengelolaan sawah terganggu akibatnya produktivitas padi sawah menurun).	1 Paket	Zaa - Desa Were III - Kec. Golewa Selatan	PUPR
			Pembangunan saluran irigasi di Radawe	1 paket	Desa Tarawaja - Kecamatan Soa	PUPR
			Pembangunan saluran irigasi dan pelaksanaan proyek jang menunggu musim hujan	1 paket	Desa Watunai - kecamatan Golewa Barat	PUPR
2.	Program Pembangunan Jalan dan	- Presentase panjang	Lanjutan pembangunan jalan dari Boba	1 paket	Desa Bawarani - Kecamatan	PUPR

Jembatan	jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten ke Waebela			Golewa Selatan	
	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (km)	Pembukaan jalan baru dan peningkatan jalan dari Desa Dizi Gedha menuju lapangan Pacuan Kuda Bunga Nusa	1 paket	Desa Gizi Gedha - Kecamatan Golewa Barat	PUPR
		Penanganan jalan di sebelah utara Kantor Camat Riung	1 paket	Kelurahan Nangamese - Kecamatan Riung	PUPR
		Jalan sebelah utara kampung selayar yang kondisinya masih memprihatinkan	1 paket	Kelurahan Nangamese - Kecamatan Riung	PUPR
		Jalan Wolokuku– Sekojawa	1 paket	Poma - Desa Denatana - Kecamatan Wolomeze	PUPR
		Pembangunan jalan dari Poma – Sekojawa	1 paket	Poma - Desa Denatana - Kecamatan Wolomeze	PUPR
		Pelebaran jalan dan hotmix dari pertigaan Ngalisabu menuju Kampung Bajawa	1 paket	Kelurahan Bajawa - Kec. Bajawa	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Pembukaan jalan alternatif Doka - Roga - Mala Bowaru	1 paket	Desa Naruwolo I - Kecamatan Jerebuu	PUPR

Perawatan jalan Nage - Doka agar dibangun plat dekker pada 2 titik di Wae Aru karena air selalu tergenang pada musim hujan	1 paket	Desa Naruwolo I - Kecamatan Jerebuu	PUPR
Peningkatan jalan Maronggela - Warunembu - Rio Minsi	1 paket	Dusun Warunembu - Desa Lanamai I - Kecamatan Riung Barat	PUPR
Peningkatan jalan poma - Welas - Namut	1 paket	Desa Denatana - kecamatan Wolomeze	PUPR
Peningkatan jalan HOTMIX Bajawa - Ekoheto	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	PUPR
Pembangunan jembatan kampung Bomadha - TPU Bomadha	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Perbaikan jalan di samping SDK Jerebuu sepanjang ± 200 m yang selalu tergenang air bila hujan karena badannya lebih rendah	1 paket	Desa Dariwali I - Kecamatan Jerebuu	PUPR
Peningkatan jalan Maronggela - Nampe	1 paket	Desa Wolomeze I - Kecamatan Riung Barat	PUPR
Peningkatan jalan Mengirateawe (hotmix)	1 paket	Desa Tiwuriwu I - kecamatan Jerebuu	PUPR

	Peningkatan jalan ruas Tanawau - tarawaja untuk membuka akses transportasi masyarakat di dusun Momoru, Tukapela dan Ngelapadhi	1 paket	Desa Turamuri - Kecamatan Bajawa Utara	PUPR
	Jalan Zaa – Waturoka ke Were II rusak berat dan juga ada tempat yang terjadi bencana alam longsor.	1 paket	Zaa - Desa Were III - Kec. Golewa Selatan	PUPR
	Sesuai hasil expose Geologi di Bandung tentang hasil temuan fosil Stegodon di mata Menge Kecamatan Soa, Pemerintah harus membangun kembali jalan menuju lokasi penggalian fosil di Mata Menge Kecamatan Soa	1 paket	Desa Piga - Kecamatan Soa	PUPR
3.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			
	Saluran di jalan menuju dermaga wisata Nangamese yang segera ditangani	1 paket	Desa Latung - Kecamatan Riung	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

4.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani			
	- Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	Jalan rabat yang berlokasi di Kampung Perapo - Kelurahan Faobata - Kecamatan Bajawa	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		jalan masuk di sekitar kantor camat Golewa	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa Barat	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Rabat beton Ekoheto - Jubutana	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Peningkatan jalan dusun belakang kampung Rewupoko yang sudah di telford melalui dana desa tahun 2014	1 paket	Desa Uluwae - Kec. Bajawa Utara	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Rabat dari Kampung Wolowio - Pekuburan Wolowio	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Pembangunan beberapa bok dekker dan peningkatan saluran drainase	1 paket	Desa Tadho - Kecamatan Riung	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Peningkatan jalan menuju lokasi Puskesmas Naru Mau - Boba Desa	1 paket	Desa Wogowela - kecamatan Golewa Selatan	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan

Wogowela						
			Peningkatan jalan menuju lokasi pemakaman /TPU Kelurahan Foa	1 paket	Kelurahan Foa - Kec. Aimere	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah)di Kampung Bawarani	1 paket	Desa Bawarani - Kecamatan Golewa Selatan	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pembangunan tembok penyokong jalan dari kampung Bajawa ke Kota bajawa	1 paket	Kel. Bajawa - Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pembangunan jalan lingkungan di Desa Tarawaja	1 paket	Desa Tarawaja - Kecamatan Soa	PUPR
5.	Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah tanah pemda yang bersertifikat				
	-Keg.Penataan penguasaan pemilikan,pengunaan dan pemanfaatan tanah		Pengadaan lokasi tanah pemakaman menanggapi Peraturan Daerah tentang TPU	1 paket	Kelurahan Foa - Kec. Aimere	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Program Lingkungan Sehat dan Perumahan					
	- Keg.Penyediaan Sarana Air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masy.miskin		Lanjutan pekerjaan air bersih di Desa Lanamai I yang hingga saat ini masyarakat	1 paket	Dusun Warunembu - Desa Lanamai I - Kecamatan Riung Barat	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan

	belum menikmati.			
	Perbaikan jaringan air bersih di Mulang	1 paket	Desa Denatana - Kecamatan Wolomeze	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Jaringan air bersih	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa Barat	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	pelayanan air bersih	1 paket	Desa Tadho - Kecamatan Riung	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan air bersih di Desa Turamuri	1 paket	Desa Turamuri - Kecamatan Bajawa Utara	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemasangan jaringan air bersih	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan sarana air bersih	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Jaringan air bersih	1 paket	Poma - Desa Denatana - Kecamatan Wolomeze	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Kegiatan Penerangan Jalan Umum	Perhatikan lampu jalan di Desa Tarawaja	1 paket	Desa Tarawaja - Kecamatan Soa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan lampu jalan	1 paket	Kecamatan Bajawa	
- Keg.penataan kawasan kumuh perkotaan	Pembangunan saluran air dalam Kota Bajawa	1 paket	Kecamatan Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman

dan Pertanahan						
7.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
	- Keg.pencegahan dan pengurangan resiko bencana		Bantuan sengk – sengk yang rusak akibat gas bumi	1 paket	Desa Ulubelu - Kecamatan Golewa	BPBD
8.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	Wisata alam air panas Mengeruda terkesan tidak terawat, untuk menjaga kebersihan dan kerapian diharapkan menambah pegawai di tempat wisata air panas mengeruda	1 paket	Desa Piga - Kecamatan Soa	Dinas Pariwisata
9.	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase titik geolistik yang disurvei dan sumur bor yang dibangun	Permintaan untuk pemboran air minum ± 2 titik	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa Barat	PUPR
10.	Program Lingkungan sehat perumahan					
	- Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman		Pembukaan jalan lingkaran Kampung Bobou	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Pembukaan jalan baru di Desa Rakalaba	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman

					Barat	dan Pertanahan
			Pembukaan lorong ± 150 m	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa Barat	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Peningkatan jalan jurusan ogi pape pada ruas Bajawa Radamea	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	PUPR
			Peningkatan jalan ogi air terjun	1 paket	Kelurahan Faobata - Kec. Bajawa	Dinas Perumahan,kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Cakupan Konservasi wiayah Sumber Mata Air,Lahan Kritis dan Rawan Abrasi dan Kegiatan Pantai dan Laut Lestari	Upaya pemerintah mengatasi abrasi laut sepanjang pantai dalam wilayah Foa dengan penanaman penghijauan daerah pantai	1 paket	Kelurahan Foa - Kec. Aimere	Dinas Lingkungan Hidup
			Tembok penyokong pantai	1 paket	Kelurahan Foa - Kec. Aimere	Dinas Lingkungan Hidup

C. Bidang Sosial Budaya

Tabel 5.3
Hasil Reses Bidang Sosial Budaya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	USULAN	VOLUME	LOKASI	SKPD
1.	Program pengembangan destinasi pariwisata		Museum mini yang telah dibangun oleh Pemerintah Australia sampai saat ini belum selesai dikerjakan. Diharapkan bisa menyelesaikan pembangunan museum tersebut agar dapat dimanfaatkan.	1 paket	Desa Piga - Kecamatan Soa	Dinas Pariwisata
2.	Program Wajib Dikdas 9 tahun					
	-Penambahan ruang kelas SD dan SMP		Untuk kepentingan dunia pendidikan diperlukan penambahan bangunan sekolah SDI Dizi Gedha yakni ruang guru	1 paket	Desa Gizi Gedha - Kecamatan Golewa Barat	Dinas Pendidikan
	- Rehabilitasi sedang/berat		Pagar tembok SDI Beiposo	1 paket	Desa Wawowae - Kecamatan Bajawa	Dinas Pendidikan/Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertanahan
			Pembangunan sekolah 3 ruangan SATAP	1 paket	Dusun Mulu - Desa Mainai -	Dinas Pendidikan

	SDN 3 Wolomeze		Kecamatan Wolomeze	
	Mohon bantuan pembangunan pagar sekolah SDK Jerebuu	1 paket	Desa Dariwali I - Kecamatan Jerebuu	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Program pendidikan anak usia dini				
	- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Pembangunan pagar pengaman permainan di TK Tarawaja	1 paket	Desa Tarawaja - Kecamatan Soa Dinas Pendidikan
4. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya				
	- Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas di wilayah Boba di 5 (lima) desa dan diharapkan mulai dengan pelayanan kesehatan dari sekarang	1 paket	Desa Bawarani - Kecamatan Golewa Selatan Dinas Kesehatan
		Pembangunan Puskesmas dapat diakomodasi pada APBD TA. 2017 sebab tanah / lokasi pembangunan sudah bersertifikat, sudah digusur/diratakan	1 paket	Desa Rakalaba - Kecamatan Golewa Barat Dinas Kesehatan
5. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	pendistribusian kartu JKMN		1 paket	Desa Naruwolo I - Kecamatan Jerebuu Dinas Kesehatan

6. Program penataan daerah otonomi baru				
	Pemekaran Desa Bowaru agar bisa definitif	1 paket	Desa Persiapan Bowaru - Kecamatan Jerebuu	Dinas PMDP3A
	Pemekaran wilayah desa (Ndekundenu - Poma dan Mainai) masuk dalam wilayah Kabupaten Nagekeo, hal ini mohon diperhatikan dalam pemekaran wilayah.	1 paket	Desa Denatana - kecamatan Wolomeze	Dinas PMDP3A dan Bagian Pemerintahan
	meminta dukungan desa persiapan Mulumeze	1 paket	Desa lengkosambi - Kecamatan Riung	Dinas PMDP3A
- Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Masalah perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo	1 paket	Desa lengkosambi - Kecamatan Riung	Bagian Pemerintahan

Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah pada RKPD 2018 melalui proses teknokratik, partisipatif, politik, top down - bottom up sehingga diharapkan diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Ngada. Dengan demikian kegiatan yang akan dilakukan oleh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Tabel 5.4
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

Tabel 5.5
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTINITAS SKPD KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

Tabel 5.6
Rekap Belanja Prioritas dan Rutin Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018

No	Nama Perangkat Daerah	Prioritas	Rutin	Keterangan
TOTAL BELANJA				1,124,779,187,748
BELANJA TIDAK LANGSUNG		0	468,240,725,472	468,240,725,472
BELANJA LANGSUNG		582,040,115,856	74,498,346,420	656,538,462,276
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		540,097,102,710	21,153,331,964	
1	Dinas Pendidikan	51,356,232,319	551,980,730	Misi 4
2	Dinas Kesehatan	77,410,999,866	651,296,000	Misi 5
3	RSUD	56,902,000,000		Misi 5
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	284,051,470,000	4,077,578,496	Misi 1
		14,000,000,000		Misi 2
		2,637,500,000		Misi 3
		300,688,970,000	4,077,578,496	
5	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	31,415,300,000	12,278,133,700	Misi 1
		18,821,020,000		Misi 3
		50,236,320,000	12,278,133,700	
6	Kesbangpolinmas	418,930,525	370,239,500	Misi 6
7	Polpp dan kebakaran		2,394,175,700	
8	BPBD	975,000,000	563,144,000	Misi 6
9	Dinas Sosial	2,108,650,000	266,783,838	Misi 6

No	Nama Perangkat Daerah	Prioritas	Rutin	Keterangan
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		23,029,328,898	13,683,407,416.00	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		264,160,000	
11	Dinas PMDP3A	-	1,383,800,700	
12	Dinas Lingkungan Hidup	100,000,000	1,353,658,000	Misi 1
		2,261,830,000	0	Misi 3
		2,361,830,000	3,001,618,700	
13	DINAS AKPSP2KB	3,048,934,148	1,815,405,616	Misi 5
14	Dinas Perhubungan	360,000,000	275,461,000	Misi 3
15	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	2,726,037,750	3901415250	Misi 3
16	Dinas Penanaman Modal PTSP	0	541329950	
17	Dinas Ketahanan pangan	2,335,000,000	394230800	Misi 2
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	676,275,000	
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12,197,527,000	374129000	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsiban	0	623,916,400	
21	Dinas Infomatika dan Komunikasi	0	431,665,000.00	
URUSAN PILIHAN		9,639,390,000	3,975,653,491	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1,899,722,750	
23	Dinas Pertanian	9,069,500,000	1,323,484,241	Misi 2
24	Dinas Peternakan	450,000,000	520,096,500	Misi 2
25	Dinas Perindustrian	119,890,000	232,350,000	Misi 2
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		9,274,294,248	35,685,953,549	
26	BPLITBANG	700,000,000	1,784,001,140	Misi 3
		692,023,900		Misi 7
		1,392,023,900	1,784,001,140	

No	Nama Perangkat Daerah	Prioritas	Rutin	Keterangan
27	BADAN KEUANGAN	1,089,752,600	11,403,237,000	Misi 4
28	BKDIKLAT	4,642,964,105	627,325,960	Misi7
29	SEKRETARIS DPRD	-	8,279,364,600	
30	INSPEKTORAT	2,074,553,643	487,976,779	Misi 7
31	SEKRETARIAT DAERAH	75,000,000	8,881,403,070	
	Bagian Umum	-	5,320,378,680	Misi 7
	Bagian Organisasi	75,000,000	143,055,000	
	Bagian Hukum	-	789,681,100	
	Bagian Admas	-	459,985,390	Misi 7
	Bagian Kesra	-	175,990,800	
	Bagian Adpem	0	908,197,400	
	Bagian APU	0	869,114,700	
	Bagian Perekonomian	0	215,000,000	Misi 7
32	Kecamatan	0	4,222,645,000	Misi 7



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGADA TAHUN 2018



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Fokus RKPD 2018 adalah memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada. RKPD 2018 merupakan tahapan yang sangat strategis karena merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah selama 5 tahun, yaitu periode 2016 - 2021. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2018 ini dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang yang meliputi Pra Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2018 baik berupa program dan kegiatan maupun sasaran-sasaran pembangunan diharapkan dilaksanakan secara profesional. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2018 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Ngada. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD, untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Ngada.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

6. Kepala BP Litbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.
7. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala PD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2018.
8. Kepala BP Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
9. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Ngada dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Ngada secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.



URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN WAJIB PELAYANA DASAR				21,153,331,964		
DINAS PENDIDIKAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	526,980,730	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	25,000,000	APBD	Rutin
DINAS KESEHATAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	451,296,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	200,000,000	APBD	Rutin
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	587,608,496	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	5,489,970,000	APBD	Rutin
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	333,133,700	APBD	Rutin
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya jumlah tanah Pemda yang bersertifikat	Kab. Ngada	50%	11,945,000,000	APBD	Rutin
BADAN KESBANGPOLINMAS						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	359,489,500	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	10,750,000	APBD	Rutin
BPBD						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	563,144,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	-	APBD	Rutin
DINAS POLPP DAN KEBAKARAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	400,645,700	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	15,000,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan aparatur dalam pengendalian bahaya kebakaran	Kab. Ngada		576,530,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Adanya Kondisi lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Ngada		1,274,000,000	APBD	Rutin
Program Pemeliharaan Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal	Terekam dan tertanganinya berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat	Kab. Ngada		128,000,000	APBD	Rutin
DINAS SOSIAL						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	258,466,200	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	8,317,638	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN WAJIB NON PELAYANA DASAR				13,683,407,416		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	158,654,500	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	10,700,000	APBD	Rutin
Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketersediaan sarana dan prasarana di calon permukiman transmigrasi	Kab. Ngada	1 paket	50,000,000	APBD	Rutin
Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Bajawa	10	14,805,500	APBD	Rutin
Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kab. Ngada	31	30,000,000	APBD	Rutin
DINAS PMD P3A						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	203,233,750	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	2,621,400	APBD	Rutin
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terseleenggaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	Kab. Ngada	12 Kec 151 Desa/Kel	50,000,000	APBD	Rutin
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa.	Kab. Ngada	151 Desa/Kel	65,187,550	APBD	Rutin
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan serta pelestarian hasil pembangunan.	Kab. Ngada	200 Desa	97,398,000	APBD	Rutin
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab. Ngada	151 Desa/Kel	200,000,000	APBD	Rutin
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan	Kab. Ngada	151 Desa/Kel	308,800,000	APBD	Rutin
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	Kab. Ngada	450 orang	116,080,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Kab. Ngada	19 Orang	525,000,000	APBD	Rutin
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	337,658,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	29,000,000	APBD	Rutin
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Prosentase upaya pencegahan pencemaran air dan udara	Kab. Ngada	64.70%	287,000,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase ketersediaan sistem pengolahan air limbah bagi masyarakat sekitar kali waewoki	Bajawa	25%	600,000,000	APBD	Rutin
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	Bajawa	1.90%	100,000,000	APBD	Rutin
DINAS AKPSP2KB						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	727,145,686	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	8,259,930	APBD	Rutin
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase pemutakhiran data penduduk	Kab. Ngada	100.00%	1,080,000,000	APBD	Rutin
DINAS PERHUBUNGAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	238,461,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	37,000,000	APBD	Rutin
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	218,078,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	7,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa	Wangka, Jerebuu	2 pasar	3,655,500,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Kab. Ngada		150,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN	Meningkatnya jumlah konsumen yang terlindungi	Kab. Ngada		20,837,250	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	397,167,450	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	16,662,500	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya realisasi investasi	Kab. Ngada	1 Investor	68,750,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Meningkatnya minat investasi kerjasama dunia usaha	Kab. Ngada	2 Investor	58,750,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya data potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Kab. Ngada	3 Investor	-	APBD	Rutin
DINAS KETAHANAN PANGAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	394,230,800	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	-	APBD	Rutin
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	151,750,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	5,000,000	APBD	Rutin
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas , partisipasi peran aktif Pemuda	Kab. Ngada		289,525,000	APBD	Rutin
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet berprestasi di setiap cabang olahraga unggulan daerah	Kab. Ngada		200,000,000	APBD	Rutin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Kab. Ngada		30,000,000	APBD	Rutin
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	374,129,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	-	APBD	Rutin
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	117,268,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	-	APBD	Rutin
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terpeliharanya dokumen dan arsip daerah	Kab. Ngada		84,648,400	APBD	Rutin
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan	Kab. Ngada		422,000,000	APBD	Rutin
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	170,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	52,500,000	APBD	Rutin
Program pengembangan komunikasi dan informasi	Jumlah Website yang terupdate selama setahun	Bajawa	12 bulan	35,000,000	APBD	Rutin
Program kerjasama informasi dengan mass media	Persentase media yang dijadikan sarana untuk mempublikasikan informasi pemabngunan	Kab. Ngada	5 media	174,165,000	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN PILIHAN				3,975,653,491		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	172,122,750	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	27,600,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Wogowela	1 ton	1,700,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya			-	APBD	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUH PERIKANAN	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produksi perikanan			-	APBD	Rutin
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAAN PRODUKSI PERIKANAN	Terwujudnya pengelolaan, pemasaran dan produksi perikanan			-	APBD	Rutin
DINAS PERTANIAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	703,484,241	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	620,000,000	APBD	Rutin
DINAS PETERNAKAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	301,416,500	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	-	APBD	Rutin
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya populasi ternak yang sehat dan berkualitas	Kab. Ngada	2500 ekor	168,680,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan, sapi, babi, kerbau, kambing, kuda dan unggas			-	APBD	Rutin
PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Adanya penerapan teknologi tepat guna untuk peternakan sapi, babi, kambing	Kab. Ngada		50,000,000	APBD	Rutin
DINAS PERINDUSTRIAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	179,850,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	2,500,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan usaha	Bajawa	6 IKM	50,000,000	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				35,685,953,549		
BP LITBANG						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	541,971,765	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	65,500,000	APBD	Rutin
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Bajawa	100%	772,239,400	APBD	Rutin
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bajawa	4 kali	100,000,000	APBD	Rutin
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Bajawa	5 kali	79,586,900	APBD	Rutin
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan baik Yang Dibiayai Oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi Maupun APBN		6 kali	224,703,075	APBD	Rutin
Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kecamatan yang memiliki Peta Zona Nilai Tanah	Golewa, Golewa Barat	2 kecamatan	-	APBD	Rutin
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Penertiban Pelanggaran Penataan Ruang	Kab. Ngada	4 kasus	-	APBD	Rutin
BADAN KEUANGAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	1,061,107,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	5,015,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Bajawa		-	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bajawa	100%	1,200,000,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya sumber - sumber pendapatan daerah	Kab. Ngada	100%	4,127,130,000	APBD	Rutin
BKDIKLAT						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	381,959,200	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	245,366,760	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparatur sehingga dapat berperan lebih optimal dalam memberikan layanan	Kab. Ngada	100%	225,843,160	APBD	Rutin
SEKRETARIAT DPRD						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	4,545,487,600	APBD	Rutin
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	1,000,000,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur	Bajawa	100%	187,000,000	APBD	Rutin
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Fungsi Sekretariat dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah	Bajawa	100%	2,546,877,000	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
INSPEKTORAT						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	435,039,920	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	52,936,859	APBD	Rutin
SEKRETARIAT DAERAH						
BAGIAN ORGANISASI						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	143,055,000	APBD	Rutin
BAGIAN HUKUM						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	187,181,100	APBD	Rutin
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan di dalam dan di luar pengadilan.	Kab. Ngada	100%	150,000,000	APBD	Rutin
Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan	Kab. Ngada	100%	452,500,000	APBD	Rutin
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	459,985,390	APBD	Rutin
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	175,990,800	APBD	Rutin
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	2,272,220,200	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	77,250,000	APBD	Rutin
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHANN UMUM						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	624,114,700	APBD	Rutin
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wa. KDH	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Daerah	Kab. Ngada	100%	150,000,000	APBD	Rutin
BAGIAN UMUM						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	4,975,602,280	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	344,776,400	APBD	Rutin
BAGIAN PEREKONOMIAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	215,000,000	APBD	Rutin

URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
KECAMATAN						
KECAMATAN BAJAWA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	904,012,260	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	55,881,140	APBD	Rutin
KECAMATAN AIMERE						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	322,563,050	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	35,898,500	APBD	Rutin
KECAMATAN JEREBUU						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	196,941,100	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	33,362,600	APBD	Rutin
KECAMATAN INERIE						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	280,457,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	21,448,000	APBD	Rutin
KECAMATAN BAJAWA UTARA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	199,678,500	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	21,788,000	APBD	Rutin
KECAMATAN SOA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	180,122,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	25,048,000	APBD	Rutin
KECAMATAN WOLOMEZE						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	163,132,000	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	21,788,000	APBD	Rutin
KECAMATAN RIUNG						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	456,118,100	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	56,890,000	APBD	Rutin
KECAMATAN RIUNG BARAT						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	254,608,800	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	47,188,850	APBD	Rutin
KECAMATAN GOLEWA						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	250,534,700	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	23,022,000	APBD	Rutin
KECAMATAN GOLEWA SELATAN						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	293,257,100	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	17,900,000	APBD	Rutin
KECAMATAN GOLEWA BARAT						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Ngada	100%	350,329,900	APBD	Rutin
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	Kab. Ngada	100%	44,038,000	APBD	Rutin

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				477,775,902,972		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Badan Keuangan Sebagai SKPD)				477,775,902,972		
	1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk operasional KDH	Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ngada	Kab. Ngada	12	223,732,012,444	APBD	Prioritas
	2 Belanja Hibah	Penyediaan dana hibah (bulan)	Kab. Ngada	13	4,500,000,000	APBD	Prioritas
	3 Belanja Bantuan Sosial	Penyediaan bantuan sosial (bulan)	Kab. Ngada	14	6,183,433,417	APBD	Prioritas
	4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Penyediaan alokasi dana desa - tunjangan Kades dan BPD, dana pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol	Kab. Ngada	151 Desa/Kelurahan	121,000,000,000	APBD	Prioritas
	5 Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol		Kab. Ngada		49,119,279,611	APBD	Prioritas
	6 Belanja Tidak Terduga	Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan)	Kab. Ngada	12	1,000,000,000	APBD	Prioritas
	8 Dana Cadangan	Dana Cadangan	Kab. Ngada	12	5,000,000,000	APBD	Prioritas
	9 Tambahan Penghasilan	Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN Kabupaten Ngada	Kab. Ngada	12	18,500,000,000	APBD	Prioritas
	10 Integrasi JKMN ke JKN Masyarakat Miskin	Penyediaan anggaran untuk 10.000 penduduk miskin	Kab. Ngada	12	3,000,000,000	APBD	Prioritas
	11 Beasiswa Mahasiswa Undana	Penyediaan anggaran untuk fasilitasi mahasiswa semester akhir Undana dalam menyusun skripsi di Undana	Kab. Ngada	500 org	12,500,000,000	APBD	Prioritas
	12 BOSDIK	Penyediaan bantuan BOSDIK bagi tenaga pendidikan di kelurahan	Kab. Ngada	16 Kelurahan	11,035,177,500	APBD	Prioritas
	13 BOKDA	Penyediaan bantuan BOKDA bagi tenaga kesehatan di Kelurahan	Kab. Ngada	16 kelurahan	3,500,000,000	APBD	Prioritas
	14 Bantuan Instalasi Listrik	Penyediaan bantuan untuk pemasangan instalasi listrik bagi masyarakat miskin	Kab. Ngada	1000 rumah	2,500,000,000	APBD	Prioritas
	15 Tenaga Teknis Daerah (S2 dosen pendanaan penda)	Penyediaan tenaga teknis daerah	Kab. Ngada	67 orang	1,206,000,000	APBD	Prioritas
	16 Bantuan perumahan bagi masyarakat miskin	Penyediaan bantuan perumahan (bedah rumah) bagi masyarakat miskin per rumah 15.000.000	Kab. Ngada	1000 rumah	15,000,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	BELANJA LANGSUNG						
	BELANJA PRIORITAS DAERAH						
	PRIORITAS MISI PERTAMA				311,670,770,000		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				280,155,470,000		
	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<i>Presentase panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dalam kabupaten</i>		806	270,450,000,000	APBD/APBN	Prioritas
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (kilometer)					
	1 Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (kilometer)			246,950,000,000		
		Usulan Musrenbang					
		Peningkatan jalan(lapen) Rawangkalo - Miris	Kec. Riung	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Bajawa Ekoheto	Kec. Riung	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Bu'e ree - Turetoro	Kec. Soa	1	500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Loa – Mengeruda	Kec. Soa	1	750,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan kurubhoko - Mawu	Kec. Wolomeze	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Nunuradabe'i – Tarawaja	Kec. Bajawa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Jerebuu Nikisie	Kec. Jerebuu	1	6,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan menuju Pasar Bobou	Kec. Bajawa	1	-	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Turetoro – Kisaraghe	Kec. Bajawa Utara	1	4,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Laja - Takatunga - Ngorabolo - Malamako	Kec. Bajawa Utara	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Tanawau – Tarawaja	Kec. Soa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Doka – Wajamala	Kec. Golewa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan menuju pasar malanuza	kec. Golewa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Tuku Para ke Zeu	Kec. Golewa Barat	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Nirmala - Hedhapoma	Kec. Golewa Selatan	1	750,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Reko - Za'a (Lanjutan)	Kec. Golewa Selatan	1	3,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Waturoka - Wae Soa	Kec. Golewa Selatan	1	-	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Peningkatan Jalan Were I - Were II	Kec. Golewa Selatan	1	3,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Hobosara - Takatunga	Kec. Golewa Selatan	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Nikisie - Wogowela	Kec. Jerebuu	1	6,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Rutojawa – Legeriwu - Sewowoto	Kec. Jerebuu	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Mengi – Rate Awe	Kec. Jerebuu	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan dalam kota kecamatan (lorong – lorong dalam kota kecamatan aimere)	Kec. Aimere	1	-	APBD	Prioritas
		Usulan Dinas PUPR					
		Peningkatan Jalan Rakalaba - Zeu	Kec.Golewa Barat	1	8,350,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Malanuza - Bobou	Kec.Golewa	1	20,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Aimere - Waebela	Kec.Inerie	1	13,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Ranamoe - Teni	Kec. Bajawa Utara	1	25,000,000,000		
		Peningkatan Jalan Warunembu - Riominsi	Kec.Riung Barat	1	16,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Teong - Warunembu (HRS)	Kec. Riung Barat	1	6,000,000,000	DAK 2018	
		Peningkatan Jalan Ria - Mbarungkei	Kec.Riung Barat	1	5,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Maronggela - Ria	Kec. Riung Barat	1	8,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Tadha - Waebela	Kec. Jerebuu	1	5,000,000,000	DAK	Prioritas
		Peningkatan jalan Wate Kembang Teding	Kec Riung Barat	1	2,500,000,000	APBD	
		Peningkatan Jalan Puuhelo - Sesu - Nikisie	Kec. Jerebuu	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Rakalaba - Were	Kec.Golewa barat	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Dadawea - Ngedumee	Kec.Golewa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Maraterong - Munting - Wate	Kec.Riung Barat	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Padhagala - Malafai	Kec.Bajawa Utara	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Turekisa - Late	Kec.Golewa Barat	1	3,000,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Peningkatan Jalan Mulu - Keja - Gurulunca - Lenkosambi			10,000,000,000	DAK 2018	
		Peningkatan Jalan Teong - Warunembu (Warusae)	Kec.Riung Barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Waebetu - Tarawaja	Kec. Bajawa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Wue - Namut	Kec. Riung Barat	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Maronggela Nampe	Kec.Riung Barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Ogi - Late - Dorarapu	Kec. Golewa Barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Waturoka - Waesoa - Bebho	Kec. Golewa Selatan	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Mataloko - Dorarapu	Kec.Golewa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Mangulewa - Dorarapu (Umadhao -Dorarapu)	Kec.Golewa Barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kota Riung	Kec. Riung	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Poma - Sekojawa	Kec. Wolomeze	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Polsek Golewa - Panas Bumi	Kec. Golewa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Piga - Lowobia	Kec. Soa	1	6,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Dorarapu-Dhokimatawae (HRS)	Kec. Golewa Barat		5,000,000,000		
		Peningkatan Jalan Bunganuza - Dizigedha	Kec. Golewa barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Riominsi-Warusae - Teong	Kec. Riung Barat	1	2,500,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Jalan Bhetopadhi -Bea	Kec. Golewa Barat	1	700,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan dalam kota bajawa	Kec Bajawa	1	8,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Loa - Kadhahoza	Kec Soa	1	3,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Bookolo	Kec Soa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Loa - SMP Selamat - Tarawaja (HRS)	Kec Soa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan jalan Menge Boamenge	Kec Bajawa Utara		2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Kampung Beiposo - Taman Ratu Semesta Alam	Kec. Bajawa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Bea - Nage	Golewa Barat	1	4,000,000,000	APBD	Prioritas
		Peningkatan Jalan Nunuredobei-Paupadhi-Tarawaia	Kec.Bajawa	1	2,200,000,000	APBD	Prioritas
		PEMBUKAAN JALAN DAU :					

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Pembukaan jalan Wue - Namut	Kec. Riung Barat	1	6,000,000,000	APBD	Prioritas
		Pembukaan jalan Tukupara Zeu	Kec. Golewa Barat	1	5,000,000,000	APBD	Prioritas
		Pembukaan jalan Dolu Hobodoli	Kec Golewa	1	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Pembukaan Jalan Ria -Latung	Kec. Riung Barat	1	1,500,000,000	APBD	Prioritas
		Pembukaan jalan Mangulewa Dorarapu	Kec. Bajawa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Pembukaan jalan Piga Loa	Kec Soa	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Usulan Dinas PUPR					
		Pembukaan Jalan Umadhao - Moromoto	Kec. Golewa Barat	1	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Belanja pendukung					
		Pengawasan Teknis DAK 2018		1	300,000,000	APBD	Prioritas
		Pengawasan Teknis DAU 2018 (Swakelola)		1	100,000,000	APBD	Prioritas
		Perencanaan Teknis 2018		1	150,000,000	APBD	Prioritas
		Perencanaan Teknis Jalan 2018 (Swakelola)		1	150,000,000	APBD	Prioritas
	2 Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang sudah dibangun			23,500,000,000		
		Perencanaan Teknis Jembatan 2018		1	200,000,000	APBD	Prioritas
		Pengawasan Teknis Jembatan 2018		1	300,000,000	APBD	Prioritas
		Belanja pendukung		1	100,000,000	APBD	Prioritas
		Usulan Musrenbang					
		Pembangunan Jembatan Nangarodo	Kec. Inerie	1	2,300,000,000	APBD	Prioritas
		Usulan Dinas PUPR					
		Pembangunan Jembatan Alolabo	Kec.Golewa Selatan	13	2,500,000,000	APBD	Prioritas
		Pembangunan Jembatan Waenam	Kec. Jerebuu	1	2,250,000,000	APBD	Prioritas
		Jembatan (Riominsi)	Kec. Riung Barat		2,500,000,000	APBD	Prioritas
		Jembatan waesae	Kec Bajawa		4,000,000,000	APBD	Prioritas
		Jembatan Lingkar selatan 5 jembatan	Golewa, Golewa Selatan, Aimere		8,000,000,000	APBD	Prioritas
		Pembangunan Jembatan Bobou 1	Kec. Bajawa	11	1,350,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Mengembalikan/ mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten ke kondisi baik sehingga bisa ditempuh dengan kec. Rata2 ≥ 40 km/jam		20	3,000,000,000	APBD	Prioritas
	1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Terawatnya dan diperbaikinya kondisi jalan dan badan jalan		10	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Rehabilitasi jalan dan jembatan Ndekundenu - Ramba	Kec. Wolomeze	8	2,000,000,000	APBD	Prioritas
		Rehabilitasi Jalan dan jembatan Poma -Sekojava	Kec. Wolomeze	5	-	APBD	Prioritas
	2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Terawatnya dan diperbaikinya kondisi jalan dan badan jalan		10	1,000,000,000	APBD	Prioritas
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan				APBD	Prioritas
	3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terukur dan Terjaganya mutu konstruksi (Titik)	Bajawa	800	305,470,000	APBD	Prioritas
	1 Perencanaan, Pengendalian, Program, dan Evaluasi Pelaksanaan serta pengujian	Terakreditasinya laboratorium kebinamargaan Dinas PU, dan meningkatnya mutu jalan dan utilitas jalan kabupaten serta bidang ke-PU-an		Pengujian Mutu Pekerjaan	305,470,000	APBD	Prioritas
	4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Terpeliharanya peralatan yang mendukung kegiatan kebinamargaan yang mendukung program	Bajawa	25	-	APBD	Prioritas
	1 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan labotratorium yang mendukung mutu jalan dan jembatan	Bajawa	25	-	APBD	Prioritas
	2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya peralatan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan					
	5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (Unit)		1	6,400,000,000	APBD PROV	Prioritas
	1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (Unit)			6,400,000,000		
		Terbangunnya sarana air bersih / minum di kelurahan dan desa		1			
		Pembangunan embung Waetano	Kec. Wolomeze	1	5,500,000,000	APBD PROV	Prioritas
		Waduk Soabu'u (Perencanaan Teknis)	Kec. Bajawa Utara	1	350,000,000	APBD PROV	Prioritas
		Pembangunan Bendungan Tiwu Kela (Perencanaan Teknis)	Kec. Golewa	1	300,000,000	APBD PROV	Prioritas
		Pembangunan Bendungan Soa	Kec. Soa	1	250,000,000	APBD PROV	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				31,415,300,000	APBD	Prioritas
	Program Lingkungan Sehat Perumahan				21,900,000,000	APBD	Prioritas
	1 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin						
		Pembangunan SAB IKK Inerie (Waeroa)	Desa Manubhara, Tiwurana, Waebela Kec. Inerie	1	21,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Perencanaan Teknis			300,000,000	APBD	Prioritas
		Pengawasan Teknis			250,000,000	APBD	Prioritas
		Biaya Penunjang			350,000,000	APBD	Prioritas
	2 Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Untuk Pembangunan dan Perbaikan Perumahan				9,515,300,000	APBD/APBN	Priotitas
		Pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kel. Benteng Tengah	Kec. Riung	50	750,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah Desa Taen Terong I	Kec. Riung	50	750,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Fasilitasi pemberian bantuan pembangunan dan perbaikan rumah Desa Wolomeze II	Kec. Riung Barat	30	450,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Peningkatan perumahan masyarakat Kec. Soa	Kec. Soa	50	750,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Penyediaan Perumahan Layak Huni bagi MBR	Kec. Wolomeze	70	1,050,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Bantuan pembangunan dan perbaikan perumahan KK Miskin (MBR) di Turekisa, Watunay,Sobo I, Beapawe	Kec. Golewa Barat	311	4,665,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Penyediaan Perumahan Layak Huni bagi MBR	Jerebuu	40	600,000,000	APBD/APBN	Priotitas
		Belanja Penunjang			500,300,000	APBD	Priotitas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	3 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan			82	750,000,000	APBD/APBN	Priortitas
	Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang berfungsi baik					
		Pengadaan Material instalasi penerangan jalan umum Untuk Pemeliharaan	Kab. Ngada	1	500,000,000	APBD	Prioritas
		Pengadaan Pulsa Listrik	Kab. Ngada	1	250,000,000	APBD	Prioritas
		Pengadaan Mobil Tangga		1	-	APBD	Prioritas
		Belanja Pendukung		1	-	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				100,000,000		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase cakupan konservasi wilayah sumber mata air, lahan kritis dan rawan abrasi		76.6%	100,000,000	APBD	Prioritas
	1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan				100,000,000	APBD	Prioritas
		- Luas areal lahan kritis yang ditanami, melalui upaya :		10 ha		APBD	Prioritas
		- Penanaman anakan penghijauan lahan kritis dengan 10.000 anakan ampupu	Paukate Desa Keligejo dan Waewea			APBD	Prioritas
	2 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber - Sumber Air					APBD	Prioritas
		- Dana :			-	APBD	Prioritas
		- Jumlah mata air yang dikonservasi, melalui		7 mata air		APBD	Prioritas
		* Penggalan parit jebakan air	Desa Sobo (wae biku), Desa Watunai (wae rakateda), Desa Nginamanu Selatan (waerama) dan Nginamanu (ma. Longala), Desa Turamuri, Desa Were, Desa Pape (wae Bewa)	3000 parit jeb		APBD	Prioritas/ Musrenbang
		* Penanaman anakan konservasi air	Desa Sobo (wae biku), Desa Watunai (wae rakateda), Desa Nginamanu Selatan (waerama) dan Nginamanu (ma. Longala), Desa Turamuri, Desa Were, Desa Pape (wae Bewa)	3000 anakan		APBD	Prioritas
		- Jumlah sekolah yang didampingi sebagai calon usulan penerima penghargaan adiwiyata	sekolah di 12 kecamatan	9 sekolah		APBD	Prioritas
		- Jumlah masy/kel masy yg diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru Tk. Nasional dan Provinsi	12 kecamatan	2 org/kel		APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KEDUA				35,836,917,000		
	DINAS PERTANIAN				9,069,500,000		
	1 Peningkatan Kesejahteraan Petani				875,000,000		
		- Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	3 Kecamatan	6 UPH	200,000,000	APBD	Prioritas
		- Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	3 Kecamatan	1 Paket	450,000,000	APBD	Prioritas
		- Jumlah Kelompok Tani yang difasilitasi mendapatkan modal dari Perbankan	12 Kecamatan	287 Klpk	75,000,000	APBD	Prioritas
		- Jumlah Kelompok Tani Pelaku Agribisnis yang terlatih	12 Kecamatan	36 Poktan	75,000,000	APBD	Prioritas
		- Meningkatkan kelas kemampuan kelompok dan meningkatkan kesejahteraan Petani	12 Kecamatan	100 Poktan	75,000,000	APBD	Prioritas
	1 Peningkatan kemampuan lembaga petani	- Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok	3 Kecamatan	4 UPH	200,000,000	APBD	Prioritas
		- Tersedianya tata kelola MPIG sebagai institusi Pemegang hak IG	3 Kecamatan	127 UPH	450,000,000	APBD	Prioritas
		- Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Tani	12 Kecamatan	1024 Poktan	225,000,000	APBD	Prioritas
	2 Peningkatan Ketahanan Pangan				1,860,000,000	APBD	Prioritas
		- Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Perkebunan		<i>Padi : 5,8 ton/ha</i>	750,000,000	APBD	Prioritas
				<i>Jagung : 3,8 ton/ha</i>			
				<i>Kedelai : 2,95 ton/ha</i>			
		- Adanya Perluasan Areal Tanam Untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan		<i>Padi : 0 ha</i>	-		
				<i>Jagung : 320 ha</i>	-		
				<i>Kedelai : 320 ha</i>	-		
				<i>Kopi : 6.556,6 Ha</i>	250,000,000	APBD	Prioritas
d		- Adanya Peremajaan Tanaman Kopi		<i>100 Ha</i>	250,000,000	APBD	Prioritas
		- Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan		<i>Padi : 69.223 ton/</i>	50,000,000		
				<i>Jagung : 48.598,2</i>	50,000,000		
				<i>Kedelai : 2.867,4</i>	50,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
				<i>Kac. Merah : 480</i>	50,000,000		
				<i>Kopi : 4.112,1 ton</i>	150,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Terlaksananya pengamatan peramalan dan pengendalian OPT tanaman pangan	12 Kecamatan	20.000 ha	150,000,000	APBD	Priortas
			- Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	12 Kecamatan	1 paket	100,000,000	APBD	Priortas
	2	Penyusunan Data Base	Data Statistik Tanaman Pangan	Kabupaten (Bajawa)	48 Laporan	200,000,000	APBD	Priortas
		Potensi Produksi pangan	Hortikultura, Perkebunan					
	3	Penanganan pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Power Treser	1 Kecamatan	0 unit	-		
	4	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan palawija	- Saprodi tanaman padi	4 Kecamatan	10 ha	100,000,000	APBD	Priortas
			- Saprodi tanaman jagung	4 Kecamatan	10 ha	100,000,000	APBD	Priortas
			- Saprodi Tanaman kedelai	4 Kecamatan	10 ha	100,000,000	APBD	Priortas
	5	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	- Sawah Baru (DAK)	2 Kecamatan	0 ha	-	APBD	Priortas
			- Areal tanam jagung	4 Kecamatan	0 ha	-	APBD	Priortas
			- Areal tanam Kedele	4 Kecamatan	0 ha	-	APBD	Priortas
	6	Pengembangan Pertanian Pada lahan Kering	- Perluasan areal tanaman Kopi	3 Kecamatan	100 ha	250,000,000	APBD	Priortas
			- Peremajaan Tanaman Kopi	3 Kecamatan	100 Ha	250,000,000	APBD	Priortas
			- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3 Kecamatan	20 Ha	260,000,000	APBD	Priortas
	7	Pengembangan Perbenihan/ Pebibitan	- Benih Padi	5 Kecamatan	132 ton/thn	50,000,000	APBD	Priortas
			- Benih jagung	4 Kecamatan	50 ton/thn	50,000,000	APBD	Priortas
			- Benih Kedele	4 Kecamatan	50 ton/thn	50,000,000	APBD	Priortas
			- Benih Kacang Merah	3 Kecamatan	480 ton/thn	50,000,000	APBD	Priortas
	8	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	- Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tan. Kopi	3 Kecamatan	4112.1	150,000,000	APBD	Priortas
	3	Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Usaha-usaha Pertanian meliputi upaya Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian serta meningkatnya penyebaran informasi komoditi unggulan			110,000,000	APBD	Priortas
					3 Paket	179,555,000	APBD	Priortas
	1	Promosi atas hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah Ekspor Kopi AFB	Bajawa	300 ton	100,000,000	APBD	Priortas
	2	Pengolahan informasi	informasi permintaan pasar atas	12 Kecamatan	1 org	10,000,000	APBD	Priortas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	permintaan pasar atas hasil	hasil produksi pertanian					
	prod pertanian/perkebuan masy.						

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
	4	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			4,880,000,000			
		Meningkatnya Usaha-Usaha Pertanian Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian/Perkebunan		100%	2,979,549,632	APBD	Prioritas	
	1	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	- Kerjasama Lembaga Mitra - fasilitasi Instalasi Perkebunan	Bajawa Bajawa	1 lembaga 2 Paket	100,000,000 100,000,000	APBD APBD	Prioritas Prioritas
			- Peralatan dan Perlengkapan UPH	3 Kecamatan	6 UPH	30,000,000	APBD	Prioritas
	2	Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna	- Jaringan irigasi tersier (DAK) - DAM Parit (DAK) - JUT - Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	3 Kecamatan 5 Kecamatan 4 Kecamatan 12 Kecamatan	10 Unit 10 Unit 0 Unit 12 BPP	1,500,000,000 1,500,000,000 - 1,500,000,000	APBD APBD APBD APBD	Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
	3	pelatihan penerapan pertanian modern bercocok tanam	- Demplot PTT Padi - Demplot PTT Jagung - Demplot PTT Kedelai	12 BPP 12 BPP 12 BPP	12 ha 12 ha 12 ha	50,000,000 50,000,000 50,000,000	APBD APBD APBD	Prioritas Prioritas Prioritas
	5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Melalui Penyediaan SDM		5 poktan	44,500,000 44,500,000	APBD	Prioritas
	1	Sertifikasi Bibit Unggul	Poktan Penangkar	3 Kecamatan	4 Poktan	44,500,000	APBD	Prioritas
	6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ perkebunan Lapangan	Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian		10%	1,300,000,000 1,300,000,000	APBD	Prioritas
	1	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	PPL	12 BPP / 12 Kec	114 orang	1,300,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PETERNAKAN				450,000,000	APBD	Prioritas
	1 Program Peningkatan Produksi Hasil Produksi Peternakan	Adanya Peningkatan Populasi Ternak		Sapi : 30.912 ekor		APBD	Prioritas
				Kambing : 24.581 ekor			
				Babi : 118.266 Ekor			
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana pembibitan ternak	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana pembibitan ternak Terlaksananya penyebaran ternak kepada masyarakat - Sapi - Kerbau - Kuda - Kambing - Babi - Unggas - Unggas		1 Unit 31.457 ekor 13.776 ekor 11.096 ekor 24.949 ekor 188.339 ekor	- - 	APBD	Prioritas
	2 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat	Adanya peningkatan mutu bibit dan populasi ternak melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) - Sapi - Babi - Kuda		50 ekor 50 ekor 15 ekor	300,000,000	APBD	Prioritas Musrenbangka
	3 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan insomminasi buatan	BBIB Singosari	2 orang	-	APBD	Prioritas
	4 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pendataan potensi ternak dan pengadaan kartu ternak pada resort peternakan	12 Kecamatan	12 resort	150,000,000	APBD	Forum SKPD

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				14,000,000,000	APBD/APBN	Prioritas
	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Meningkatnya Panjang Jaringan Irigasi yang baik (m)		7000	14,000,000,000	APBD/APBN	Prioritas
	1 Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi	1). Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih/ minum. 2). Meningkatnya prosentase panjang saluran irigasi yang baik terhadap luasan fungsional lahan pertanian		7000	14,000,000,000		
		Perencanaan Teknik Irigasi (Swakelola)			300,000,000		
		Pengawasan Teknik (DAK Reguler)			200,000,000		
		Pengawasan Teknis (DAK dan DAU)			-		
		Belanja Penunjang PPK					
		1 Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waebana	Kec. Bajawa Utara	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan jaringan Irigasi D. I .Soafuti	Kec. Bajawa	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Boti	Kec. Golewa	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waerama	Kec. Wolomeze	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Tiwukela	Kec. Golewa Selatan	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waebua	Kec. Aimere	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waemolu	Kec. Bajawa Utara	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waeneta	Kec. Bajawa utara	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Paurowa	Kec. Golewa Selatan	1	500,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
						Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		2 Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Pene	Kec Soa	1	1,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Deti	Kec Soa	1	4,000,000,000	APBN	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				12,197,527,000		
	Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan			37,075,000		
	- Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran Pariwisata	Jumlah buku profil dan leftlet	DPK		-	APBD	Prioritas
	- Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata	Jumlah website pariwisata	DPK		-	APBD	Prioritas
	- Pengembangan jaringan kerjasama promosi	Jumlah lembaga mitra pemasaran	DPK	3 Lembaga	-	APBD	Prioritas
	- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah event pariwisata dan budaya		2 Event	37,075,000	APBD	Prioritas
	Program Pengembangan Destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas dan daya saing obyek wisata			12,080,877,000	APBD	Prioritas
	- Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah daya tarik obyek wisata	DPK	8 obyek wisata	1,887,650,000	APBD	Prioritas
		Jumlah obyek wisata budaya yang berkarakteristik khusus			10,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	- Pengembangan Jenis dan Paket wisata Unggulan	Jumlah jenis dan paket wisata	DPK	6 jenis dan paket	-	APBD	Prioritas
	- Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia	Jumlah desa wisata yang berkualitas	DPK	6 desa	49,027,000	APBD	Prioritas
	- Pengembangan Daerah tujuan wisata	jumlah sarana dan prasarana di ODTW	DPK	18 sarpras	144,200,000	APBD	Prioritas
	- Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi usaha	Jumlah usaha jasa yang berstandarisasi	DPK	5 usaha jasa	-	APBD	Prioritas
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kemitraan promosi pariwisata			40,000,000	APBD	Prioritas
	- Pengembangan dan penguatan Informasi dan Database	Jumlah data dan Naskah akademik	DPK	2 NA & Data 4 bid	-	APBD	Prioritas
	- Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan	Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih	DPK	6 lembaga	-	APBD	Prioritas
		jumlah pembentukan dan pembinaan pokdarwis desa		5 pokdarwis dan desa	-	APBD	Prioritas
	- Pengembangan Sumber daya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata		DPK		40,000,000	APBD	Prioritas
	- Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah masy yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata (Bimtek dan Penguatan	DPK	13 kel	-	APBD	Prioritas
	- Pengembangan dan Penguatan Kelompok Panganan/Kuliner Pendukung Pariwisata dan	Jumlah kel kuliner yang dilatih dan mandiri	DPK	10 kel	-	APBD	Prioritas
	- Pengembangan dan Penguatan Kelompok Kriva Pendukung Pariwisata dan	Jumlah kel kriya yang dilatih dan mandiri	DPK	10 kel	-	APBD	Prioritas
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			39,575,000	APBD	Prioritas
	- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah dokumen sejarah, nilai, tradisi dan adat istiadat	DPK	1 jenis dan 5 copian	39,575,000	APBD	Prioritas
	- Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	jumlah dokumen perencanaan	DPK		-	APBD	Prioritas
		jumlah site museum yang dibangun				APBD	Prioritas
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya keragaman seni budaya daerah				APBD	Prioritas
	- Pengembangan kesenian dan budaya daerah	Jumlah penguatan kapasitas sanggar seni dan budaya	DPK		-	APBD	Prioritas
	- Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Jumlah dialog kebudayaan yang	DPK		-	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kemitraan pemangku kepentingan bidang kebudayaan				APBD	Prioritas
	- Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LM dan Perusahaan swasta	Jumlah lembaga pemangku adat di daerah yang ditata	DPK		-	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS KETAHANAN PANGAN				2,335,000,000		
	1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Peningkatan ketersediaan pangan	Kab. Ngada	1	2,335,000,000	APBD	Prioritas
		Meningkatnya areal produksi hortikultura		10 ha			
	1 Pemantauan dan Analisis akses Harga Pangan Pokok	Terwujudnya kestabilan harga gabah/beras di tingkat petani	12 Kec. Dan Kabupaten	sesuai HPP	40,000,000	APBD	Prioritas
	2 Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan Pangan	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Ngada tahun 2018	Kabupaten	1 Dokumen	45,000,000	APBD	Prioritas
	3 Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (TKPG) Tkt. Kab Ngada	Kabupaten	1 Tim	-	APBD	Prioritas
		Terlaksananya investigasi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi	12 Kecamatan	12 bulan	-	APBD	Prioritas
	4 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Tersusunnya Peta Rawan Pangan (FSVA) Berjalannya Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kabupaten	1 kali	-	APBD	Prioritas
	5 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai pangan	Berjalannya Survei Pola Konsumsi Ril Pangan Rumah tangga dan Analisis Pola Pangan Harapan/PPH) Tkt. Kabupaten Ngada	Kabupaten	80	-	APBD	Prioritas
	6 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Tersedianya Dana			-	APBD	Prioritas
		Terlaksananya kegiatan HPS tingkat kabupaten dan keikutsertaan ke tingkat provinsi dan nasional	12 Kecamatan	0	-	APBD	Prioritas
		Berjalannya Sosialisasi B2SA bagi pengurus KWT			-	APBD	Prioritas
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pangan yang B2SA	12 Kecamatan	50 KWT		APBD	Prioritas
	7 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Sidak Pangan Segar dan Pangan Olahan			-	APBD	Dalam rangka terdeteksinya peredaran Pangan yang tercemar Pestisida dan kadaluarsa
		Pengadaan Pesticide dan Formaldehyde Test Kit	12 Kecamatan	2 Kali	-	APBD	
		Tercegahnya konsumen pangan dari pangan yang tidak layak konsumsi			-	APBD	
		Tercegahnya konsumen pangan dari pangan yang tidak layak konsumsi	Kabupaten	2 Unit		APBD	
	8 Pengembangan Sistem Pertanian pada Lahan Kering	Meningkatnya ketersediaan produk hortikultura (Anggur)	12 Kecamatan	10 ha	2,240,000,000	APBD	Musrenbang Kab
		Pengembangan Tanaman Sorgum, Jewawut, Jali dan Umbi-umbian	12 Kecamatan	10 ha	10,000,000	APBD	Musrenbang Kab

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PERINDUTRIAN				119,890,000		
	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA INDUSTRI	Meningkatnya volume dan harga pemasaran IKM		10 IKM	-	APBD	Prioritas
		Meningkatnya produksi indutri olahan kelapa		0	119,890,000		
	1 Pembangunan akses transportasi sentra - sentra industri potensial	Jumlah sentra indutri yang difasilitasi	Foa	1 IKM	100,000,000	APBD	Prioritas/Musr enbang
	2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sosialisasi pengelolaan minyak goreng kelapa	Foa	5 kali	19,890,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KETIGA				47,127,407,750		
	BP LITBANG				700,000,000		
	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Jumlah dokumen Review RTRW	Bajawa	1	700,000,000	APBD	Prioritas
		2. Jumlah Perda Review RTRW	Bajawa	0			
	1 Penyusunan Revisi dan uji publik Peraturan Daerah tentang RTRW	Jumlah Dana	Bajawa	2	150,000,000	APBD	Prioritas
		Jumlah Perda Review RTRW					
	2 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah Dana	Bajawa	1	550,000,000	APBD	Prioritas
		Master Plan Kawasan Kebun Raya Wolobobo			400,000,000	APBD	Prioritas
		Tata Batas Wolobobo			150,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2,437,500,000		
	1 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2.	Jumlah daerah genangan yang belum tertangani dalam kota Bajawa		69 titik		APBD	Prioritas
		Panjang saluran drainase pada IKK yang ditangani (meter)		2000 m	1,937,500,000	APBD	Prioritas
	1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Perencanaan Teknis			200,000,000	APBD	Prioritas
		Pengawasan Teknis			150,000,000	APBD	Prioritas
		Belanja Pendukung			87,500,000	APBD	Prioritas
		Pembangunan saluran induk dalam kota bajawa	Kec. Bajawa	232	1,500,000,000	APBD	Prioritas
	2 Program Perencanaan Tata Ruang	- Jumlah dokumen Penataan Ruang Kota	Inerie, Golbar dan GolSel	3 kecamatan	500,000,000	APBD	Prioritas
		- Jumlah Perda Penataan Ruang Kota	1 perda	1 perda			
		- Jumlah masterplan dan perencanaan teknis	Wolobobo	1 Dokumen			
	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen Penataan Ruang Kota	RDTR Kota Bajawa		500,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				38,642,040,000	APBD	Prioritas	
Program Lingkungan Sehat Perumahan					38,642,040,000	APBD	Prioritas	
	1	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Presentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani		1	948,000,000	APBD	Prioritas
		Rehabilitasi Drainase + Penutup Saluran (Plat Beton) Kelurahan Ngedukelu	Kel. Ngedukelu	330	88,000,000	APBD	Prioritas	
		Drainase + Penutup Saluran (Plat Beton) Kelurahan Ngedukelu	Kel. Ngedukelu	275	75,000,000	APBD	Prioritas	
		Jaringan Perpipaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah + Sumur Resapan	Kel. Ngedukelu	1	100,000,000	APBD	Prioritas	
		SPAL + Sumur Resapan Kelurahan Tanalodu	Kel. Tanalodu	1	100,000,000	APBD	Prioritas	
		Drainase Kelurahan Tanalodu	Kel. Tanalodu	258	75,000,000	APBD	Prioritas	
		Drainase Kelurahan Trikora	Kel. Trikora	200	60,000,000	APBD	Prioritas	
		SPAL dan Sumur Resapan Kelurahan Trikora	Kel. Trikora	1	100,000,000	APBD	Prioritas	
		Belanja Penunjang				350,000,000	APBD	Prioritas
	2	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	Meningkatnya jumlah Kelurahan / Desa yang ditingkatkan mutu lingkungan permukiman yang		5000	18,123,020,000	APBD	Prioritas
		Perencanaan Teknis (Swakelola)		1	175,000,000	APBD	Prioritas	
		Pengawasan teknis (Swakelola)		1	250,000,000	APBD	Prioritas	
		Belanja Penunjang		1	400,020,000	APBD	Prioritas	
		Kegiatan PISEW		1	150,000,000	APBD	Prioritas	
		Peningkatan Jalan Masuk TPU Kelurahan Foa	Kec. Aimere	1	200,000,000	APBD	Prioritas	
		Lanjutan TPT Kampung Bajawa - Kota Bajawa	Kec. Bajawa	1	200,000,000	APBD	Prioritas	
		Peningkatan Jalan Puskesmas Naru Mau - Boba, Desa Wogowela	Kec. Golewa Selatan	1	300,000,000	APBD	Prioritas	
		TPT Kapela Ogi	Kec. Bajawa	1	150,000,000	APBD	Prioritas	
		Pembangunan Boq duicker menuju daerah persampahan Pore	Kel. Benteng Tengah, Kec. Riung	1	400,000,000	APBD	Prioritas	
		Penataan Kampung Bogenga	Kec. Bajawa	1	150,000,000	APBD	Prioritas	
		TPT Kampung Boripo	Kec. Bajawa	1	200,000,000	APBD	Prioritas	
		Lanjutan Pembangunan Saluran dan TPT di Belakang Kampung Warusoba (Bajawa - Ekoheto)	Kec. Bajawa	1	200,000,000	APBD	Prioritas	
		Pembangunan TPT dan saluran ke taman doa (lanjutan)	Kec. Bajawa	1	300,000,000	APBD	Prioritas	

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				2,261,830,000		
	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Prosentase pelayanan pengangkutan sampah		1	2,261,830,000	APBD	Prioritas
		- Prosentase sampah yang diolah di TPST		0.1			
	1 Penyediaan Prasarana & sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan :			2,261,830,000	APBD	Prioritas
		* Petugas kebersihan kota	Kota Bajawa	50 org	648,000,000	APBD	Prioritas
		* Perlengkapan kerja	Kantor DLH	1 paket	40,750,000	APBD	Prioritas
		* Motor sampah roda 3 yg beroperasi	Kantor DLH	10 unit	73,150,000	APBD	Prioritas
		* Mobil sampah yang beroperasi	Kantor DLH	3 unit	280,780,000	APBD	Prioritas
		* Mobil Tanki air yang beroperasi	kantor DLH	1 unit	21,375,000	APBD	Prioritas
		* Mesin potong rumput yang beroperasi	kantor DLH	10 unit	19,375,000	APBD	Prioritas
		* Perjalanan Dinas pengawasan	Kantor DLH	322 OH	78,400,000	APBD	Prioritas
		* Mesin pellet plastik	Kantor DLH	1 unit	450,000,000	APBD	Prioritas
		Hasil forum OPD					
		- Truck armrol	- Kec. Soa	1 unit	450,000,000	APBD	Prioritas
		- Motor sampah roda 3	- Kec. Soa	2 unit	90,000,000	APBD	Prioritas
		- Bak armrol	- Kec. Soa	2 buah	110,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS PERHUBUNGAN				360,000,000	APBD	Prioritas
	1 PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Kendaraan Layak Operasi	Kab Ngada	100.00%	150,000,000	APBD	Prioritas
	1 Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan yang tidak layak Jalan/Tidak Layak Angkut yang uji		100%	150,000,000	APBD	Prioritas
		Terikutsertanya Aparatur dalam Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	-	APBD	Prioritas
	2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah Trayek Angkutan Dalam Kota Bajawa	Bajawa	3	110,000,000	APBD	Prioritas
	1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Kendaraan yang tidak layak Jalan/Tidak Layak Angkut yang terjaring		250 kendaraan	60,000,000	APBD	Prioritas
	2 Pengumpulan dan analisis database	Tersedianya Databaselalulintas yang akurat		1 dokumen	50,000,000	APBD	Prioritas
	3 PROGRAM PENGENDALIAN PENGAMAN LALU LINTAS	Persentase Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan		10 orang	100,000,000	APBD	Prioritas
	1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas	Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan yang disiapkan dan Jumlah pemeliharaan traffic light yang dibayarkan			100,000,000	APBD	Prioritas
		Jumlah trafict ligt yang terpelihara		7 buah	-		
	4 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terlaksananya koordinasi bidang perhubungan laut dan udara (data dan rapat koordinasi)		6 orang	-	APBD	Prioritas
	1 Kegiatan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya koordinasi dan terpenuhinya kebutuhan pembangunan Dermaga/Pelabuhan Rakyat			-	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN				2,726,037,750		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha UMKM		0	2,726,037,750	APBD	Prioritas
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan Kewirausahaan bagi pengurus/pengelola UMKM		70 Orang	143,375,000	APBD	Prioritas
	2 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Terselenggaranya sosialisasi dan teridentifikasi calon penerima dana bergulir baru		20 UMKM/KOP	82,662,750	APBD	Prioritas
	- Sosialisasi dan Identifikasi Calon Peserta						
	Penerima dana gulir						
	3 Fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah				2,500,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KEEMPAT				63,151,232,319		
	DINAS PENDIDIKAN				63,151,232,319		
	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni PAUD	Kabupaten Ngada	46.89%	2,599,893,750	APBD	Prioritas
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar PAUD		45.72%			
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	Kabupaten Ngada	100	1,000,000,000	DAK	Prioritas /
	Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa	Tersedianya alat pratek dan peraga siswa	Kabupaten Ngada	100	500,000,000	DAK	Prioritas / Musrenbangca
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Tersedianya bangunan sekolah yang memadai	Kabupaten Ngada	100	150,000,000	DAU	Prioritas/Reses
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Terwujudnya peningkatan kompetensi Pendidik PAUD	Kabupaten Ngada	100	35,000,000	APBD	Prioritas
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Kabupaten Ngada	100	545,633,750	APBD	Prioritas
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Ops. Badan Akreditasi Sekolah	Kabupaten Ngada	100	35,000,000	APBD	Prioritas
	Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini (Pelatihan Dapodik)	Tersedianya data pendidkan PAUD-Dikmas	Kabupaten Ngada	100	30,680,000	APBD	Prioritas
	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Koordinasi PAUD)	Tersedianya dokumen kebijakan dan aturan penyelenggaraan PAUD-Dikmas	Kabupaten Ngada	100	48,580,000	APBD	Prioritas
	Pengembangan Kurikulum,bahan ajar, dan model pembelajaran PAUD (sosialisasi kurikulum dan kebijakan PAUD)	Terselenggaranya proses belajar mengajar PAUD-Dikmas	Kabupaten Ngada	100	25,000,000	APBD	Prioritas
	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak	Terlaksananya keikutsertaan guru PAUD-Dikmas	NTT	100	100,000,000	APBD	Prioritas
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya keikutsertaan WBPnf dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAUD-Dikmas	Surabaya, Semarang, Jakarta	100	100,000,000	APBD	Prioritas
		Meningkatnya Partisipasi Murni :			58,812,467,769		
		SD		100			
		SMP		68.86			
	2 Program Wajar Dikdas 9 Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar :	Tersebar di 12 Kecamatan				
		SD		100			
		SMP		93.26			
		Meningkatnya nilai rata-rata kelulusan :					
		SD		6.8			
		SMP		6.8	57,073,596,969		
	Pembangunan Gedung sekolah	Terbangunnya unit sekolah baru	Kecamatan Aimere		1,500,000,000	APBD	Prioritas
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP	Meningkatnya sarana pendidikan dan daya tampung anak usia sekolah SD : 3.640.000.000, SMP : 2240000000	Tersebar di 12 Kecamatan	8	5,880,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas/Reses
	Pengadaan buku - buku alat tulis siswa	Meningkatnya kualitas siswa	Tersebar di 12 Kecamatan		11,000,000,000	APBD	Prioritas
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP	Tersedianya Ruang Perpustakaan SD = 2.025000000, SMP : 1894000000	SDA	7	3,919,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas / Musrenbangca

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Pengadaan buku-buku Perpustakaan	Tersedianya bukuperpustakaan yang memaadai SD 1.277000000, SMP : 2015000000	SDA	80	3,292,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas/ Musrenbangca m
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Tersedianya alat pratek dan peraga siswa yang memadai		30	1,040,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas/ Musrenbangca

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SD dan SMP	Tersedianya bangunan sekolah yang memadai SD : 2.150.000.000, SMP 3.795000000		10	5,945,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas/Reses
	Pembangunan Laboratorium IPA SMP	Tersedianya laboratorium			4,617,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Pembangunan Jamban SMP				765,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Pengadaan media pembelajaran	62 sekolah SMP			2,150,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Pengadaan sarpras Sekolah				15,000,000,000	APBD	Prioritas
	Pelatihan Kompetensi Siswa berprestasi	Jumlah siswa yang berprestasi		900	397,000,000	APBD	Prioritas/ Musrenbangca m
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum (K-13) :	Terselenggaranya K-13		66	308,000,000	APBD	Prioritas/ Musrenbangca
	Penyediaan Batuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sallafiah dan Satuan Pendidikan non - Islam setra SD dan SMP	Tersedianya bantuan Honorarium Guru Honor	SDA	1130	1,839,801,969	APBD	Prioritas/ Musrenbangca m
	Penyelenggaraan paket B setera SMP	Peningkatan tuntas wajar 9 tahun	Tersebar di 12 Kecamatan		55,000,000	APBD	Prioritas
	Pembinaan Minat bakat dan kreatifitas siswa	Jumlah siswa berbakat dan kreatif		244	175,120,000	APBD	Prioritas/ Musrenbangca
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring UN		100	690,675,000	APBD	Prioritas
	3 Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya akses terhadap pendidikan dan		450	157,500,000	APBD	Prioritas
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik non Formal	Tersedianya tenaga pendidik SKB yang berkompentensi	Aimere	12	25,500,000	APBD	Prioritas
	Pemberian Bantuan PNF	Tersedianya Bantuan Operasional SKB	Aimere	12	40,000,000	APBD	Prioritas
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah peserta kursus yang memiliki keterampilanTeknis	Aimere	12	22,500,000	APBD	Prioritas
	Penyediaan sarana dan prasarana PNF	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Aimere	12	24,500,000	APBD	Prioritas
	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya kebijakan-kebijakan Non-Formal	Aimere	12	22,500,000	APBD	Prioritas
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan PNF	Kabupaten Ngada	12	22,500,000	APBD	Prioritas
	4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru :	Bajawa	6	971,370,800	APBD	Prioritas
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terseleksinya Guru yang layak untuk sertifikasi	Bajawa	200	103,128,300	APBD	Prioritas
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik	Tersebar di 12 Kecamatan		370,000,000	APBD	Prioritas
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya tenaga pendidik yang berkompentensi	Bajawa	400	50,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Pelatihan bagi pendidik un tuk meenuhhi standar kompetensi (guru pembelajaran)	Tercapainya guru yang berkompetensi	Bajawa	480	302,500,000	APBD	Prioritas
	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik/kependidikan	Tersedianya data dan informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bajawa	480	110,742,500	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi dan pelaporan tenaga GTK	Bajawa	404	35,000,000	APBD	Prioritas
	5	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan					
		Tersedianya pengelolaan data pokok pendidikan yang akurat	Kabupaten Ngada	404	610,000,000	APBD	Prioritas
		Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Kabupaten Ngada	100	50,000,000	APBD	Prioritas
		Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Ngada	100	-	APBD	Prioritas
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Pendataan penyusunan statistik dan profil pendidikan)	Kabupaten Ngada	100	210,000,000	APBD -BANK DUNIA	Prioritas
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biaya Perjalanan Dinas Dlm.Daerah)	Kabupaten Ngada	100	350,000,000	APBD	Prioritas
		Terselenggaranya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KELIMA				137,361,934,014		
	DINAS KESEHATAN				77,410,999,866		
	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM Bidan dan Perawat sesuai standar minimal/Total ADM yang ada x 100)		62.04	51,000,000	APBD	Prioritas
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya tenaga kesehatan yang mengikuti program pendidikan jarak jauh sebanyak 20 orang	Di kabupaten	100%	51,000,000	APBD	Prioritas
	2 Program Obat dan perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jmlh/jenis obat yg tersedia/jml obat yg dibutuhkan x 100)	Dinkes dan Puskesmas	98%	2,082,050,000	APBD/APBN	Prioritas
	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar dan KLB, Bahan Habis Pakai dan Reagensia			5,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketertiban dalam pendistribusian obat ke sarana kesehatan, Ketertiban PIRT dan Sertifikat bagi pemilik industri dan meningkatkan kualitas pelayanan obat			108,340,000	APBD	Prioritas
	3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar	Puskesmas	100%	15,214,728,384	APBD/APBN	Prioritas
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya		15 Puskesmas	100000%	2,000,000,000	DAK Non Fisik	Prioritas/Musr embangcam
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan			80,340,000	DAU	Prioritas/Musr embangcam
	Revitalisasi sistem Kesehatan				793,200,000	DAK Non Fisik	Prioritas/Musr embangcam
	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial		Puskesmas	15 Paket	7,000,000,000	DAK Fisik	Prioritas/Musr embangcam
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes		76.86%	5,263,888,384	DAU, JKN	Prioritas/Musr embangcam
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				60,000,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	meningkatnya cakupan program kesehatan	Dinkes	90%	17,300,000	APBD	Prioritas
	4 Program Pengawasan Obat dan Makanan		7 kecamatan	100 sampel	29,671,000	DBH	Prioritas
	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya				29,671,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS (Jmlh Rumah Tangga ber PHBS/Total Rumah Tangga x 100)	12 Kecamatan	79.86%	7,777,591,000	APBN	Prioritas/Musr embangcam
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS	12 kecamatan	153 desa	359,965,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	meningkatnya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		80%	7,417,626,000	DAK Non Fisik	Prioritas/Musr enbangcam
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk yang ditangani	Kabupaten Ngada	3 kasus	167,520,000	DBH	Prioritas/Musr enbangcam
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Tersedianya data status Gizi	Puskesmas	14 Puskesmas	24,610,000	DBH	Prioritas/Musr enbangcam

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Perbaikan makanan Tambahan dan Vitamin	Meningkatnya status Gizi Balita setelah PMT	Puskesmas	100%	32,780,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Kurang zat gizi mikro	Meningkatnya Status Gizi Balita	Puskesmas	90%	18,280,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya cakupan program gizi yang dilakukan oleh Puskesmas	Puskesmas	100%	91,850,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	7 Program Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Ber STBM	Kabupaten Ngada	96	136,270,000	DBH	
	Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat	meningkatnya cakupan sarana sanitasi TTU/TPM dan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	puskesmas	14 puskesmas	28,940,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Peningkatan kualitas lingkungan	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan aparat desa serta masyarakat tentang STBM	Desa	18 desa	107,330,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penurunan kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi	Kabupaten Ngada	30%	307,643,500	DBH	
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	menurunnya kasus demam berdarah pada akhir tahun 2017	kecamatan	6 lokasi	25,730,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak sekolah	meningkatnya cakupan imunisasi bayi, balita, anak sekolah dan WUS	puskesmas	14 Puskesmas	50,018,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	meningkatnya penyelidikan, pelacakan dan penanggulangan penyakit menular berpotensi wabah	14 Puskesmas	100%	158,780,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Peningkatan Surveillance epidemiologi dan Penanggulangan Wabah :	Meningkatnya surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	14 Puskesmas	100%	73,115,500	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang memenuhi Standar Pelayanan Dasar	Kabupaten Ngada	85.27%	350,000,000	DBH	Prioritas
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	terlayannya proses kenaikan pangkat bagi pegawai yang naik pangkat dalam periode	Kab		44,340,000	DBH	Prioritas
	Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.	Peningkatan pengembangan standar Kesehatan	Dinkes dan Puskesmas		134,230,000	DBH	Prioritas
	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan	Ketertiban dokumen Profil Dinas Kesehatan	Dinkes dan Puskesmas	15 Dokumen	99,430,000	DBH	Prioritas
	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	tersedianya naskah akademik untuk kegiatan Dinas kesehatan			72,000,000	DBH	Prioritas
	10 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar	Puskesmas dan jaringannya		48,660,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
		Puskesmas		17	-		Prioritas/ Reses DPRD (Puskesmas)
		Pustu		28	-		
		Pusling		20	-		
	Pembangunan Puskesmas	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat			-	APBN	Prioritas/Musr embangcam
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Tersedianya fasilitas kesehatan di Pustu			-	DAK	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Meningkatnya mutu pelayanan rujukan			3,510,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	meningkatnya kebutuhan sarana penunjang di Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas		22,000,000,000	Usulan DAK/ APBD	Usulan Musrenbangca
	Pemeliharaan Rutin / berkala sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya kenyamanan petugas medis dan paramedis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4 Puskesmas	-	APBD	Usulan Musrenbangca m

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Ngada	14 Puskesmas	100%	2,500,000,000	DAU	Prioritas
	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang mampu		14 Puskesmas	86.000 Jiwa	2,500,000,000		Prioritas/ Reses DPRD (distribusi)
	12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya Kasus Kematian Balita	Kabupaten Ngada	34	55,465,000	DBH	Prioritas/Musr embangcam
	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita				55,465,000		Prioritas/Musr embangcam
	14 Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya Kasus Kematian Ibu	Kabupaten Ngada	2	79,060,982	DBH	Prioritas/Musr embangcam
		Menurunnya Kasus Kematian Bayi	Kabupaten Ngada	30			
	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu				79,060,982	DBH	Prioritas/Musr embangcam

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	RSUD				56,902,000,000		
	1 Prog. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD	RSUD Bajawa	??	56,902,000,000	APBD/BLUD	Prioritas
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Standar Kelengkapan Alat dan Perbekalan Kesehatan		56.8	17,076,000,000	Usulan DAK/ APBD	
		a. Ketersediaan / kelengkapan sesuai standar type C		100			
		b. Prosentase alat yang dikalibrasi		100			
		c. Ketepatan waktu pemeliharaan alat		100			
		d. Terpeliharanya seluruh alat kesehatan					
		Standar Ketersediaan Ruang Pelayanan		65			
		a. Sarana / prasarana RSUD Bajawa memenuhi		100			
		b. Terpeliharanya bangunan RSUD Bajawa			276,100,000	BLUD	
		Standar Ketersediaan Sumber Daya Manusia		55			
		a. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan		50.14	6,950,382,500	DAU/BLUD	
		b. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan lebih					
		Standar Mutu Pelayanan			5,066,800,000	BLUD	
		a. Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit					
		BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)		63.7	244,155,000	BLUD	
		AVLOS (<i>Average Length of Stay</i>)		6			
		BTO (<i>Bed Turn Over</i>)		62.36	1,803,350,000	BLUD	
		TOI (<i>Turn Over Interval</i>)		1.97			
		NDR (<i>Net Death Rate</i>)		16.99	-	BLUD	
		GDR (<i>Gross Death Rate</i>)		28.3			
		Rata-rata kunjungan rawat jalan		66	58,000,000	BLUD	
		Rata-rata kunjungan rawat inap		19			
		Pelayanan Medik Umum		9 dokter umum 2			
		Indeks Kepuasan Masyarakat		66.22			
		b. Peningkatan kinerja pelayanan Rumah Sakit					
		1 Gawat Darurat					
		Pemberi Pelayanan Kegawat Daruratan		92.94	4,098,235,000	DAU	
		Waktu Tanggap Pelayanan Dokter Di IGD ≤ 5		100		DAU	
		2 Rawat Jalan				DAU	
		Dokter pemberi pelayanan spesialis rawat jalan,		100			
		Ketersediaan klinik rawat jalan, kebidanan, peny.		100	75,742,500	DAU	
		3 Rawat Inap					
		Ketersediaan Pelayanan di Rawat Inap		100	223,376,000	DAU	
		Kejadian infeksi paska operasi		≤ 1.5 %			
		Kematian pasien > 48 jam		≤ 0.24	505,114,000	BLUD	
		Kejadian pasien pulang paksa		≤ 5 %			
		4 Kamar Operasi					
		Kejadian Kematian di meja operasi		≤ 1 %			
		Tidak adanya kejadian operasi salah sisi		100			
		Tidak adanya kejadian operasi salah orang		100			
		Tidak adanya tertinggal benda asing lain pada		100			
		Tidak adanya kejadian ketinggalan benda		100			
		Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi		≤ 6			
		5 Persalinan, Perinatalogi dan KB			274,460,000	DAU	
		Kejadian kematian ibu bersalin karena					
		a. Perdarahan		≤ 5			
		b. Preeklamsi		30			
		c. Sepsis		≤ 0.2			

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Pemberian Pelayanan persalinan normal		100			
		Pemberian Pelayanan persalinan dengan penyulit		0			
		Pemberian Pelayanan persalinan dengan tindakan		100			
		Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr		97.66			
		Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria		≤ 26.19			

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		Keluarga berencana					
		a. Presentase KB (vasektomi dan tubektomi) yg		86			
		b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat		100			
		6 ICU					
		Pemberi Pelayanan Unit Intensif		80			
		7 Radiologi					
		Pelaksanaan Ekspertise oleh dr Sp. Radiologi		100	3,174,285,000	Usulan DAK/ APBD	
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen		≤ 2			
		8 Laboratorium					
		Tidak ada kesalahan pemberian hasil		100			
		Pelayanan ekspertisi		100			
		9 Fisiotherapi					
		Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan		100			
		10 Farmasi					
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat		100			
		Penulisan resep sesuai dengan formularium		100			
		11 Rekam Medik					
		Kelengkapan dokumen infom consent setelah		100			
		12 Bank Darah					
		Terpenuhinya kebutuhan darah bagi setiap		100			
		13 Ambulance/Mobil Jenazah					
		Respon time Kecepatan memberikan pelayanan		100			
		14 Pemulasaran Jenazah					
		Waktu tanggap (respon time) pelayanan		100			
		15 Gizi					
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet		100			
		16 Pelayanan Laundry					
		Tidak adanya kejadian linen yang hilang		100			
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang		100			
		17 Pengelolaan Limbah					
		Pengelolaan limbah infeksius sesuai dengan		100			
		18 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)					
		Angka kecelakaan kerja		60			
		19 Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)					
		Adanya anggota tim PPI yang terlatih		100			
		Tersedianya APD di setiap instalasi/ unit		35			
		20 Pelayanan masyarakat miskin					
		Tersedianya pelayanan bagi masyarakat miskin di		100			
		Peningkatan Mutu Tata Kelola Administrasi dan Manajemen RSUD Bajawa yang baik					
		Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan		100			
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja		100			
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat		100			
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala		100			
		Cost recovery		3.4			
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan		100			
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang		60			
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif)		100			
		Akreditasi Tingkat Madya RSUD Bajawa		100			
		Dokumen surat ijin prektek/STR		100			

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	AKSP2KB				3,048,934,148	APBD	Prioritas
	1 Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif		55.70	2,769,625,058	APBD	Prioritas
	Pelayanan KIE	Terlaksananya Pelayanan KIE	12 Kecamatan		163,593,675	APBD	Prioritas
	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan KB	12 Kecamatan		946,408,785	APBD	Prioritas
		- Jumlah Akseptor KB Baru	12 Kecamatan	3535			
		- Jumlah Peserta KB Aktif	12 Kecamatan	9205			
		- Jumlah Persediaan Alat Kontrasepsi per peserta	12 Kecamatan	12740			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang tersedia	12 Kecamatan		1,638,000,000	Usulan DAK/ APBD	Prioritas
	Promosi Pelayanan Khiba	Terlaksananya promosi Khiba	6 Kecamatan	Toga, Toma	21,622,598	APBD	Prioritas
	2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja		67.1	98,311,500	APBD	Prioritas
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja			98,311,500	APBD	Prioritas
		- Jumlah remaja (Kader Pendidik sebaya dan Konselor sebaya) yang diadvokasi	10 sekolah	10			
		- Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja	6 sekolah	6			
	3 Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Cakupan KB Aktif	Bajawa	55.7	180,997,590	APBD	Prioritas
	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pemasangan Implant dan IUD	15 Puskesmas	750 Akseptor	180,997,590	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KEENAM				3,502,580,525		
	BPBD				975,000,000		
	1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Persentase bencana alam yang ditangani.	Kab Ngada	100	975,000,000	APBD/APBN	Prioritas
		2. Persentase bencana non alam yg ditangani	Kab Ngada	100			
	1 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana				350,000,000	APBD/APBN	Prioritas
	2 Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik pasca bencana				625,000,000	APBD/APBN	Prioritas
	3 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong				-	APBD/APBN	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	DINAS SOSIAL				2,108,650,000		
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/Prosentase PMKS yang diberdayakan		60.24	253,489,000	APBD	Prioritas
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar			253,489,000	APBD	Prioritas
	- Pemberdayaan KAT Turaloa (pendampingan dana APBN Tahun 2017 + pemberian Jadup)	Meningkatnya Keberdayaan sosial bagi KK Fakir Miskin	Turaloa	50 kk	150,000,000	APBD	Prioritas
	- Program Keluarga Harapan	Jumlah RTSM yang diberikan bantuan	12 Kecamatan	4500 orang	103,489,000	APBD	Prioritas
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Prosentase PMKS yang direhabilitasi		49	1,227,915,000	APBD	Prioritas
	Pelayanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memahami fungsi dan peran lembaga perlindungan yakni Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Bajawa	25 orang	97,915,000	APBD	Prioritas/ SPM WKBSM
	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pendataan PMKS) (Pemutakhiran Data PMKS) + pembuatan buku profil	Jumlah PMKS yang dilakukan pemutakhiran	Tersebar di Kab. Ngada	22 PMKS/30.000 org	100,000,000	APBD	Prioritas/ Musrenbang
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan segera melalui bantuan emergensi dan BBR	Tersebar di Kab. Ngada	50KK/250 orang	1,000,000,000	APBD	Prioritas/ SPM WKBSM
		Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		80%			Prioritas/ SPM WKBSM
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan bagi PMKS yang telah		100 kali	30,000,000	APBD	Prioritas/ SPM WKBSM
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial/Prosentase PMKS yang terbina		16.4	291,946,000	APBD	Prioritas
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan Lansia terlantar yang mendapat sarana sosial	Bajawa	50 orang	291,946,000	APBD	Prioritas/ Musrenbang
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Peningkatan Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS		47	335,300,000	APBD	Prioritas
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat <i>(Pelatihan)</i>	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan	Bajawa	10 orang	165,000,000	APBD	Prioritas/ SPM WKBSM
	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan sosial Masyarakat <i>(termasuk insentif Tagana, TKSK)</i>	Jumlah pelaku-pelaku sosial/orsos yang diberikan sosialisasi	Bajawa	11 buah	170,300,000	APBD	Prioritas/ SPM WKBSM

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	KESBANGPOLINMAS				418,930,525		
	1 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Adanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib		100%	-	APBD	Prioritas
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan : Inteligen dan terlaksananya deteksi dini untuk pencegahan potensi AGHT	Bajawa	100%	-	APBD	Prioritas
	2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Terekam dan tertanganinya berbagai persoalan di masyarakat	Bajawa	100%	105,196,075	APBD	Prioritas
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan	Terekam dan tertanganinya berbagai persoalan di masyarakat	Bajawa	100%	67,211,500	APBD	Prioritas
	Peningkatan kerjasama penanganan aktivitas orang asing dan lembaga asing	Terlaksananya pemantauan aktivitas orang asing dan lembaga asing	Bajawa	100%	17,784,575	APBD	Prioritas
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bajawa	100%	20,200,000	APBD	Prioritas
	3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya Wawasan Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Bajawa	100%	136,499,700	APBD	Prioritas
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran	Bajawa	100%	64,790,000	APBD	Prioritas
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan	Terlaksananya Rakor dan Rapat Evaluasi serta	Bajawa	100%	21,709,700	APBD	Prioritas
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam	Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragama	Bajawa	100%	50,000,000	APBD	Prioritas
	4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Berkurangnya Kasus Bersumber Penyakit Masyarakat	Bajawa	100%	130,935,000	APBD	Prioritas
	Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	Bajawa	100%	130,935,000	APBD	Prioritas
	5 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Bajawa	100%	46,299,750	APBD	Prioritas
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Bajawa	100%	35,385,000	APBD	Prioritas
	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terlaksananya penyusunan Data Base Partai Politik dan terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik	Bajawa	100%	10,914,750	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	PRIORITAS MISI KETUJUH				8,979,294,248		
	BKDIKLAT				4,642,964,105		
	1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah melalui jenjang pendidikan formal		10 orang	3,049,657,350	APBD	Prioritas
	1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS	Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat dan penyesuaian tingkat pendidikan	BK- DIKLAT		59,674,650	APBD	Prioritas
	2. Seleksi penerimaan CPNSD	Diperolehnya para pegawai baru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan	BK- DIKLAT		170,744,700	APBD	Prioritas
	3. Penempatan PNSD	Terwujudnya penataan dan distribusi PNS berdasarkan tingkat kompetensi dan keahlian	BK- DIKLAT		134,045,000	APBD	Prioritas
	4. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Tersedianya Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu	BK- DIKLAT		189,462,300	APBD	Prioritas
	5. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel	BK- DIKLAT		71,712,000	APBD	Prioritas
	6. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas analisa jabatan yang mengandung tugas,tanggungjawab dan kinerja serta memenuhi persyaratan jabatan	BK- DIKLAT		-	APBD	Prioritas
	7. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur sipil negara	BK- DIKLAT		112,443,700	APBD	Prioritas
	8. Pemberian bantuan tugas belajar dan	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara yang handal,profesional dan berintegritas	BK- DIKLAT		2,180,320,000	APBD	Prioritas
	9. Pemberian bantuan penyelenggaraan Taruna STP	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal, profesional dan berintegritas	BK- DIKLAT		16,000,000	APBD	Prioritas
	10. Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat bagi PNS tepat waktu	BK- DIKLAT		115,255,000	APBD	Prioritas
	2 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	- Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara yang belum mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat II	BK- DIKLAT	6 orang	1,593,306,755	APBD	Prioritas
		- Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara yang belum mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III		34 orang		APBD	Prioritas
		- Berkurangnya jumlah aparatur sipil negara yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan Tingkat IV		202 orang		APBD	Prioritas
	1 Pendidikan dan penjenjangan struktural	Peningkatan kompetensi pejabat struktural yang berintegritas, kreatif, dan inovasi dalam pelayanan			1,593,306,755	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	BAGIAN ORGANISASI				75,000,000		
	Program Peningkatan Sistim Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Meningkatnya nilai evaluasi LKJIP skala nasional		B	75,000,000	APBD	Prioritas
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, PK, jumlah Bimtek LKJIP dan Stuba LKJIP ke Yogyakarta	Bag. Org	2 dok & 1 kali bimtek	75,000,000	APBD	Prioritas
	BPLITBANG				692,023,900		
	1 Program Pengembangan Data/Informasi	1. Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Bajawa	100	607,023,900	APBD	Prioritas
		2. Meningkatnya Keterisian Data dan Informasi Pembangunan daerah	Ngada	78.2			
	1. Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target	Prosentase keterisian data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bajawa	78.18	107,023,900	APBD	Prioritas
	2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Penerapan E-Planning dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Bajawa	100	500,000,000	APBD	Prioritas
	2 Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Sumber Dana Dalam Pembangunan Daerah	Bajawa	4 Kali	85,000,000	APBD	Prioritas
	1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga		Bajawa	1	85,000,000	APBD	Prioritas
	2. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah Koordinasi lintas sektor dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Bajawa	4	-	APBD	-

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
	INSPEKTORAT				2,074,553,643				
	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah		Meningkatnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah dan	WTP	1,267,587,516	APBD	Prioritas	
		Pelaksanaan pengawasan internal secara		Jumlah OPD yang dilakukan pemeriksaan	Tersebar	8 obrik	246,875,388	APBD	Prioritas
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan		Jumlah pengaduan yang ditangani	Tersebar	6 obrik	93,086,832	APBD	Prioritas
		Pengendalian manajemen pelaksanaan		Jumlah Reviu, evaluasi dan penyampaian hasil	Tersebar	18 obrik	505,605,600	APBD	Prioritas
		Penanganan kasus pada wilayah		Jumlah pemeriksaan pada desa/kelurahan dan	Tersebar	28 obrik	422,019,696	APBD	Prioritas
				Meningkatnya persentase tindak lanjut temuan pengawasan		20 % (dari total rekomendasi temuan sebesar 1.160)	422,301,322	APBD	Prioritas
		Inventarisasi Temuan Pengawasan		Jumlah LHP/LHA APIP dan BPK yang	Bajawa	45 LHP	124,931,000	APBD	Prioritas
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Jumlah monitoring, evaluasi dan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan	Bajawa, 12 kecamatan, Kupang dan Jakarta	22 kali	184,670,000	APBD	Prioritas
		Koordinasi Pengawasan yang lebih		Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan	Bajawa, Kupang dan	9 kali	112,700,322	APBD	Prioritas
	2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa		8 org	384,664,805	APBD	Prioritas
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah tenaga pemeriksa yg mengikuti pelatihan pengembangan	Bajawa, Kupang, Ciawi dan Jakarta	4 org	204,050,000	APBD	Prioritas
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja		Jumlah tenaga pemeriksa yg mengikuti pelatihan teknis	Bajawa, Denpasar, Ciawi dan Jakarta	8 org	180,614,805	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM				405,000,000		
	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah		87,5% dari skor 3,2000	310,000,000	APBD	Prioritas
	1 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah	Jumlah LKPJ akhir tahun 2017	Bagian Pem SETDA - Ngada	130 bk	175,000,000	APBD	Prioritas
	2 Penyusunan LPPD, ILPPD, dan EKPPD	Adanya LPPD, ILPPD, dan EKPPD 2017	Bagian Pem SETDA - Ngada	LPPD 10 bk	135,000,000	APBD	Prioritas
	3 Penyusunan Memori Sekda	Adanya Buku Memori Sekda Ngada	Bagian Pem SETDA - Ngada	30 buku	-	APBD	Prioritas
	2 Program Penataan daerah otonomi baru	Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi		33% dari tiga tahap	95,000,000	APBD	Rutin
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten		75% dari 4 tahap			
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan		33% dari 3 tahap			
	1. Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Adanya fasilitasi aspirasi pemekaran/pembentukan wilayah (Prov. Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara)		3 kegiatan	60,000,000	APBD	Prioritas
	2. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Adanya fasilitasi penyelesaian masalah titik batas antar daerah		100%	35,000,000	APBD	Prioritas

KODE	URUSAN/BIDANG, URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
	BADAN KEUANGAN				1,089,752,600		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya status pelaporan pnegelolaan keuangan daerah		WTP	904,062,600	APBD	Prioritas
	1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	LK konsolidasi Semester I TA. 2018	Bajawa	1 Dokumen	304,252,900	APBD	Prioritas
	2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	LKPD TA. 2017	Bajawa	1 Dokumen	599,809,700	APBD	Prioritas
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Tertatnya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah		100%	185,690,000	APBD	Prioritas
	1. Penyusunan sistim informasi terhadap layanan publik (E Billing system)	e-pajak dan e-retribusi daerah	Bajawa	1 dokumen	185,690,000	APBD	Prioritas